

ISSN NO. 0853-5922

ekstensia

VOLUME 3 TAHUN II, FEBRUARI 1996

" REVITALISASI "

**MENYIBAK KEMELUT PENYULUHAN
PERTANIAN DENGAN KEARIFAN**

n dan
anusia

M1
EKS

ekstensia

majalah penyuluh pertanian

Diterbitkan berdasarkan
SK. Menteri Pertanian No. 755/Kpts/KP. 150/10/94

Pelindung *Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian*

Pengarah *H. Rochajat Harun*

Tim Penyunting
Ketua Zahir Zachri
Sekretaris Agus Hariyadi
Anggota Godlim Panggabean
Andi Sumarga
Ranny Mutiara
Basuki Setiabudi
Bram Joko Santoso
Ratna Andaya
Sri Hartati
Yulia Tri Sedyowati

Perwajahan *El Suherly*
Suparman
Suhermanto
Dwihayanti
A. Erniati

**Administrasi dan
Distribusi** *IG.K. Swastika*
Yaya Sofyan
Riza Fakhrizal
Asep Sukandar
Sarmidi

Alamat **Pusat Penyuluhan Pertanian**
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung A Lantai III, Jakarta 12550
Telp. 7804116, 7806131
Pesawat 2316, 2310

Salam ekstensia,

Dua tahun sudah Pusat Penyuluhan Pertanian berkiprah sebagai pengelola penyuluhan pertanian di tingkat Nasional. Berjuta asa dan harapan bergantung pada kehadirannya, sementara kemelut mendung penyuluhan pertanian belum lagi terasa surut. *ekstensia* kali ini mencoba mengangkat Konsep *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* yang telah dihasilkan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian melalui studi bersama-sama Konsultan Bank Dunia. Melalui Sarasehan Sehari bersama para Pakar dan wawancara eksklusif yang dilakukan *ekstensia*, Zahir Zachri, Ranny Mutiara bersama Bram Joko Santoso, Agus Hariyadi dan Sri Hartati, mencoba menggali pendapat dan opini para pakar, pemerhati dan pelaku penyuluhan pertanian terhadap lahirnya kebijaksanaan *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* ini.

Mengapa tidak, *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* sebagai sebuah kebijaksanaan sudah barang tentu akan memberikan gambaran ke arah mana petani - nelayan kita akan beranjak, bagaimana sosok petani-nelayan Indonesia di masa datang. Bukan cuma itu, tiga puluh ribuan lebih para penyuluh pertanian yang tersebar diseantero jagad nusantara kita ini akan ikut ditentukan nasib pengembangan status, karier dan profesionalismenya. Karenanya, teramat sayang bila rubrik JENTERA di majalah ini anda lewatkan.

CAKRAWALA kita kali ini menampilkan pemikiran Pakar Penyuluhan Pertanian, Salmon Padmanagara mengenai sosok petani kita melalui *:Pendidikan Pertanian untuk Petani*, A. Soedrajat Martaamidjaja kali ini mengetengahkan tulisannya tentang *Magang-Tani Mendorong Saling Belajar antar Petani*. Untuk meluaskan cakrawala pandang kita tentang Konsep *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*, H. Rochajat Harun, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian berkenan menyajikannya dalam rubrik CAKRAWALA.

Ditengah keluh kesah, bingung dan resah serta keprihatinan yang mendalam terhadap pudarnya fungsi dan peranan BPP, Yulia dan Ratna Andaya dari *ekstensia* mencoba menampilkan sosok H. Otong, KTNA dari Binong Subang Jawa Barat yang telah mencurahkan kecintaannya kepada BPP melalui Gerakan *Tarbu*. Suatu wujud nyata dari dinamika masyarakat pertanian dan kepemimpinan petani yang mampu mewujudkan prakarsanya menjadi kegiatan nyata dalam merehabilitasi BPP Binong. Sebuah pengalaman dan sekaligus pembuktian terhadap kekuatan kesawadayaan dan kemandirian petani, karenanya, rubrik CERMIN kita kali inipun hendaknya jangan anda lewatkan.

Andi Sumarga, Basuki dan Ratna Andaya melalui rubrik CENGERAMA yang diasuhnya, menampilkan beberapa pengalaman Kontaktani, Ketua KUD dan Penyuluh Pertanian dalam merenangi samudra *wawasan tanpa batas-nya*. Silahkan anda simak, temu karya dalam tulisan di rubrik ini disajikan memang untuk anda semua.

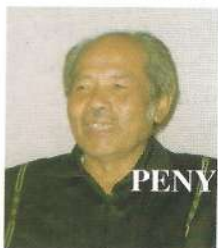
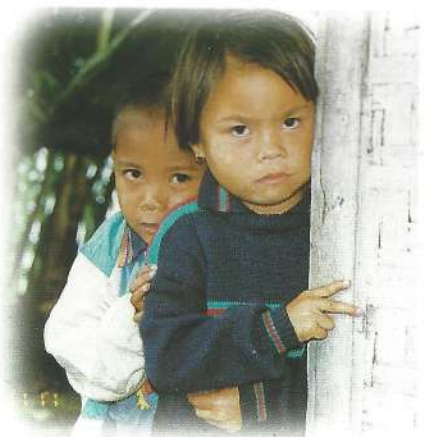
Tulisan lainnya? Kendati tanpa komentar Redaksi, yang pasti, tentu tak ingin anda lewati.

Selamat membaca kepada seluruh "Keluarga *ekstensia*" di manapun anda berada.

Redaksi

GAPURA 1

Seberkas Sinar 4

**REVITALISASI " MENYIBAK KEMELUT
PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN KEARIFAN** 5**Revitalisasi Penyuluhan Pertanian :
SEBUAH TANGGAPAN** 23*Loekman Soetrisno***CAKRAWALA** 25**KEBUTUHAN REVITALISASI
dalam Penyuluhan Pertanian** 25*H. Rochajat Harun***Pendidikan Pertanian untuk Petani** 33*Salmon Padmanagara***Magang - Tani****Mendorong Saling Belajar Antar Petani** 39*A. Soedradjat Martaamidjaja***Profesi Penyuluhan Pertanian
dalam Kebangkitan Agribisnis** 45*Dudung Abdul Adjid***JENDELA** 53

DAFTAR ISI

57 CENGERAMA

57 Menyelami Wawasan Tanpa Batas

59 Sepuluh Tahun

**MENGUBAH WAWASAN DARI LAHAN BASAH
MENUJU LAHAN KERING**

Farhan Bulkiyah

67 Menjawab Dinamika Tuntutan Permintaan Pasar

H. Mastur Fu'ad

73 WAWASAN TANPA BATAS ITU ADALAH KOPERASI

H. Kalam Tirtorahardjo



79 CERMIN

79 Haji Otong Sutarya

PENGGAGAS TARBU BERCITA-CITA LUGU

82 I Made Narabuana

MEMBINA 48 KELOMPOK

DENGAN KREDIT 78 JUTA TANPA TUNGGAKAN



85 SSST.....

85 SUTPA :

Padi Berwawasan Agribisnis

89 CELOTEH

89 Strategi Penyuluhan Peternakan di Perkotaan

90 Suatu Senja Di Sebuah BPP Pada Awal Abad XXI

91 Bercengkerama dengan ekstensia

92 Balada Penyuluh Tua

93 WACANA

97 A...EKSTENSI

97 Revitalisasi Semangat, Semangat Revitalisasi

Seberkas Sinar

Pertanyaan pertama yang muncul kala mendengar istilah *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* adalah apakah masih dirasa perlu dan relevan untuk mengkaji dan menyimak kembali berbagai masalah yang menyangkut penyuluhan pertanian sehingga muncul suatu resep baru yang disebut *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* itu?.

Istilah *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* itu sendiri pada sebagian orang mungkin merupakan sesuatu yang baru dan entah berapa macam penafsiran yang muncul dengan istilah itu, atau berapakah diantara kita yang mampu menangkap bobot suatu konsepsi yang bernama *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*?. Disengaja atau tidak lambat laun kita sering terbelenggu oleh suatu idiom yang enak didengar namun teramat abstrak untuk bisa diwujudkan dalam keseharian.

Bobot apa yang terlepas selama ini bila kita berbincang atau berdebat tentang penyuluhan pertanian?. Bobot yang sering terlepas justru adalah mengenai pertanyaan yang mendasar yaitu untuk apa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan ditengah riuhnya pembangunan pertanian yang sedang dijalani?. Bila ditilik dari definisinya maka Penyuluhan Pertanian sudah seharusnya menjadi suatu pranata sosial yang melekat dengan dinamika masyarakat petani karena dalam Penyuluhan Pertanian terangkum proses demokratisasi dalam pendidikan masyarakat khususnya masyarakat petani.

Demokratisasi dalam pembinaan petanipun sebenarnya telah dilakukan dengan menyerahkan urusan penyuluhan pertanian menjadi mandat daerah. Suatu langkah berani yang menunjukkan niat untuk mendewasakan daerah dalam era desentralisasi.

Sekarang setelah sekian waktu Penyuluhan Pertanian berlangsung, muncul pengertian baru mengenai *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*, sudah sedemikian lemahkah daya hidup Penyuluhan Pertanian sehingga perlu untuk di "revitalisasikan"?, lantas siapa yang harus terlibat langsung dalam menangani pelaksanaannya?, lingkungan serta faktor pendukung apa yang harus hadir agar terjamin pelaksanaannya dengan baik?.

Kembali lagi, entah itu *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* atau entah nama lainnya yang lebih merdu yang terpenting adalah bagaimana menempatkan pemahaman tersebut sebagai tujuan instrumental di dalam tujuan hakiki Penyuluhan Pertanian, sehingga kerancuan serta kekisruhan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dapat terjawab dengan hadirnya *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* ini.

Langkah yang telah ditempuh patut untuk diberi angkat topi tetapi kita perlu waspada untuk menghindari dari segala sesuatu yang cenderung mengaburkan makna sehingga luput untuk menangkap esensi permasalahan. Permasalahan kita bukanlah hanya sekedar miringnya tiang penyangga gedung Balai Penyuluhan Pertanian, pekatnya asap kenalpot kendaraan Penyuluh juga tidaklah hanya terpaku apakah penyuluh masih menggunakan pendekatan LAKU atau tidak.

Permasalahan kita yang utama adalah bagaimana mengembalikan penyuluhan pertanian pada tujuan hakikinya dan kehadiran *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* bukanlah hanya sekedar seberkas sinar yang datang kemudian dengan perlahan memudar.

Semoga.

ranny mutiara

" REVITALISASI "

MENYIBAK KEMELUT PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN KEARIFAN

Konsep *REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN* telah rampung dirumuskan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian bersama Tim Konsultan Bank Dunia. Sebuah konsep yang akan menentukan masa depan penyuluhan pertanian di tanah air kita dan sekaligus akan menentukan pula nasib dan masa depan tiga puluh ribuan lebih penyuluh pertanian yang berkiprah di dalamnya dan terutama konsep ini pada hakekatnya akan memberikan arah pengembangan sosok petani nelayan Indonesia di masa datang. Benarkah ?

Betapa tidak, penyuluhan pertanian adalah ujung tombak pembangunan pertanian kita, dan penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan bagi petani-nelayan dan keluarganya yang bertujuan untuk membangun pelaku pembangunan pertanian kita yang tangguh dan handal,

Sementara itu, di dalamnya sekitar tiga puluh ribuan lebih penyuluh pertanian berkiprah untuk mengembangkan karier dan profesionalismenya sebagai agen-agen pembangunan yang berdiri paling depan.

Konsep *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* ini telah beberapa kali digelar dalam berbagai lokakarya dan seminar, baik di tingkat daerah, regional maupun di tingkat nasional.

Berbagai tanggapan dan masukan mengalir bagai kincir, berputar mulai dari aspek falsafah, pengertian, tujuan, strategi, sampai kepada aspek teknis operasional yang menyangkut kelembagaan, ketenagaan dan ketatalaksanaannya.

1. DESENTRALISASI PENYULUHAN PERTANIAN dan KOMITMEN DEPARTEMEN PERTANIAN.

Lahirnya konsep *REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN* memang berkaitan langsung dengan masalah Kebijakan Desentralisasi Penyuluhan Pertanian atau Penyerahan Urusan Penyuluhan Pertanian dari Pemerintah Pusat cq. Departemen Pertanian kepada Pemerintah Daerah Tk.II.

Desentralisasi memang sudah menjadi Komitmen Nasional dan hal ini telah dituangkan menjadi Kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang bertanggungjawab. Dalam hal ini, tidak dapat disangkal lagi bahwa Departemen Pertanian merupakan salah satu Departemen di luar Departemen Dalam Negeri yang paling dulu dan yang paling cepat merespons pelaksanaan Kebijakan ini.

Salah satu urusan pertanian yang

telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk.II., ialah urusan penyuluhan pertanian yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor. 539/Kpts/LP.120/7/1991 dan Nomor 65 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah.

Kepada *ekstensia*, **Soetatwo Hadiwigeno**, Sekretaris Jendral Departemen Pertanian menjelaskan, bahwa urusan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk.II itu meliputi pelaksanaan kegiatan, tenaga penyuluhnya, biayanya dan berbagai institusi penyuluhan pertaniannya. Sejak itu, Kelembagaan Penyuluhan berupa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sebahagian besar tenaga Penyuluh Pertaniannya secara bertahap diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk.II.

Konon kata sebagian pengamat dan pelaku penyuluhan pertanian, pemberlakuan SKB inilah yang jadi penyebab terjadinya stagnasi atau kemunduran penyelenggaraan penyuluhan pertanian, malah ada sebahagian orang yang secara ekstrim telah mengkatagorikannya sebagai **kehancuran** penyuluhan pertanian. Dinamika penyuluhan pertanian menurun drastis, *loyo*, *lesu darah*, *kehilangan gairah*, dan masih berbagai kata ungkapan negatif lainnya ditujukan kepada dunia penyuluhan pertanian. Para penyuluh mengeluh, panik kehilangan kemapanan yang sebelumnya pernah dimiliki dengan penuh kebanggaan atas prestasi dan keberhasilan mencapai swa sembada beras yang gilang gemilang itu. Sekarang pudar seolah menghilang, mereka merasa tercampak karena dipecah dan dikotak-kotak, berubahnya fungsi BPP tempat mereka mangkal dan berubahnya sistem kerja para penyuluh dirasa telah merenggut status dan pijakan sosial para penyuluh di tengah masyarakat yang selama ini diayominya,



Soetatwo Hadiwigeno

mereka merasa kehilangan eksistensi dirinya. Lumpuh dan hampir kehilangan gairah dan motivasinya untuk berkiprah. BPP-pun menjadi *sepi ing gawe* dan lebih banyak terkunci kehilangan aktifitas dan kegiatannya. Kiprah meriah dinamika kelompok-kelompok tani-nelayanpun seolah melemah, interaksi intra maupun antar kelompoktani kehilangan intensitas yang berakibat terjadinya penurunan produktivitas, hingga mengancam persediaan stok beras dan memaksa Pemerintah harus mengimpor beras, justru di saat kita seharusnya lepas landas. Untunglah musim kemarau panjang saat itu datang melintas, hingga segalanya tampak menjadi bias.

Apa komentar **Loekman Soetrisno** misalnya, Guru Besar UGM yang juga menjabat sebagai Kepala Puslitbang Pedesaan dan Kawasan (P3PK)-UGM : “.....reaksi saya pada saat pertama kali membaca SKB. Mentan - Mendagri tentang penyerahan urusan penyuluhan pertanian kepada Pemerintah Daerah

Tk.II, ialah bahwa BPP yang telah dengan susah payah dikembangkan dengan investasi pikiran dan biaya yang tidak sedikit itu, pasti akan hancur dan penyuluhan pertanianpun akan hancur. Kenyataannya memang nasib BPP dan penyuluhan pertanian itu persis seperti yang saya prediksi. Saran saya kepada Departemen Pertanian ; Tarik kembali BPP dan penyuluhan pertanian untuk tetap menjadi urusan yang ditangani oleh Pemerintah Pusat atau Departemen Pertanian, minimal untuk kurun waktu sekarang ini, tidak semua Pemda Tk.II mempunyai kemampuan yang sama untuk mengelola pembangunan pertanian." tambahnya kemudian.. Bukan cuma itu, dalam rapat rapat dengan Para Anggota Komisi C DPR-pun, kasus kelesuan kegiatan penyuluhan pertanian ini tidak luput dari perhatian dan perbincangan para Wakil Rakyat.

Di tengah adanya perbedaan pendapat dan penilaian umum terhadap Kebijakan Penyerahan Pengurusan Penyuluhan Pertanian kepada Pemerintah Tk.II ini, Soetatwo Hadiwigeno, Sekretaris Jendral Departemen Pertanian menjelaskan bahwa Menteri Pertanian telah menyatakan :*"..... sudah menjadi komitmen Departemen Pertanian untuk mendukung sepenuhnya Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Masalahnya, ialah bagaimana membantu atau mendorong kemampuan Pemerintah Daerah Tk.II. untuk lebih mampu memberikan perhatian dan membangun kemampuan manajemennya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang telah diserahkan itu....."*

Disadari sepenuhnya bahwa tidak semua Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama di dalam merealisasikan pelaksanaan desentralisasi urusan

penyuluhan pertanian ini. Pada aspek penganggaran biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian misalnya, dari pemantauan *ekstensia*, sejak urusan penyuluhan pertanian diserahkan, masih banyak Pemda Tk.II yang belum mampu menyediakan anggaran bagi kegiatan penyuluhan pertanian melalui APBD-II.-nya, karena terbatasnya sumber pendapatan daerahnya.

Oleh karenanya, untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Daerah masih diberikan SBBO-PP (Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian) dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Departemen Dalam Negeri. (Perincian dana anggaran bantuan operasional penyuluh, lihat : Box.).

Namun demikian, perbedaan kondisi di setiap Pemerintah Daerah Tk.II. pun menyebabkan adanya perbedaan pula dalam pengelolaan dana tersebut. Ada yang lancar dan utuh sampai ke tangan para penyuluh di lapangan, ada yang lancar tapi tidak utuh, ada yang kurang lancar tapi utuh, namun tidak sedikit yang kurang lancar dan tidak utuh pula.

Ketidak-lancaran dan ketidak-utuhan penyaluran dana anggaran penyuluhan pertanian inilah yang sering dikeluhkan oleh para penyuluh di tingkat lapangan, dan sekaligus sering dijadikan *kambing hitam*, penyebab menurunnya intensitas kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan.

Dari gambaran di atas, tampak jelas bahwa masalah menghidupkan kembali dinamika penyuluhan pertanian di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi penyuluhan pertanian ini tidak hanya terbatas pada ada atau tidak adanya dana (anggaran) semata-mata, tetapi sekaligus menyangkut pengaturan mekanisme dan manajemennya. Dengan kata lain, termasuk piranti lunak-nya bukan cuma masalah pengadaan piranti keras-nya semata-mata.

Bukan cuma itu, *Loekman Soetrisno* yang Kepala Puslitbang Pedesaan dan Kawasan UGM itu, menandaskan : "... perbedaan kondisi dan kemampuan Pemda Tk.II, menyebabkan masih ada Bupati yang menyatakan niat untuk membuka peluang bagi para investor di luar sektor pertanian meski dengan taruhan harus mengubah sawah lahan pertanian, asal dapat mengejar dan meningkatkan pendapatan Daerah-nya. Pembangunan industri ditempatkan pada prioritas utama, sementara pertanian dianggap sesuatu yang *under-developed*. Sejalan dengan sikap itu maka urusan pertanian akan ditempatkan pada urutan prioritas kesepuluh. Oleh karenanya, akan sulit untuk mengharapkan Pemda Tk.II. dapat mempertahankan dan melestarikan dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian yang sudah dicapai sebelumnya ",lanjutnya dengan bersemangat..

Tetapi di lain pihak optimisme terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam era desentralisasi ini juga terlontar dari pernyataan Ir. Soebekti, Asisten Daerah II Pemda DIY yang juga pernah menjabat sebagai bupati DT II Gunung Kidul ,yang menyatakan justru dengan otonomisasi daerah tingkat II, merupakan momentum yang dapat digunakan untuk menggerakkan penyuluhan pertanian, mengingat pertanian masih merupakan salah satu dari 10 sukses yang harus dicapai oleh daerah.

Apabila kita menengok sejenak ke masa lalu, keberhasilan penyuluhan pertanian di masa lampau dapat tercapai karena adanya semacam *doktrin penyuluhan pertanian* yaitu adanya **kesatuan pengertian** , **kesatuan kelembagaan** dan **kesatuan korps penyuluhan pertanian** yang mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi terwujudnya kesatuan gerak dan kesatuan tindak dalam penyuluhan pertanian.



Loekman Soetrisno

Di masa lampau penyelenggaraan penyuluhan pertanian relatif dikelola dalam satu kesatuan manajemen, yakni ditangani oleh Badan Pengendali BIMAS, mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat lapangan, dan rupanya impian atau nostalgia terhadap keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini masih melekat pada sebagian besar penyelenggara penyuluhan pertanian di daerah, padahal kondisi dan situasinya telah berbeda.

Penyerahan urusan penyuluhan pertanian kepada Pemerintah Daerah Tk.II.menuntut konsekuensi berupa **dipecahnya manajemen penyelenggaraan penyuluhan pertanian**. Pengorganisasian pengaturan urusan pertanian di Daerah dibagi dalam 4 (empat) Dinas Sub Sektoral, yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan.

Konsekuensi logis dari diserahkannya urusan penyuluhan pertanian kepada Pemerintah Daerah Tk.II., ialah harus membagi kelembagaan penyuluhan (BPP) yang ada itu kepada ke empat Dinas tersebut seperti yang terjadi sekarang ini. Adanya perbedaan

kemampuan dan perbedaan pemilikan sumberdaya pada masing-masing Dinas yang bersifat otonom ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung telah menyebabkan terjadinya bias yang melemahkan **kesatuan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah.**

Hal yang sama terjadi pula dalam aspek ketenagaannya, penyuluh pertaniannya pun terpaksa harus dipecah menjadi empat kelompok penyuluh berdasarkan sub-sektor, dimana administrasi kepegawaiannya dikelola secara terpisah oleh masing-masing Dinas Sub Sektor.

Pemilahan administrasi kepegawaian penyuluh pertanian, dan adanya perbedaan perlakuan pada masing-masing Dinas yang sangat menghambat proses kenaikan pangkat dan karier penyuluh pertanian seperti dikeluhkan oleh *Widodo, PPS Tanaman Pangan DIY*, ternyata hal-hal seperti ini telah membuat terbias dan luntarnya pula

intensitas **kesatuan korps penyuluh pertanian.**

Di sisi lain, pada kesempatan yang berbeda, *Djendjen, PPS SPHB Provinsi Jawa Barat* pada acara Pertemuan Pembahasan Pedoman Pembinaan Kelompok tani-Nelayan dan Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian di BLPP Ketindan Jawa Timur mengatakan : *".....adanya perbedaan dalam hal mengklarifikasikan sasaran penyuluhan, misi, tujuan dan metode untuk mencapai tujuannya, kondisi dan permasalahan yang dihadapi, penetapan prioritas dan perbedaan kemampuan dari masing-masing Dinas-pun telah menyebabkan adanya perbedaan dalam penata-laksanaan kegiatan penyuluhannya. Kondisi inipun telah menyebabkan pula terbiasnya aspek kesatuan pengertian penyuluhan pertanian....."*. Aspek kesatuan pengertian penyuluhan pertanian inilah yang selama ini justru dianggap paling sulit

**DAFTAR KOMPONEN DAN BESARNYA SATUAN BIAYA SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN (SBBO-PP)
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

NO.	URAIAN KOMPONEN	WIL *)	INDEKS RUPIAH	JUMLAH GDG/PPL PER WILAYAH	DANA RUPIAH
1.	PEMBINAAN SBBO-PP	-	-	-	174.000.000
2.	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PENYULUHAN (EKS. GEDUNG BPP)	I II III IV	1.000.000 1.080.000 1.200.000 1.400.000	458 Gdg 650 Gdg 150 Gdg 156 Gdg 1.414 Gdg	458.000.000 702.000.000 180.000.000 218.400.000 1.558.400.000
3.	BIAYA PERLENGKAPAN PENYULUH	I II III IV	300.000 320.000 340.000 360.000	9.540 PPL 11.403 PPL 2.729 PPL 2.157 PPL 25.829 PPL	2.862.000.000 3.648.960.000 927.860.000 776.520.000 8.215.340.000
4.	BIAYA PERJALANAN PENYULUH	I II III IV	450.000 490.000 570.000 690.000	9.540 PPL 11.403 PPL 2.729 PPL 2.157 PPL 25.829 PPL	4.293.000.000 5.587.470.000 1.555.530.000 1.488.330.000 12.924.330.000
	JUMLAH SELURUHNYA				22.872.070.000

*) I Jawa dan Bali
III Kalimantan

II Sumatera, Sulawesi dan NTB
IV Maluku, Irian Jaya, dan NTT

dan yang telah dengan susah payah dibangun menjadi salah satu dasar *dalam doktrin penyuluhan pertanian.*

Kondisi struktur organisasi pengaturan urusan pertanian di Daerah, perbedaan kondisi Dinas Dinas sub sektor, ternyata telah menyebabkan **terbias dan luntarnya** "doktrin penyuluhan pertanian" yang pada waktu yang lampau terbukti telah cukup efektif dalam membangun tumbuhnya kesatuan gerak penyuluhan pertanian di tanah air tercinta ini.

Suatu sentilan yang dilontarkan oleh *Salmon Padmanagara* terhadap kondisi ini adalah dengan mengumpamakan kondisi yang terjadi ini adalah akibat dari ketidak konsistenan dalam menerapkan pengertian "Bhineka Tunggal Ika", menurutnya sekarang ini penyuluhan pertanian lebih mengutamakan "Bhineka-nya" tetapi lupa terhadap "Ika" yang merupakan tujuan hakiki penyuluhan pertanian itu sendiri.

Semua ini sudah barang tentu tidak berarti akan melunturkan pula **semangat dan komitmen Departemen Pertanian** dalam mendukung terwujudnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang Bertanggung-jawab yang telah menjadi komitmen Pemerintah kita. Hal ini ditegaskan oleh *Soetatwo Hadiwigeno, Sekretaris Jendral Departemen Pertanian* kepada ekstensia. ".....kita tidak akan menarik kembali urusan penyuluhan pertanian yang telah diserahkan ke Daerah itu, tetapi kita akan merangkulnya agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah dapat tetap berjalan baik dan lancar serta penuh gairah.....".

Sebuah pernyataan yang penuh kearifan, namun sekaligus memberikan tantangan bagi Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai satu-satunya Institusi yang bertanggungjawab dalam urusan penyuluhan pertanian dalam lingkup Departemen Pertanian untuk mampu menjabarkan kearifan itu.

2. PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN dan SEJUTA HARAPAN

Sejak mulai berdirinya Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.96/Kpts/OT.210/2/1994. tanggal 11 Februari 1994, Lembaga yang baru lahir ini sudah langsung mendapat tugas berat dengan setumpuk masalah transisi dari proses perubahan Kebijakan Desentralisasi Penyuluhan Pertanian atau Penyerahan Urusan Penyuluhan Pertanian Kepada Pemerintah Daerah Tk.II.

Setelah tiga tahun para pelaku penyuluhan pertanian mengalami kemelut masa transisi dengan segudang permasalahannya, maka wajarlah bila kepada kelahiran Pusat Penyuluhan Pertanian di Tingkat Pusat ini bergantung pula sejuta harap dari tingkat lapangan. Sungguh sebuah tantangan dan sekaligus merupakan batu ujian yang sangat berat bagi sebuah Lembaga yang baru lahir.

Mengamati sepak-terjang dan langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian sejak kelahirannya hingga sekarang, memberikan kesan bahwa upaya membenahi kembali masalah penyuluhan pertanian ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Rambu-rambu etika, peraturan dan mekanisme penerapan azas Desentralisasi di satu pihak, memang memberikan ruang gerak yang tidak selalu dan seleluasa seperti sebelumnya. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh *Soetatwo Hadiwigeno*, bahwa urusan penyuluhan pertanian yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk.II.meliputi hampir seluruh aspek penyelenggaraan dan pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian mulai dari kegiatan, ketenagaan, pembiayaan sampai kepada kelembagaannya.

Di lain pihak, lingkup dan intensitas masalah yang merebak itu, justru mengembang ke dalam seluruh aspek manajemen baik aspek kelembagaan, ketenagaan dan penata-laksanaannya, termasuk pembiayaannya. Selanjutnya *Soetatwo Hadiwigeno* menjelaskan pula bahwa tugas Departemen Pertanian dalam pelaksanaan Desentralisasi sekarang ini ialah melakukan pemantauan dan pembinaan teknis kepada Daerah. Rincian jenis pembinaan teknis inilah yang masih kiranya masih perlu diklarifikasikan dengan jelas.

Sementara itu, secara umum tertangkap adanya kesan bahwa sekarang ini dari tingkat lapangan atau dari Daerah justru sangat *mengharapkan* atau dalam intensitas lain dapat dikategorikan *menuntut* adanya intervensi atau campur-tangan Pemerintah Pusat untuk melakukan *PERUBAHAN* atau *PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA. MENDAGRI - MENTAN Nomor 65 Tahun 1991 dan Nomor 539/Kpts/LP.120/7/91 tanggal 22 Juli 1991 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah* yang seolah-olah dianggap sebagai cikal bakal terjadinya kemelut dalam penyuluhan pertanian sekarang ini.

Menanggapi hal ini, tampaknya Pusat Penyuluhan Pertanian tidak ingin terjebak secara emosional. *Rochajat Harun, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian* menjelaskan kepada *ekstensia* :..... *disadari sepenuhnya bahwa hal ini memang menjadi kebutuhan kita bersama, namun dengan mengingat kompleksitas permasalahannya, penerbitan penyempurnaan SKB Mendagri - Mentan ini memerlukan proses pengolahan yang seksama dan ketelitian dari semua pihak yang terkait, sehingga menampakkan kesan lambat dan tersendat-sendat. Padahal sejak awal kelahiran Pusat Penyuluhan Pertanian,*

SKB inilah yang menjadi prioritas garapan kita”.

Ditengah kepanikan gerak langkah penyuluhan yang makin merebak, desah resah serta keluh para penyuluh di tingkat lapangan, di tahun pertama kelahirannya, sesuai dengan tugas fungsi yang diembannya, Pusat Penyuluhan Pertanian telah melakukan serangkaian pengkajian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam penyuluhan pertanian.

Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama Mentan-Mendagri nomor 539/ Kpts/LP.120/7/91 dan Nomor 65 Tahun 1991 yang tanpa dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas inilah yang kiranya menimbulkan berbagai interpretasi dan persepsi yang berbeda-beda yang pada penghujungnya bermuara menjadi kekisruhan dan kerancuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti yang terjadi sekarang ini .

Penyimpulan terhadap gambaran kondisi ini bukan diperoleh hanya dari pengamatan sepintas atau pengamatan sepihak di lapangan saja, tetapi beberapa hasil pengkajian yang dilakukanpun telah menunjukkan hasil dan kesimpulan yang sama, yakni : bahwa kondisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian sekarang ini memang kurang menggembirakan. Pengkajian yang dilakukan oleh Jibatani Karsa(1994) menyimpulkan antara lain;

1. Sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) masih diterapkan namun mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan dana yang tersedia.
2. Kinerja rata-rata penyuluh pertanian sangat rendah yaitu 66% untuk disiplin mematuhi jam kerja (rata-rata 36,4 jam per minggu) dan 30 % untuk kunjungan ke kelompok (rata-rata 2,4 kelompok per minggu).

3. Terjadi kerancuan operasional penyuluhan pertanian di lapangan yang mengakibatkan terjadinya hubungan kerja yang kurang serasi antar penyuluh pertanian akibat telah terbaginya penyuluh pada dinas-dinas sub sektor.

Kesimpulan yang serupa juga muncul dari hasil pengkajian Cakra Hasta(1994) yang juga pada intinya menyimpulkan menurunnya kualitas pengelolaan, penyelenggaraan, serta monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dewasa ini telah mengalami degradasi dan seolah lumpuh, tidak efektif dan tidak fleksibel

Dalam upaya mengantisipasi dampak negatif dari berbagai kondisi yang terjadi ,Pusat Penyuluhan Pertanian telah melahirkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor OT.210/396/Mentan/XII/94.,tanggal 5 Desember 1994 kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I. di seluruh Indonesia tentang Petunjuk Pendayagunaan Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian dan Kelompok tani-nelayan.

A. Rifai Husein, Kepala Kantor Wilayah Deptan Provinsi Jawa Barat berkomentar kepada ekstensia :..... Sesuai dengan azas Desentralisasi maka kelahiran Surat Edaran Mentan ini sebenarnya sudah cukup jelas untuk dijadikan dasar dan landasan bertindak bagi Daerah untuk menggerakkan kembali penyuluhan pertaniannya, tetapi masih banyak Pemerintah Daerah Tk.II., dalam hal ini Dinas-Dinas Lingkup Pertanian yang bersikap menunggu petunjuk lebih lanjut. Mungkin "budaya menunggu petunjuk dari atas" ini masih kuat melekat dan sangat lengket pada aparaturnya kita ini, meskipun sekarang ini kita sudah memasuki era desentralisasi.....".

Menanggapi hal ini Salmon Padmanagara, pakar penyuluhan , memberikan komentarnya :.....masih

banyak aparat petugas yang belum memahami pengertian dan arti desentralisasi itu sendiri. Desentralisasi ialah proses perubahan dari yang terlalu bersifat hierarkhis kepada sifat partisipatif, atau hierarkhi versus partisipasi. Jadi merupakan proses melepaskan diri dari kungkungan hierarkhi, karenanya tidak perlu harus selalu menunggu petunjuk dari atas. Diperlukan sikap pro-aktif, asas desentralisasi memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan, tidak perlu selalu menunggu. Berfikir dan berbuat, lalu jalankan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku", tambahnya kemudian.

Di tahun kedua, Pusat Penyuluhan Pertanian menindaklanjuti hasil-hasil pengkajiannya dengan melakukan studi bersama Tim Konsultan dari Bank Dunia untuk memperoleh bahan dan masukan bagi Kebijakan Penyuluhan Pertanian selanjutnya, terutama dalam upaya untuk memantapkan pelaksanaan Desentralisasi Penyuluhan Pertanian kita yang agak tersendat-sendat ini.

Hasil yang diperoleh dari Studi Konsultan Bank Dunia mengenai kondisi penyuluhan pertanian mempunyai nada yang serupa dengan dua pengkajian terdahulu diantaranya:

1. Perencanaan penyuluhan di daerah didasarkan atas kegiatan penyuluh pertanian, bukan atas dasar kebutuhan usaha petani-nelayan.
2. Sistem LAKU pada umumnya tidak tepat lagi untuk wilayah tanaman pangan yang luas dan untuk wilayah perikanan.
3. BPP pada umumnya tidak memiliki rencana operasional, tidak mempunyai personil dan dalam keadaan rusak.
4. PPL pada umumnya mengalami penurunan semangat kerja sehubungan dengan lambannya proses



Salmon Padmanagara

penetapan angka kredit, ketinggalan informasi dibanding dengan petani-nya serta banyaknya tugas-tugas administratif .

Hal inilah yang memicu Studi Konsultan Bank Dunia bersama Pusat Penyuluhan Pertanian ini menghasilkan Konsep Rumusan **REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN** .

3. REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN atau REVITALISASI BPP

Di tengah mencuatnya istilah *REVITALISASI* dalam Kebijakanaan Penyuluhan Pertanian, ternyata telah berkembang berbagai persepsi dan interpretasi di kalangan pemerhati dan pelaku penyuluhan pertanian. Sebahagian mengartikan *revitalisasi* itu dimaksudkan untuk merevitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian(BPP), institusi ujung tombak penyuluhan pertanian kita yang sejak *diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk.II* pada tahun 1991, secara umum dinilai mengalami stagnasi atau kemunduran dalam kegiatan penyuluhan pertaniannya. Dengan alasan itulah maka *revitalisasi* dalam kebijakanaan penyuluhan itu diartikan sebagai upaya untuk *menghidupkan kembali* kelembagaan

BPP agar mampu berfungsi kembali sebagai ujung tombak penyuluhan pertanian . Namun sebahagian dari mereka mengartikannya dengan persepsi yang berbeda. Menurutnya, *revitalisasi* dalam kebijakanaan penyuluhan pertanian ini harus mencakup dan meliputi seluruh aspek penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara umum, mulai dari kelembagaan, ketenagaan maupun aspek ketatalaksanaannya. Pokoknya seluruh unsur *man, money, material, machine, method* dan *environment* di seluruh fungsi *perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian* di setiap aspek penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian itulah yang harus di-*revitalisasi*-kan.

Adanya dua visi yang berbeda dalam mengartikan *revitalisasi* pada Kebijakanaan Penyuluhan Pertanian ini sudah barang tentu akan memberikan arah, warna dan pendekatan yang berbeda pula di dalam menjabarkan Kebijakanaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan klarifikasi yang jelas dan tegas terhadap pengertian *revitalisasi* yang dimaksud dalam Kebijakanaan Penyuluhan Pertanian tersebut, agar diperoleh kesamaan pandang dan kesamaan persepsi di dalam menjabarkan isi Kebijakanaan tersebut.

Stagnasi atau *Kemunduran* atau *Kelesuan* atau *Kehancuran* Penyuluhan Pertanian, apapun namanya namun pada umumnya semua sepakat bahwa penyuluhan pertanian dewasa ini tengah mempunyai masalah besar yang harus segera diatasi. Sarana penyuluhan seperti Gedung BPP, peralatan penyuluhan di BPP, alat transportasi / mobilitas penyuluh di BPP, hampir seluruhnya berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Itu baru dari segi fisik serta fasilitas yang ada pada BPP, yang lebih memprihatinkan lagi adalah peran BPP

itu sendiri ditengah-tengah keberadaan petani-nelayan yang ada di sekitarnya. Bagi petani sendiri pengaruh berubahnya pengelolaan BPP yang berbeda dengan sebelumnya itu ternyata tidak merupakan sesuatu yang menimbulkan keresahan bagi mereka. Berfungsi atau tidak berfungsinya BPP di wilayahnya, ternyata kegiatan usahatani para petani tetap berjalan seperti biasa. Lantas dimanakah letak peranan BPP dalam kehidupan para petani ?

H. Djuhiya, KTNA Provinsi Jawa Barat, yang juga banyak berkiprah pada forum-forum daerah dan nasional menyatakan bahwa :.... BPP masih dirasa penting kehadirannya sebagai institusi penyuluhan di pedesaan, dahulu BPP cukup akrab dengan petani sebagai tempat untuk memperoleh berbagai informasi teknologi baru, namun setelah diserahkan ke daerah peran BPP menjadi lemah atau menurun aktifitasnya. Sekarang frekuensi pertemuan petani di BPP menurun, dan bila petani akan berkonsultasi ke BPP, petani harus melihat dulu apakah masalah yang dihadapinya itu adalah bagian dari sub sektor yang mengelola BPP itu atau bukan, dan belum tentu ada jaminan bahwa BPP yang bersangkutan mempunyai fasilitas dan sarana atau informasi yang dibutuhkan petani, malah dengan penyuluhnyapun belum tentu bisa bertemu." Selanjutnya Djuhiya-pun mengungkapkan pula :.....Dengan adanya sebutan BPP Peternakan, BPP Tanaman Pangan dan sebagainya bagi petani seakan membuat jarak, jadi otomatis sulit untuk bisa menggerakkan petaninya karena sudah ada benderanya masing-masing, padahal dalam kenyataannya petani kita ini tidak berusaha dalam satu jenis usahatani, tapi polivalen."

Lantas apa pengaruh menurunnya aktivitas BPP ini terhadap petani ?



H. Djuhiya

Mengenai hal ini Djuhiya menambahkan :menurunnya aktivitas dan pertemuan di BPP menyebabkan terhambatnya proses penerimaan informasi teknologi baru bagi petani, baik informasi yang datang dari penyuluh atau pertukaran informasi dari para petani itu sendiri. Jadi hilangnya kegiatan pertemuan di BPP menyebabkan hilangnya atau terputusnya arus informasi bagi petani dan antar petani, dan juga menghilangkan keakraban dan kerja sama antar petani....."

Dari aspek ketenagaan, para penyuluh pertanian mengalami keterguncangan yang hebat, baik menyangkut administrasi kepegawaian, sistem kerja, angka kredit, penyaluran sarana dan uang kerja, pengembangan karier dan profesionalismenya, sampai kepada kedudukan dan status sosialnya. Kesan kurangnya perhatian bagi para penyuluh setelah urusannya diserahkan ke daerah tingkat II meluncur dari mulut *Atip Hidayatullah*, penyuluh pertanian di

Kecamatan Pangkalan Balai, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, “*Kelihatannya sekarang penyuluh seperti di anak-tiri-kan, mau latihan susah dan jarang, mau mengadakan percobaan atau demonstrasi biaya UKB-nya tidak mencukupi, untuk bisa sampai ke kelompok tani saja sudah Alhamdulillah*”.

Ketata-laksanaan penyuluhan pertanianpun mengalami perubahan yang cukup drastis, pengelolaan penyuluhan pertanian yang selama ini berjalan secara terpadu dan terkoordinasi dalam kesatuan gerak dan langkah, sekarang terpecah / tersegmentasi berdasarkan sub-sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian (FKPP) di setiap tingkatan wilayah sudah tidak ada kabar beritanya lagi, Program Penyuluhan Pertanian di tingkat BPP yang sampai sekarang masih disebut Ujung Tombak Kelembagaan Penyuluhanpun sudah tidak dibuat lagi dan masih banyak rangkaian perubahan lainnya.

Namun demikian, di tengah perubahan iklim penyuluhan pertanian yang dialami di tingkat lapangan, sementara ini hampir seluruh Program dan Proyek Pembangunan Pertanian ternyata masih tetap mengacu dan menempatkan Penyuluh dan Penyuluhan Pertanian sebagai ujung tombak dalam pelaksanaannya. Selain itu, perubahan orientasi Pembangunan Pertanian pada era PJP-II yang berorientasi Agribisnis dan Agroindustri serta terbitnya UU No.12/92 tentang Budidaya Tanaman juga telah mencuatkan sebondok tantangan yang memerlukan tindakan antisipasi yang tepat dan akurat serta segera.

Menyimak fenomena dan tantangan inilah maka sebahagian orang berpendapat bahwa *revitalisasi* dalam Kebijakan Penyuluhan Pertanian ini harus bersifat mendasar, menyeluruh dan mencakup seluruh aspek penye-

lenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Karenanya *revitalisasi* dalam Kebijakan Penyuluhan itu harus diartikan sebagai *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*.

Ada lima pertanyaan yang harus dijawab melalui Kebijakan Revitalisasi ini, yaitu:

1. Bagaimana menggerakkan kerjasama petani-penyuluh dan peneliti dalam merancang usahatani-nelayan yang responsif terhadap kemampuan wilayah dan permintaan pasar ?
2. Bagaimana mengefektifkan kembali BPP sebagai pusat kegiatan para petani - penyuluh dan peneliti untuk mengembangkan usahatani -nelayan berdasarkan prinsip-prinsip agribisnis ?
3. Bagaimana membangun dan mengoperasionalkan jaringan kelembagaan komunikasi, informasi dan penyuluhan yang mampu memberi dorongan bagi berkembangnya profesionalisme petani-nelayan dan penyuluh ?
4. Bagaimana mengorientasikan para petugas terutama para administrator terdepan dan penyuluh pertanian sehingga mereka mampu menjadi mitra kerja, fasilitator, motivator dan konsultan bagi petani-nelayan ?
5. Bagaimana mengatur pendanaan sehingga berbagai kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan daerah otonom dengan biaya yang memadai, berdaya guna dan berhasil guna ?

Dengan menyimak masalah inilah, maka **IGK. Swastika**, Kepala Bidang Tata Operasional Pusat Penyuluhan Pertanian, Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Penyuluhan Pertanian, menyimpulkan bahwa **REVITALISASI** dalam Kebijakan Penyuluhan Pertanian ini seyogyanya diartikan sebagai **REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN**.

Di lain pihak, sebagian orang berpendapat bahwa mengingat *rumit dan njelimet-nya* jalur birokrasi dan kordinasi, maka upaya untuk melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh seperti diuraikan di atas, memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama, padahal di tingkat lapangan sudah sangat memerlukan *intervensi* yang cepat dan segera untuk mengakhiri masa transisi yang masih diliputi ketidakpastian ini. Karenanya, pengertian *revitalisasi* dalam Kebijakan Penyuluhan Pertanian, sebaiknya difokuskan dan diartikan sebagai *REVITALISASI BPP* bukan *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Pada dasarnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah ujung tombak pembangunan pertanian yang dalam kenyataannya sekarang sedang lumpuh, lesu darah, karena lembaga tersebut tidak lagi berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Penyuluhan di tingkat lapangan. Keadaan BPP dengan segala keterbatasannya ini terungkap dalam pembicaraan *ekstensia* dengan Kepala BPP Among Kismo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul DI Yogyakarta *Sri Alfianingsih*, :”.....*Sekarang ini serba sulit di satu sisi tuntutan petani semakin lama semakin banyak tetapi BPP-nya sendiri masih begitu-begitu saja*”.

Di sisi lain kerinduan penyuluh pertanian untuk bisa berkiprah kembali di BPP seakan menjadi suatu obsesi yang segera ingin diwujudkan, keterpisahan kelompok penyuluh dalam induk sub sektor mengakibatkan timbulnya rasa rihuk untuk bisa berinteraksi di BPP yang sekarang sudah menjadi bagian dari dinas sub sektor lainnya. Kondisi inilah yang harus diperbaiki dengan cepat dan segera, karenanya, kebutuhan yang mendesak adalah upaya untuk *me-revitalisasi*-kan BPP. Itulah yang diperlukan sekarang ini, dan sifatnya penting dan mendesak.

Terlepas dari adanya polemik perbedaan pendapat ini, namun semua

pihak berpendapat sama bahwa saat ini memang diperlukan adanya *intervensi Kebijakan Penyuluhan Pertanian* yang dapat menghidupkan kembali dinamika penyuluhan pertanian yang nota bene masih menjadi ujung tombak pembangunan pertanian dan acuan serta rujukan pelaksanaan berbagai program dan proyek. Selain itu bila Penyuluhan Pertanian itu didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan non formal bagi petani-nelayan dan keluarganya serta berperan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, maka *ia* adalah suatu kesisteman yang paripurna dan tuntas(komprehensif dan holistik).

Tujuan yang harus tercapai melalui kebijakan *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* ini haruslah mampu mencerminkan 8 aspek yaitu;

1. Kelompok tani- nelayan menjadi sistem pengguna aktif berbagai kesempatan berusaha dan menjadi kelompok yang mampu mengambil manfaat dari keberadaan BPP.
2. BPP menjadi pusat komunikasi, informasi dan penyuluhan yang handal bagi petani-nelayan maupun bagi masyarakat pedesaan.
3. Adanya jaringan komunikasi dan informasi yang handal dalam melayani kebutuhan pengembangan usaha petani-nelayan.
4. Penyuluh pertanian menjadi:
 - Satu kesatuan korps penyuluh profesional yang mempunyai kesatuan persepsi dan tindakan serta handal menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian
 - Efektif dan efisien dalam bekerja
 - Bekerja sama erat dengan peneliti dan petani-nelayan dalam merencanakan dan melaksanakan upaya pengembangan usahatani-nelayan.
5. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian oleh Pemerintah Daerah Tingkat II menjadi lebih mapan.

6. Penyuluhan pertanian akan banyak mempergunakan pendekatan-pendekatan sistem usahatani (*farming system approach*) dengan penerapan prinsip-prinsip agribisnis dan pembangunan berkelanjutan, pendekatan kemitraan (*participatory approach*) dan pendekatan urun biaya (*cost sharring approach*).
7. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui penerapan kombinasi metode penyuluhan pertanian yang tepat dan bersifat partisipatif sesuai permasalahan setempat, atau spesifik lokalita.
8. Mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian didasarkan atas prinsip keterlibatan semua unsur dalam keutuhan jaringan untuk melayani kebutuhan usaha petani-nelayan.

Pusat Penyuluhan Pertanian bersama-sama dengan Tim Bank Dunia yang telah selesai melakukan studi untuk merumuskan *jenis intervensi kegiatan penyuluhan pertanian* yang diharapkan dapat memecahkan masalah seperti di atas. Hasilnya telah dituangkan dalam proposal proyek : Decentralized Agricultural Extension Management Project (DAEM) .

Proyek DAEM diharapkan akan mampu menjadi acuan intervensi kegiatan yang akan menyibak mendung kemelut penyuluhan pertanian kita dan benar-benar akan dapat *merevitalisasikan* atau memberikan daya hidup kembali pada penyuluhan pertanian yang sedang *hidup segan matipun tak mau* ini.

4. KEBERPIHAKAN PADA PETANI - NELAYAN

Tujuan hakiki penyuluhan pertanian adalah meningkatkan kualitas sumber-daya petani-nelayan agar mampu menjadi warga negara terhormat di

negeri tercinta ini dengan penyelenggaraan berbagai metoda pembelajaran secara non formal. Rumusan Revitalisasi Penyuluhan pertanian yang ditawarkan pada intinya memang memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, namun demikian dari analisa yang disampaikan oleh beberapa pengamat penyuluhan pertanian, rumusan tersebut belum secara berani menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan petani.

Loekman Soetrisno berpendapat bahwa rumusan konsep Penyempurnaan SKB Mentan Mendagri ini masih berorientasi "ke atas" sepertinya penyuluhan pertanian ini hanyalah sebatas "*transfer of technology*" sementara peran petaninya seakan dianggap hanya menunggu uluran tangan saja . "*Sekarang saatnya kita bicara "farmer participation", jadi porsi terbesar dalam setiap kebijaksanaan pertanian adalah membangun kemampuan petani dan ini tidak perlu ditawar-tawar lagi. Sudah bukan saatnya kita mengatas namakan petani hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Lahirnya Undang Undang Budi Daya Tanaman tahun 1992 harus menjadi titik sentral kebijaksanaan penyuluhan pertanian di masa depan secara konsekuen....."*

Hal serupa juga muncul pula dari komentar *Salmon Padmanagara*, bahwa dalam menyusun konsep Revitalisasi Penyuluhan Pertanian ini jangan terjebak pada suatu kondisi "*sibuk mengurus diri sendiri*", yang digarap hanya struktur organisasi, sarana dan dananya tetapi petaninya, kelembagaan serta struktur di pedesaannya sendiri luput dari jangkauan. Sehingga dengan berkelakar *Salmon Padmanagara* menyatakan "*Sekarang ini kita perlu menggeserkan energi kita untuk berpikir dan berbuat dari yang bersifat filsafat kepada praktek bukan praktis. Kita ini*

terlalu banyak bicara secara filsafat dan praktis tapi prakteknya tidak ada itulah yang disebut dengan tidak satunya kata dengan perbuatan. Dalam pembahasan falsafah dan pengertian penyuluhan pertanian, umumnya sudah mulai lurus, tapi begitu menjabarkannya kepada tindakan, seringkali berbeda dan menyimpang, kembali hanya mengurus diri sendiri, kembali terjadi tidak satunya kata dengan perbuatan.....”

Menyimak dua komentar pakar yang memberikan rambu-rambu terhadap esensi diselenggarakannya penyuluhan pertanian sudah selayaknya untuk menyimak kembali bagian-demi bagian dari rumusan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian sehingga kesan munculnya rumusan yang terlalu banyak condong kepada kepentingan-kepentingan secara fisik material seperti diungkapkan oleh para pakar di atas dapat terjawab dengan munculnya kelengkapan intervensi berupa input kegiatan perkerjasama piranti lunak untuk membangun kemandirian dan keswadayaan petani-nelayan.

Keberpihakan terhadap kepentingan petani ini menjadi isu sentral yang harus menjadi komitmen dari setiap penyelenggara penyuluhan pertanian, sekarang ini masih banyak aparat yang menempatkan petani sebagai obyek bukan sebagai subyek. Hal ini tercermin dari berbagai metode dan pendekatan yang dilakukan bukan menumbuhkan kemandirian tetapi justru membuat ketergantungan. “....sudah saatnya kita berani memerankan petani sebagai subjek, pada dasarnya mereka lebih tahu akan kebutuhan dirinya dan kondisi lingkungannya, sudah banyak contoh dimana banyak program dan proyek mengalami kegagalan karena kita terlalu memandang bodoh pada para petani....” tambah Loekman Soetrisno.

Pengalaman penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama

Terpadu (SLPHT), maraknya P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya) serta pembinaan petani miskin melalui P4K adalah salah satu contoh pengembangan metoda yang mampu menumbuhkan kemandirian petani. Hal ini bisa berhasil karena pada awal penyelenggaraan program ini sudah melibatkan petani secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan intervensi penyuluh hadir dalam pemanduan yang berprinsip kemitraan. Fenomena menarik untuk mengembangkan penyuluhan pertanian secara swadaya muncul dari kehadiran P4S, proses pendidikan bagi petani yang dilaksanakan pada kondisi usahatani yang nyata ini ternyata telah mampu menumbuhkan suatu peran murni dimana tingkat kepercayaan petani terhadap Kontaktni dan apa yang ada dalam P4S tersebut lebih menyentuh kepada kepentingan dan kebutuhan petani secara nyata.

“.....membaca konsep Revitalisasi Penyuluhan Pertanian ini, sungguh sangat membesarkan hati, banyak kata-

Herman Soewardi



kata yang indah di dalamnya namun kurang menapak pada kenyataan atau realita yang ada,.....” demikian ungkapan lain **Herman Soewardi**, yang menekankan pula bahwa rumusan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian ini harus melihat kondisi petani secara realita dengan berbagai fenomenanya sehingga akan menampilkan upaya-upaya yang dilaksanakan secara spesifik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pada awal berangkatnya dahulu, penyuluhan pertanian kita didasarkan pada ilmu sosial pedesaan, kemudian perkembangannya malah menjadi dipersempit pada pengertian komunikasi, dan hanya ditekankan pada satu aspek saja yakni inovasi adopsi. Lebih lanjut berkembang ke arah ilmu psikologi. Sekarang ini seyogyanya kita kembalikan lagi pada sosial pedesaan dan sistem usahatannya, hanya dengan pendekatan inilah kita akan secara langsung berhadapan dengan realita yang dihadapi petani. *“...pada kenyataan yang dihadapi sekarang, kita ini selalu berilusi dengan belajar ilmu penyuluhan dari Amerika dan ingin menerapkannya 100 persen di Indonesia. Jelas tidak akan cocok, sesuai dengan kondisinya, petani Amerika akan mudah dimodernisasi, tetapi petani kita yang rata-rata hanya memiliki lahan 0.1 - 0.2 Ha/kk. tidak akan mudah dimodernisasi. Karenanya, kembalilah pada sosial pedesaan sebagai dasarnya, kembalilah kepada petani dan usahatani dan struktur pedesaannya. Kembalikan kesemuanya itu kepada masyarakatnya sendiri, itulah landasan utama untuk membangkitkan moral etika di antara mereka dan antara mereka dengan kita. Bila itu sudah terbangun maka kita sudah mulai memahami masyarakat dengan penuh kearifan.”* demikian tandasnya lebih lanjut.

Pemikiran seperti itu sebenarnya sudah sering dan sudah banyak kita dengar, namun kadang secara apriori

kita sudah menempatkannya sebagai sesuatu yang terlalu bersifat idealis dan sangat sulit untuk direalisasikan. Dalam kesempatan lain Salmon Padmanagara pernah menyatakan : *“....banyak orang atau petugas yang selalu menempatkan sesuatu yang benar itu sebagai hal yang terlalu idealis, tidak praktis. Nah sikap itulah yang menyebabkan kita sulit untuk dapat memberikan kepercayaan yang penuh dan tulus kepada petani-nelayan. karena dengan sikap itu mata kita sudah tertutup untuk bisa melihat kemampuan mereka yang sebenarnya.”*

Secara falsafi seringkali dididungungkan bahwa masyarakat petani-nelayan itu sebagai sumberdaya, jadi secara falsafi mereka ditempatkan sebagai kelompok yang mempunyai keberdayaan dan kemampuan, namun dalam prakteknya seringkali masyarakat petani-nelayan dianggap tidak atau kurang berdaya, kurang mampu sehingga prakarsa dan inisiatif harus datang dari pihak pemerintah, pemrakarsa program dan proyek senantiasa harus datang dari pihak pemerintah. Ada kesan atau pendapat seolah-olah masyarakat tidak akan mampu berprakarsa dan berkreasi untuk menciptakan program pembangunan. Kesan atau pendapat itu sebenarnya keliru, sebagai contoh dapat dilihat dari prakarsa dan inisiatif pembangunan BPP di daerah Binong, Kabupaten Subang Jawa Barat. Ditengah merebaknya keluh kesah tentang memudarnya fungsi dan peranan serta pemeliharaan BPP di seluruh wilayah tanah air kita, ternyata **H. Otong**, KTNA dari Binong ini dapat menggerakkan masyarakat petani di wilayahnya berpelembaga dalam *Gerakan Tarbu-nya*, atau *Gerakan Sehektar Seribu*, untuk merehabilitasi gedung BPP yang hampir-hampir ditinggalkan itu.

Ini merupakan bukti nyata bahwa pada hakekatnya masyarakat tani-nelayan ini mampu berprakarsa,

berencana dan sekaligus melaksanakan program dalam pembangunan di wilayahnya. Masalahnya, bagaimana menciptakan iklim yang kondusif untuk dapat berkembangnya fungsi kepemimpinan masyarakat dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dan berkiprah dalam pembangunan ini.

Ternyata tumbuhnya dinamika dalam masyarakat ini tidak selalu harus dengan intervensi material atau piranti keras semata-mata, namun yang diperlukan justru sikap dari aparat dan iklim yang kondusif serta metoda atau piranti lunak yang mampu menumbuhkembangkan pemimpin, keswadayaan dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Aspek inilah yang hendaknya tidak boleh atau jangan sampai luput dalam upaya *revitalisasi penyuluhan pertanian*. Inilah yang dimaksud *mengembalikan kepada masyarakatnya* atau *berorientasi kepada kepentingan, keswadayaan dan kemandirian masyarakat*.

5. PROSPEK PELAKSANAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

Menyimak kompleksitas serta kepentingan untuk mengembalikan tingkat kinerja penyuluhan pertanian yang katanya sedang lesu darah ini, maka Revitalisasi Penyuluhan Pertanian sudah harus segera digulirkan sebagai salah satu kebijaksanaan yang secara operasional dapat menjamin terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sehat dan lebih etis.

Sehubungan dengan prospek pelaksanaan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian ini, A. Rifai Husein, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa bila rumusan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian mempunyai



A. Rifai Husein

konotasi dinamis maka hal ini dapat menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, tinggal mengupayakan dan menumbuhkan "*cost of participation*" baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri secara berimbang. Implikasi terhadap pemberlakuan kebijaksanaan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian ini harus diikuti dengan bergesernya orientasi program dan proyek yang masuk di daerah, hadirnya program dan proyek harus diartikan sebagai gerakan masyarakat membangun dengan pemerintah sebagai fasilitator, untuk itu maka peran Programa Penyuluhan Pertanian menjadi penting sebagai instrumen untuk membangun rancangan usahatani-nelayan berdasarkan kondisi agro ekosistem dalam agregat satu kesatuan wilayah pembangunan.

Dalam arti lain Programa Penyuluhan Pertanian harus menjadi landasan operasional bagi para penyuluh dan para petani-nelayan-nya untuk melaksanakan pekerjaannya di wilayah secara komprehensif dan holistik berdasarkan

kepada spesifikasi kelayakan wilayah lengkap dengan pendukung dari berbagai pihak yang menunjukkan kualitas interaksi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang optimal di tingkat wilayah. Penyelenggaraan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Partisipatif yang paripurna dan tuntas di tingkat BPP ini bukan cuma memerlukan piranti keras seperti gedung pertemuan, peralatan kerja dan mobilitas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya piranti lunak berupa metodologi penyusunan Program yang mampu membangun dinamika proses dalam menumbuhkembangkan partisipasi murni dan dinamika masyarakat pertanian di wilayahnya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, *Loekman Soetrisno*-pun berkomentar :
 “.....sebenarnya di tingkat kecamatan, BPP sudah mempunyai pengalaman koordinatif. Sekarang ini banyak program dan proyek yang “*mem-by pass*” Bapak Camat dan BPP, padahal Camat berfungsi sebagai *Political Umbrella* yang tidak boleh dilewati, dan BPP yang telah mempunyai pengalaman kordinatif itu seringkali tidak didayagunakan lagi. Revitalisasi dalam jangka pendek seyogyanya mengacu untuk menghidupkan kembali BPP dengan peranannya berkordinasi dengan Mantri Pertanian, mantri statistik, ka Ur Bang, Dokter Puskesmas. Untuk jangka panjangnya, BPP diarahkan untuk mengembangkan fungsinya dalam kordinasi perencanaan pembangunan di wilayahnya atau “*Bappenas-nya Kecamatan*”, untuk itu sebaiknya BPP dipimpin oleh orang yang berkualifikasi sarjana agar bisa berdampingan setara dengan Camat, Dokter Puskesmas dan kepemimpinan lainnya.....”

Dalam pada itu, *Salmon Padmanagara* menegaskan pula :-
 “.....berbicara mengenai BPP, seyogyanya kita dapat memberi

penghormatan dan menghormati kepada leluhur kita Bapak Soewardjo dengan konsep BPMD-nya. Sejak dulu sebelum banyak orang berbicara tentang Desa Beliau sudah berwawasan jauh ke depan dengan konsep Balai Pendidikan Masyarakat Desa-nya, ternyata konsep itu masih sangat relevan hingga sekarang ini. Harus diingat bahwa BPP yang lahirnya kemudian, itu bermula dari konsep BPMD itu....”

Mengenai akses teknologi yang sementara ini dianggap merupakan kendala dalam peningkatan kualitas usahatani secara berangsur dapat teratasi dengan kehadiran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), sebagai institusi yang mempunyai mandat pengkajian spesifik wilayah sudah harus mampu menjalin jaringan yang kuat melalui berbagai pengkajian dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada pada Balai Penyuluhan Pertanian(BPP).

Optimisme terhadap jaminan akses teknologi bagi para petani ini diungkapkan oleh *Djoko Prayitno Kepala Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (InP2TP) Yogyakarta* yang menyatakan kehadiran BPTP dengan berbagai pengkajiannya akan lebih mendekatkan kepada kepentingan petani di wilayah dan perlu diingat bahwa kesatuan penyuluh dan peneliti yang ada di BPTP harus dimanfaatkan oleh BPP untuk mengembangkan pengkajian - pengkajian yang spesifik lokasi dan sesuai dengan agro ekosistem wilayahnya. Namun demikian, proses arus informasi teknologi di masa datang ini sudah harus menyesuaikan dengan falsafah partisipasi. “.....sistem informasi dan transfer teknologi yang bersifat linier, sudah harus ditinggalkan, sebab perpindahan teknologi bisa juga terjadi dari petani kepada petani, atau dari petani kepada aparatur..” demikian



Sarasehan Sehari
Revitalisasi Penyuluhan
Pertanian.
Yogyakarta, 12 Des. '95.

ungkap *Loekman Soetrisno* lebih lanjut.

Tingkat kemampuan petanipun dengan masuknya berbagai informasi melalui berbagai media memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, disamping itu kekuatan barisan kontak tani-nelayan andalan merupakan sumberdaya yang harus diperhitungkan sebagai unsur penggerak dalam pelaksanaannya nanti.

“Sekarang ini sudah mulai KTNA dengan P4S-nya menjadi sumber informasi, wahana pengkajian dan penemuan teknologi sekaligus KTNA-nya berperan sebagai konsultan usahatani dan petani yang datang ke lokasi P4S untuk mencari informasiupun selalu ada walaupun disini tidak ada papan nama-nya, mereka datang dengan sukarela atas dasar kebutuhannya, dan mereka percaya

bahwa disini mereka akan memperoleh apa yang diperlukannya”, demikian ungkap H. Djuhija kepada ekstensia.

Celoteh tentang *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* yang diangkat dari Seminar Sehari tentang Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu dan wawancara eksklusif ekstensia ini diharapkan akan memperkaya wawasan kita dan mampu memberikan nuansa optimistik bagi para pelakunya, sebab *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* adalah suatu proses yang dinamis, yang senantiasa bergerak dan bergerak dan terus bergerak. Nada-nada optimis terhadap rumusan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian ini setidaknya mampu melantunkan serpihan angin segar sebagai salah satu alternatif untuk mengembalikan penyuluhan pertanian kepada hakekatnya semula. Semoga.

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian : *SEBUAH TANGGAPAN*

Oleh : *Loekman Soetrisno*

Saya tidak memahami pemerintah dalam hal ini Pertanian pernah mengeluarkan sebuah keputusan bersama Mendagri untuk menyerahkan pengurusan BPP pada pemerintah Dati II.

Reaksi saya pada saat itu adalah bahwa BPP yang telah dikembangkan dengan investasi pikiran dan biaya yang cukup banyak oleh Departemen Pertanian apabila diserahkan pada pemerintah Daerah Tingkat II pasti akan hancur, dan penyuluhan pertanian yang semula sudah terpadu dengan dikoordinasikan oleh BPP kembali menjadi sektoral sifatnya.

Sebelum tragedi di atas saya pernah bercita-cita untuk menjadikan BPP BAPPENAS-nya kecamatan sebagai unit perencana pertanian dalam artian yang luas. Impian saya tersebut bukan hanya sekedar impian tetapi sesuatu gagasan yang beralasan.

Pemerintah Daerah Tingkat II menurut hemat saya terlalu jauh untuk dapat secara efektif menangani pembangunan pertanian yang saya defenisikan sebagai meliputi pembangunan desa. Sementara desa sebagai unit pembangunan terlalu sempit.

Sementara itu pada kecamatan ada suatu institusi yakni BPP yang sudah memiliki pengalaman koordinatif dan perencanaan penyuluhan. Instansi ini dapat ditugasi untuk merencanakan dan mengkoordinasi pembangunan wilayah kecamatan. Kecamatan sebenarnya sudah memiliki instansi-instansi yang lain yang dapat digunakan untuk membantu BPP sebagai sebuah badan perencana pembangunan. Digunakan untuk membantu BPP sebagai sebuah perencana pembangunan. Di tingkat kecamatan ada mantri statistik dan mantri pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber data; dikecamatan ada juga Ka.Ur.Bang yang dapat digunakan sebagai narasumber pembangunan wilayah, dan yang tidak dilupakan adalah bahwa ditingkat kecamatan ada dokter yang dapat merencanakan pembangunan kesehatan dan sekaligus sebagai seorang intelektual yang diharapkan mampu memberi visi pada pembangunan itu.

Bagi saya revitalisasi penyuluhan pertanian harus memenuhi persyaratan jangka pendek yakni membuat BPP ujung tombak instansi penyuluhan yang berwibawa, pada jangka panjangnya

menjadi BAPPENAS pada tingkat kecamatan.

Tentang personalia BPP maka BPP dipimpin oleh penyuluh yang berkualifikasi sarjana sehingga ia dapat berinteraksi baik dengan dokter Puskesmas dan Camat yang pada umumnya tamatan perguruan tinggi.

Apabila kita sepakat bahwa BPP dapat difungsikan sebagai BAPPENAS kecamatan maka harus diikuti dengan keputusan pemerintah guna menyediakan dana pembangunan. Dana dapat diambil dari dana Inpres Desa.

Saya ingin menanggapi draft dari SKB Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyuluhan Pertanian. Yang ingin saya tanggapi adalah definisi dari penyuluhan. Definisi penyuluhan seperti yang tercantum dalam draft saya anggap berorientasi pada "atas/pemerintah" yakni kesan seolah-olah

penyuluh yang banyak pengalaman pertanian sedang petani tidak. Maka penyuluhan haruslah didefinisikan sebagai "two way life education system".

Penyuluh harus mau belajar dari petani dan petani belajar dari penyuluhan. Lebih lanjut definisi penyuluhan harus dijiwai oleh UU NO.12/1992.

Tentang tani dan nelayan adalah, apakah konsep ini masih harus digunakan? Apakah kriteria untuk menentukan petani dan nelayan andalan. Andalan mereka karena inovatif atau karena lahannya luas. Sistem penyuluhan juga harus menyesuaikan dengan kebhinekaan dari ekosistem pertanian kita.

Demikian sumbang pikiran saya.

Yogyakarta, 12 Desember 1995

Prof. DR. Loekman Soetrisno, adalah Guru Besar UGM dan Kepala Puslitbang Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gajah Mada

KEBUTUHAN REVITALISASI dalam Penyuluhan Pertanian

Oleh : *H. Rochajat Harun*

Upaya revitalisasi penyuluhan pertanian dilandasi oleh prinsip desentralisasi penyuluhan pertanian, peranserta petani-nelayan dan lembaga-lembaga swasta/ masyarakat, serta pembangunan pertanian berdasarkan pendekatan agribisnis, sumberdaya, dan keterpaduan. Pada dasarnya upaya itu menyangkut peningkatan kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia (*"human resource capacity building"*) sbb:

1. Pada tingkat petani-nelayan diperlukan pengembangan kemampuan kelompok tani-nelayan ke arah kelompok yang mampu menjadi sistem pengguna aktif yang pada akhirnya mampu menarik ke pedesaan semua sumberdaya dan kesempatan yang potensial yang ada di luar pedesaan untuk mengembangkan usahatani-nelayan dengan prinsip-prinsip agribisnis. Para petani-nelayan perlu diberi kesempatan untuk berperan lebih aktif dalam merencanakan dan melaksanakan usahanya. Untuk ini, para petani-nelayan perlu diberikan informasi pertanian seluas-luasnya dari berbagai sumber dan dalam waktu yang singkat dengan kualitas informasi yang relatif cepat, tepat dan dapat dipercaya. Berbagai kombinasi metode penyuluhan yang bersifat partisipatif perlu dikembangkan dan diterapkan secara tepat sesuai dengan kesibukan petani-nelayan dalam usahanya. Perlu dikaji berbagai metode penyuluhan yang sesuai dengan

keadaan sosial-ekonomi setempat. Hubungan-hubungan kerja penyuluh dan petani-nelayan/kelompok tani-nelayan dengan KUD, Kepala Desa, LKMD, dan aparat desa lainnya perlu dikembangkan sehingga merupakan satu kesatuan gerak antara penyuluh, petani-nelayan, dan aparat pedesaan dalam mengembangkan ekonomi pedesaan.

2. Pada tingkat kecamatan, diperlukan adanya BPP yang mampu melayani kebutuhan pendidikan non formal petani-nelayan. BPP yang ada sekarang ini perlu digerakkan menjadi unit fungsional penyuluhan pertanian yang memiliki kesatuan korps penyuluh pertanian yang utuh dan profesional. Para penyuluh yang bermarkas pada BPP Kecamatan perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang selalu baru di bidang pengembangan prinsip-prinsip penerapan agribisnis, komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan rumah tangga petani-nelayan (*"home economics"* atau *"home management"*), agro-ekologi, dan kebutuhan pengembangan lainnya yang relevan dan spesifik lokal. Hubungan kerja yang harmonis dan terpadu perlu dikembangkan antara para penyuluh dengan Camat, Mantri Tani/Peternakan/Perikanan/Perkebunan/Pengairan, KUD, dan dengan Kontak Tani-Nelayan Andalan (KTNA) tingkat Kecamatan. Diperlukan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat BPP Kecamatan



H. Rochajat Harun
Kepala Pusat
Penyuluhan Pertanian

yang setiap tahun menjadi bahan pertimbangan dalam forum UDKP. Dengan adanya ini, maka program penyuluhan pertanian dapat menjadi bagian yang integral dari upaya pengembangan wilayah kecamatan.

3. Pada tingkat kabupaten, diperlukan kesatuan unit organisasi yang mampu secara profesional mendukung operasi-operasi BPP Kecamatan. Diperlukan suatu bentuk konsolidasi organisasi penyuluhan yang utuh, terpadu, dan ajeg dalam menyusun, mengembangkan, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi penyuluhan pertanian di wilayah Kabupaten. Unit ini merupakan unit kerja struktural dari Pemerintah Daerah Tk.II di bidang penyuluhan pertanian dan dapat diberi nama Balai Komunikasi, Informasi, dan Penyuluhan Pertanian (BKIPP).*) BKIPP berfungsi sebagai pusat komunikasi, informasi, dan penyuluhan pertanian di wilayah kabupaten (terutama antara BKIPP dengan BPP Kecamatan dan BPTP). BKIPP merupakan pula pusat bagi para penyuluh spesialis atau penyuluh dengan berbagai keahlian yang mampu memberi dukungan kepada operasi-operasi BPP Kecamatan maupun para PPL. BKIPP berkedudukan langsung dibawah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Semua BPP Kecamatan berada dalam pengelolaan dan pembinaan BKIPP. Diperlukan satu kesatuan program penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten yang setiap tahun diajukan dalam forum RAKORBANG Tingkat II sehingga dapat menjamin penyediaan anggaran yang memadai. Diperlukan pengembangan kemampuan sumberdaya manusia di bidang penyuluhan

pertanian pada Pemda Tk.II sehingga kegiatan-kegiatan BKIPP, BPP Kecamatan, PPL, kelompok tani-nelayan, dan Kelompok KTNA tingkat Kabupaten dapat direncanakan dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Diperlukan penerapan/pengoperasian berbagai Keputusan/pengaturan ("*law enforcement*") yang ketat dan mapan sehingga orientasi subsektoral yang kaku dapat luluh menjadi orientasi pengembangan wilayah secara utuh dan mapan. Diperlukan pengaturan kerjasama segitiga yang sangat erat antara BKIPP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dengan Instalasinya, dan BLPP sehingga informasi teknologi terapan yang dikembangkan di BPTP dan pelatihan-pelatihan di BLPP dapat mendukung secara efektif pengembangan usaha tani-nelayan. Selain itu, BKIPP perlu menjalin kerjasama yang sangat erat dengan berbagai sumber informasi/teknologi (Universitas, LSM, usaha sektor swasta, dll.) sehingga berbagai macam kebutuhan informasi/teknologi dapat disediakan bagi petani-nelayan. Diperlukan kerjasama yang sangat dekat antara Kelompok Penyuluh Pertanian pada BKIPP dengan Kelompok KTNA tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah Kabupaten.

4. Di tingkat Propinsi, diperlukan rencana pembinaan teknis maupun administratif terhadap operasi-operasi penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten. Kelompok Penyuluh Pertanian yang berada pada Kanwil Deptan perlu diperkuat sehingga mampu bekerja sama dengan BPTP dalam mendukung operasi-operasi penyuluhan pertani-

*) Nama BKIPP merupakan nama alternatif dari BIPP (Balai Induk Penyuluhan Pertanian) sehubungan dengan berbagai pendapat yang kurang menyenangkan pemakaian istilah "Induk". Nama BKIPP mungkin lebih tepat sesuai dengan fungsi yang diembannya.



an di wilayah Kabupaten. Diperlukan satu kesatuan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian di tingkat Propinsi, yang setiap tahun dapat menjadi bahan pertimbangan RAKORBANG Tingkat I. Diperlukan rencana dan pelaksanaan satu kesatuan upaya pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah Propinsi. Diperlukan pengembangan kemampuan aparat penyuluhan pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian (Kanwil Deptan) dalam merumuskan petunjuk pelaksanaan atas sesuatu pedoman dari Pusat. Diperlukan kemampuan aparat Kanwil Deptan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring/evaluasi/pengendalian penyuluhan pertanian di wilayah Propinsi. Diperlukan kerjasama yang sangat dekat antara Kelompok Penyuluh Pertanian pada Kanwil Deptan dengan para peneliti pada BPTP dan kelompok Widyaiswara pada BLPP. Diperlukan kerjasama yang erat antara Kelompok Penyuluh dengan Kelompok KTNA tingkat Propinsi dalam

menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah Propinsi.

5. Di tingkat Pusat, diperlukan pengembangan kemampuan Pusat Penyuluhan Pertanian di bidang pembinaan teknis penyuluhan pertanian. Termasuk ke dalam pembinaan ini ialah perumusan kebijaksanaan umum, perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan program penyuluhan pertanian nasional, penyusunan berbagai pedoman/modul/ petunjuk pelaksanaan, pengembangan sumberdaya manusia, penyusunan bakuan-bakuan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Diperlukan pengembangan sistem informasi penyuluhan yang merupakan jaringan antara Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pedesaan. Diperlukan kerjasama yang sangat erat antara Kelompok Penyuluh Pertanian dengan para anggota Kelompok KTNA tingkat Nasional. Diperlukan kerjasama antara Pusat Penyuluhan Pertanian dengan berbagai sub sektor dalam

pengembangan program penyuluhan pertanian. Diperlukan kerjasama antara Pusat Penyuluhan Pertanian dengan berbagai sektor terkait dalam mengembangkan program-program penyuluhan pertanian di wilayah/bidang khusus (transmigrasi, perhutanan, pemuda, wanita, gizi dan kesehatan keluarga, keluarga berencana, perdagangan, perindustrian). Diperlukan kerjasama internasional di bidang penyuluhan pertanian (pertukaran informasi, pertukaran pengalaman dalam pengembangan sumberdaya manusia dan penerapan teknologi). Diperlukan Program Penyuluhan Pertanian yang setiap tahun dapat menjadi bahan diskusi dalam RAKORBANG tingkat Nasional. Diperlukan rencana kerja Penyuluh Pertanian tingkat Nasional.

PENTAHAPAN REVITALISASI

Berbagai kebutuhan di atas memerlukan pentahapan untuk memenuhinya sehubungan dengan besarnya perubahan yang dapat ditimbulkan. Perubahan ini menyangkut tata cara pengembangan sumberdaya manusia (petani, penyuluh dan petugas) dan perubahan institusional, termasuk organisasi beserta mekanisme kerja. Upaya revitalisasi sangat tergantung pada kemampuan pendanaan, komitmen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta ada tidaknya bantuan luar negeri.

Studi Pusat Penyuluhan Pertanian yang kini masih berjalan dengan bantuan Bank Dunia, untuk sementara, baru menetapkan strategi jangka pendek (3 tahun) yang akan dipakai sebagai dasar strategi jangka panjang. Periode ini merupakan tahap pertama dari upaya revitalisasi. Berbagai kajian akan dilaksanakan dalam tahap pertama ini sehingga upaya revitalisasi tahap kedua

dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahap pertama, diutamakan pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dan perubahan organisasi penyuluhan di tingkat Kabupaten. Ini dilakukan dalam jumlah propinsi dan kabupaten yang terbatas, yaitu untuk tahun pertama di Sumatera Utara (empat kabupaten), Sulawesi Selatan (empat kabupaten), Jawa Timur (lima kabupaten), dan Nusa Tenggara Timur (dua Kabupaten). Tahun kedua direncanakan Bali (dua Kabupaten), Kalimantan Selatan (tiga Kabupaten), Lampung (tiga Kabupaten), dan Jawa Barat (lima Kabupaten). Dengan demikian peroyek revitalisasi tahap pertama akan mencakup 28 Kabupaten di 8 Propinsi.

Upaya revitalisasi untuk seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan dalam tahap kedua. Pada tahap ini, masalah-masalah yang menyangkut pengembangan karir dan administrasi tenaga penyuluh diharapkan sudah mulai ditata kembali secara lebih terarah. Juga secara berangsur peranan petani-penyuluh, Perguruan Tinggi, LSM, dan usaha sektor swasta dalam penyuluhan diperbesar di wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk itu. Peranan Pemerintah dalam penyuluhan pertanian lebih banyak ditujukan kepada wilayah-wilayah yang kondisi sosial-ekonominya masih belum berkembang sepesat yang ditangani oleh swasta.





RENCANA OPERASIONAL

A. TUJUAN DAN OUTPUT

Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian bertujuan mengembangkan organisasi dan pengelolaan sistem penyuluhan pertanian sehingga sumberdaya manusia penyuluhan (petani-nelayan, petugas, dan penyuluh) dapat bergerak dalam satu kesatuan yang utuh dan profesional dalam alih teknologi dan pengembangan kemampuan wilayah pertanian.

Secara rinci, tujuan dan output revitalisasi terdiri dari:

1. Penggerakan tiga unsur petani-penyuluh-peneliti ke dalam satu tim penetapan usahatani-nelayan yang responsif terhadap permintaan pasar (*"demand-driven farm business and agribusiness planning and decision making"*). Output yang diharapkan mencakup:
 - a. Gambaran tentang potensi wilayah kecamatan dan kabupaten;
 - b. Program penyuluhan pertanian dan faktor penentu;

- c. Berbagai rencana kerja, yang diturunkan dari program dan faktor penentu (Rencana Usaha petani-nelayan/kelompok tani, rencana kerja penyuluh pertanian, rencana kerja para peneliti di BPTP, rencana kerja penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran);
 - d. Integrasi Program Penyuluhan BPP/Kecamatan dengan perencanaan desa melalui LKMD dan perencanaan Kecamatan melalui forum UDKP;
 - e. Pelaksanaan pola-pola penyuluhan sesuai dengan kondisi dan permasalahan wilayah;
 - f. Peranserta petani-nelayan menjadi lebih berkembang melalui berbagai Sekolah Lapangan, P4S, P4K, dll;
 - g. Peran serta petani-nelayan dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian di wilayahnya.
2. Revitalisasi BPP Kecamatan sehingga menjadi pusat kegiatan penyuluh-

an pertanian di pedesaan. Output yang diharapkan:

- a. BPP Kecamatan yang bersifat polivalen atas dasar sistem usaha tani-nelayan ("*area-based farming system*") memiliki seorang Kepala BPP yang tugas, fungsi dan wewenangnya jelas;
 - b. BPP Kecamatan memiliki Kelompok Penyuluh yang terdiri dari minimal 5 orang dengan dasar pengetahuan sesuai dengan agroekologi setempat serta terlatih sesuai dengan kebutuhan pengetahuan/keterampilan petani-nelayan di kecamatan/pedesaan bersangkutan;
 - c. BPP Kecamatan memiliki mekanisme kerja dengan Aparat Desa, Kecamatan, dan UDKP;
 - d. BPP Kecamatan memiliki fasilitas berupa:
 - (1) Alat komunikasi;
 - (2) Perabot dan peralatan kantor yang memadai;
 - (3) Lahan percontohan;
 - (4) Alat mobilitas bagi Penyuluh.
 - e. BPP Kecamatan memiliki sumber dana operasional yang tetap dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - f. BPP Kecamatan memiliki program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian;
 - g. BPP Kecamatan didaya gunakan oleh semua Dinas subsektor lingkup Pertanian;
 - h. BPP Kecamatan memiliki data base tentang berbagai kemampuan sosial ekonomi pedesaan dan kecamatan untuk wilayah kerjanya;
3. Pembentukan dan pengoperasian Balai Komunikasi, Informasi, dan Penyuluhan Pertanian (BKIPP). Output yang diharapkan:
- a. BKIPP dipilih dari salah satu BPP Kecamatan yang dekat dengan ibukota Kabupaten atau yang telah memiliki kriteria tertentu;
 - b. Struktur organisasi, tugas dan fungsi BKIPP ditetapkan (Seorang Kepala, seorang untuk urusan TU, seorang untuk urusan Pelayanan Teknis, dan sejumlah penyuluh yang memiliki spesialisasi dengan "*span of control*" 1 spesialis untuk 5 PPL);
 - c. BKIPP memiliki mekanisme kerja dengan Aparat Kabupaten, BPTP/IPPTP, Forum RAKORBANG TK.II, Dinas-Dinas lingkup Pertanian;
 - d. BKIPP memiliki fasilitas berupa:
 - (1) Alat komunikasi yang memadai;
 - (2) Peralatan dan perabot Kantor yang memadai;
 - (3) Peralatan sistim informasi manajemen;
 - (4) Lahan percontohan;
 - (5) Alat mobilitas bagi Penyuluh;
 - (6) Ruang-ruang pertemuan;
 - e. BKIPP memiliki sumber dana operasional yang tetap dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - f. BKIPP memiliki program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian;
 - g. BKIPP melakukan pengadministrasian tenaga penyuluh dan mengelola semua BPP Kecamatan yang ada dalam wilayahnya;
 - h. BKIPP memiliki data base tentang berbagai kemampuan sosial ekonomi tingkat Kabupaten;
4. Peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian sehingga mereka dapat menjalankan peranannya dengan baik. Output yang diharapkan :

- a. Pemda Tk. II menjadi lebih mampu merancang pengembangan sumberdaya manusia dan melaksanakan pelatihan bagi para pegawai dan penyuluh pertanian di Daerah Tk.II (identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum/modul, dan penyelenggaraan pelatihan);
- b. Terbentuknya struktur organisasi yang menangani pengembangan sumber daya manusia pada organisasi Pemda Tk.II;
- c. Kantor Wilayah Deptan menjadi lebih mapan dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah, a.l. kapasitas dalam administrasi tenaga penyuluh, perencanaan pengembangan sumberdaya manusia, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. Pusat Penyuluhan Pertanian menjadi lebih mampu dalam :
 - (1) Menganalisa dan merumuskan kebijaksanaan dan pedoman-pedoman;
 - (2) Mengembangkan metode penyuluhan pertanian;
 - (3) Mengembangkan bakuan-bakuan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
 - (4) Menyelenggarakan kajian-kajian, monitoring dan evaluasi;
 - (5) Mengelola Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.
 - (6) Mengelola administrasi kepegawaian penyuluh pertanian;
- e. Para penyuluh pertanian dan petugas penyuluhan pertanian menjadi lebih berpengetahuan dan berkemampuan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
- f. Organisasi dan pengelolaan kelompok tani menjadi lebih berorientasi kepada pengembangan kemampuan usaha secara mandiri dan profesional.



B. KOMPONEN DAN KEGIATAN

Upaya revitalisasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

1. Pengembangan sumberdaya manusia;
 2. Alih teknologi;
 3. Pengembangan kelembagaan.
1. Kegiatan yang menyangkut pengembangan sumberdaya manusia terdiri dari:
 - a. Pelatihan penyuluh pertanian di berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan pelatihan di tingkat bersangkutan (Nasional, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan/pedesaan).
 - b. Apresiasi tentang berbagai perubahan dan pengaturan-pengaturan baru dalam penyuluhan pertanian (Kebijaksanaan, pedoman, petunjuk, kurikulum, modul);
 - c. Pengadaan literatur bagi para penyuluh pertanian;
 - d. Penerapan metode penyuluhan yang lebih bersifat partisipatif (SLPHT, P4S, P4K);
 - e. Pengembangan program, modul, kurikulum;
 - f. Temu profesi bagi penyuluh pertanian di berbagai tingkat wilayah (Nasional, Propinsi, Kabupaten).
 - g. Pembentukan data base penyelenggaraan penyuluhan pertanian di berbagai tingkat wilayah.
 - h. Pelatihan tentang konsep keragaman lokal dalam agro-ekosistem dari sistem usaha petaninelayan;
 - i. Pelatihan tentang berbagai aspek agribisnis dari pembangunan pertanian, a.l. potensi pasar, perkreditan, organisasi usaha, dll.
2. Kegiatan yang menyangkut alih teknologi meliputi:
 - a. Produksi dan penyebaran teknologi yang dirakit BPTP melalui media cetak dan elektronik;
 - b. Penyelenggaraan percontohan;
 - c. Penyelenggaraan Temu Teknologi;
 - d. Penyelenggaraan kursus-kursus tani di BKIPP dan BPP;
 - e. Mendorong kerjasama swasta dengan petani-nelayan dalam menyebarluaskan teknologi, terutama di wilayah-wilayah yang telah maju perkembangan sosial-ekonominya.
 - f. Mendorong peningkatan peranan Universitas dan LSM dalam alih teknologi.
3. Kegiatan yang menyangkut pengembangan institusi:
 - a. Rehabilitasi/renovasi BPP menjadi BKIPP;
 - b. Melengkapi BKIPP dengan personil, tugas dan fungsi, mekanisme kerja, dan peralatan fungsional, alat mobilitas, dan fasilitas kantor dan fasilitas pertemuan;
 - c. Melengkapi BPP Kecamatan dengan personil, tugas dan fungsi, peralatan komunikasi, alat mobilitas dan perabot kantor;
 - d. Mengadakan konsolidasi organisasi Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Pemda Tk.II;
 - e. Menyusun mekanisme kerja antar berbagai kelembagaan penyuluhan pertanian di berbagai tingkat wilayah;

Pendidikan Pertanian untuk Petani

Oleh : *Salmon Padmanagara*

Di masa yang akan datang, kekuatan dan kesinambungan pembangunan pertanian akan diukur dari ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya alam secara rasional dan efisien. Petani sebagai manajer mandiri yang berpengetahuan, terampil, cakap menilai peluang usaha dan bisa mengambil keputusan sendiri untuk bertindak dan mampu untuk selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia yang sangat pesat maupun terhadap perubahan dalam pembangunan pertanian itu sendiri.

Sejak tiga puluh tahun yang lalu, saat kita kita bergegas dalam pembangunan maka aparat pemerintah cenderung untuk mengatur segalanya, mendorong masyarakat tani untuk ikut serta dalam pembangunan melalui rekayasa sosial. Program penyuluhan pertanianpun berawal dari petunjuk ataupun pesan bersifat *top-down*, yang kadang-kadang kurang menghargai pengalaman maupun pengetahuan Petani Dulu, ada anggapan yang menghargai pengalaman maupun pengetahuan Petani. Dulu, ada anggapan yang meragukan kemampuan masyarakat tani, tetapi sekarang, ada kesadaran bahwa justru merekalah kekayaan yang paling berharga dalam pembangunan.

Pendekatan paternalistik inilah yang perlu direvisi, sehingga merupakan landasan baru yang lebih demokratik

untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta sarat dengan pengetahuan dan bercirikan abad ke 21.

Harapan dan Realita

Petani mandiri, petani tangguh adalah yang diinginkan sejak Repelita I. Sebelum itu, telah pula diinginkan agar petani dari objek menjadi subjek. Keinginan-keinginan itulah yang menjadi dasar bagi pengembangan suatu sistem pendidikan pertanian untuk petani yang lazim disebut Penyuluhan Pertanian.

Penyuluhan Pertanian diartikan sebagai sistem pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya. Petani belajar dengan mengerjakan sendiri. Kepentingan petani diusahakan menjadi keinginan petani. Petani dibantu agar dapat membantu diri sendiri, dididik agar dapat mendidik diri sendiri. Ruang lingkupnya adalah : Bertani lebih baik - Berusahatani lebih menguntungkan - Hidup lebih sejahtera, kemudian ditambah dengan Masyarakat Tani lebih makmur-Lingkungan Hidup lebih baik.

Yang selalu menjadi masalah adalah : Apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Masalah-masalah itu sampai sekarang terus membayangi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dan akan demikian seterusnya.



Salmon Padmanagara

Dalam perjalanan waktu penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tidak dapat mempertahankan kemurniannya. Pengembangan kemampuan petani sesuai keinginannya dan kesempatannya menuju kemandirian sebagai subjek menghadapi beberapa kenyataan sebagai berikut :

Adalah kepentingan nasional bahwa produksi pangan harus memenuhi keperluan konsumsi dalam negeri, terutama beras. hal itu tertuang dalam kebijakan swasembada pangan dengan kelengkapan program operasional Bimas. Banyak dana, daya serta upaya diarahkan untuk suksesnya program itu, sehingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras. sukses itu mengurangi kesempatan perkembangan produksi lainnya, terutama hortikultura. Keleluasaan untuk berkembangnya usaha tani yang lebih menguntungkan, mengalami hambatan. Penyuluh Pertanian fungsinya terpaksa menyesuaikan dengan menjadi pembawa Paket Teknologi yang harus diterapkan petani dan memang telah berhasil menjadi petani terampil dalam penerapan Paket Teknologi yang disebut Panca Usaha, yang kemudian disusul dengan paket-paket Program Bimas lainnya.

Adalah kenyataan yang merisaukan bahwa petani dalam keterampilannya menerapkan paket-paket masih belum mandiri, masih tergantung dari pihak lain. Reaksi petani dengan: melapor, menunggu instruksi atau mengimbau bantuan jika menghadapi persoalan masih merupakan keadaan yang umum.

Adalah keadaan yang memprihatinkan bahwa Penyuluhan Pertanian makin ditafsirkan sebagai memberi penerapan dibidang pertanian, sehingga terdengar anggapan bahwa setiap orang yang pandai bicara bisa menjadi Penyuluh Pertanian dengan menganjurkan ini dan itu.

Adalah sikap yang disayangkan dan amat merugikan bahwa terdengar ucapan-ucapan sebagai berikut :

- ◆ Masa petani pakai dasi
- ◆ Apa benar itu wanita tani, kok cantik
- ◆ Jika petani menjadi ahli maka kita tidak bisa menguasai mereka
- ◆ Petani jangan diikutkan dalam panitia, nanti memalukan saja
- ◆ Petani tidak melaksanakan anjuran itu. Mereka bodoh
- ◆ Petani tidak mau melaksanakan anjuran itu. Mereka bandel

Sikap-sikap terhadap petani seperti tersebut di atas amat mempengaruhi metoda pendidikan pertanian untuk petani, sehingga timbul anggapan bahwa petani harus dipaksa, sehingga terpaksa, kemudian menjadi biasa. Rupanya terlupakan bahwa akhirnya petani menjadi biasa dipaksa, biasa dibimbing dan pasrah bagaimana yang mengatur saja.

Tantangan dan Peluang

Kebijakan swasembada pangan dengan program meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani dalam waktu kurang lebih 25 tahun telah berhasil melipatgandakan produksi padi dan secara lumayan telah meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Meskipun dengan *handicap* sikap negatif terhadap petani yang kurang menguntungkan bagi perkembangan kepribadiannya.

Sikap terhadap petani seperti yang digambarkan terdahulu, menimbulkan sikap petani mengenai diri sendiri sebagai yang patuh bagi program-program dan pembinaan-pembinaan dari '*atas*'. Yang demikian itu jauh dari yang diinginkan sejak lama, yaitu petani yang mandiri dan tangguh, petani sebagai subjek, bukan objek.

Pendidikan Pertanian yang menghasilkan petani yang terampil menerapkan teknologi yang dianjurkan saja dalam jangka panjang akan menghambat pembangunan pertanian yang berkesinambungan, tidak akan

mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk merebut pasar komoditas pertanian, terlebih lagi dalam era globalisasi.

Ada 3 kebijakan saat ini sebagai landasan pembangunan pertanian PJPT-II, yaitu :

- ⇒ Undang-undang No.12/1992 tentang sistem Budidaya Pertanian, yang diantaranya menyebutkan bahwa petani bebas menentukan sendiri jenis usahatannya.
- ⇒ Kebijakan Agribisnis yang menempatkan petani tidak lagi sebagai hanya penanam atau pemelihara semata-mata, tetapi sebagai manajer usahatannya.
- ⇒ Kebijakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu konsep produksi dan perlindungan tanaman berdasarkan ekologi dan ekosistem setempat, bukan lagi berdasarkan bahan kimia.

Ketiga kebijakan itu juga mengharuskan kita untuk memperbaharui pandangan tentang kemampuan petani dari memperbaiki sikap kita terhadap petani. Petani yang bagaimana-kah yang disebut mandiri dan subjek

agar ketiga kebijakan itu tidak tinggal kebijakan semata.

Ketiga kebijakan itu berisi unsur-unsur utama yang menggambarkan pertanian Indonesia hari esok. Yaitu tentang petani, tentang usahatani dan tentang sumberdaya alam.

Dalam lampiran disajikan model sosok petani yang mandiri, tangguh dan subjek. Yaitu sebagai petani esok, yang diinginkan/diidamkan. Petani kemarin adalah model sosok petani dari budaya dan masyarakat kemarin atau lama yang mulai ditinggalkan. Petani Hari Ini adalah model sosok petani dari budaya dan masyarakat sekarang atau masa kini.

Ketiga model sosok itu bagian dari budaya masyarakat zamannya masing-masing dengan ciri penggunaan budidaya pertanian masing-masing pula. Ketiga model sosok itu hadir dalam setiap periode. model kemarin tinggal sisa. Model sekarang adalah mayoritas. Model esok sudah muncul. Budaya masyarakat berubah. Ilmu dan teknologi berubah. Pendidikan Pertanianpun berubah.

Apakah Pendidikan Pertanian berubah mengikuti perubahan atau



berubah memelopori/mengantisipasi perubahan. Yang kita perlukan adalah Pendidikan Pertanian yang berorientasi kehari depan membawa sikap/pendangan baru dan teknologi terapan mutakhir, melalui metode pendidikan yang sesuai dengan itu.

Penyuluhan Pertanian sebagai Pendidikan Pertanian untuk petani perlu direhabilitasi dari sekedar pembawa paket teknologi untuk diterapkan petani menjadi kelembagaan yang menciptakan suasana, iklim, lingkungan dan kesempatan yang memungkinkan berkembangnya petani secara mandiri sebagai manajer usahatani atau pemimpin dalam masyarakat agribisnis.

Beberapa prinsip yang merupakan arahan bagi pelaksanaan Pendidikan Pertanian untuk Petani dalam rangka ketiga kebijakan tersebut di atas adalah:

Petani harus dipandang sebagai suatu sistem kompleks yang hidup, tempat manusia berinteraksi dengan tanah, air, tanaman, dan organisme hidup lainnya, dalam mengoptimalkan sumberdaya daya yang ada. Dari sudut pandang ini, maka petani belajar bekerjasama dengan alam, bukan mencoba menguasainya atau menyalahgunakan lingkungan hidup sekitarnya. Pendekatan ini memungkinkan petani untuk mengembangkan cara-cara bercocok tanam yang produktif dan berkelanjutan.

Petani ditempatkan pada pusat sistem usahatani, sehingga ia dianggap sebagai subjek bukan objek pembangunan. Pendidikan Pertanian membantu petani belajar mengorganisasi diri mereka sendiri dan masyarakat disekitarnya. Mengumpulkan data di lahan mereka sendiri. Menelaah informasi ini dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan data yang mereka temukan sendiri.

Pendidikan Pertanian untuk petani sebagai upaya untuk Pengembangan Sumberdaya Manusia bukanlah pem-

bawa paket teknologi untuk diterapkan secara seragam oleh petani. Pendidikan Pertanian membantu para petani menguasai konsep berfikir yang baru dan menerapkan cara-cara yang baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Proses ini jika diterapkan oleh petani akan mamapukah mereka dalam menghadapi masalah-masalah baru dan berani melakukan percobaan untuk mencari jawaban atas permasalahan agronomik yang ditemui di lapangan/dilahannya. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka menjadi petani yang terampil, tetapi juga memperkokoh hubungan antara peneliti pertanian, penyuluh pertanian dan kelompok tani.

Prinsip-prinsip Pendidikan Pertanian tersebut di atas mudah disesuaikan dan dikembangkan untuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan penerapan kegiatan-kegiatan baru, yang menerapkan petani sebagai pusat pengembangan pertanian di masa depan.





Pendidikan Pertanian untuk petani berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas diorganisir melalui metode Sekolah Lapangan yang mencerminkan langkah terobosan dalam pendidikan petani Indonesia/penyuluh pertanian di Indonesia yang sudah mulai diselenggarakan dan dilaksanakan sejak tahun 1989, sementara itu sistem penyuluhan pertanian gaya lama berjalan.

Sekolah Lapangan Petani adalah suatu 'sekolah' dengan kurikulum, percobaan 'laboratorium' sederhana dan pendidikan ini menekankan pada cara belajar dari pengalaman, usaha menemukan sendiri dan kerjasama melalui dinamika kelompok diantara peserta belajar.

Petani bukan penerima informasi pasif, mereka aktif mengumpulkan dan menelaah data, melakukan percobaan lapangan dan mencapai keputusan bersama berdasarkan diskusi kelompok.

Petani menjadi petani ahli yang mampu menerapkan prinsip dan cara usahatani yang efisien dan rasional di lahan sendiri dan mampu mendidik petani lain dalam penerapan tersebut. Kemampuan ini terbukti sangat nyata dengan berkembangnya kegiatan

pendidikan dan latihan pertanian yang diselenggarakan dan dilaksanakan sendiri oleh petani, perorangan maupun secara berkelompok. Istilah petani dosen, petani pelatih, petani pemandu semakin populer dan bukan merupakan istilah ejekan, tetapi kenyataan dan kehormatan.

Cara belajar dari pengalaman yang merupakan inti kegiatan Sekolah lapangan dapat diterapkan pada berbagai topik pertanian/usahatani sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memurnikan kembali sistem penyuluhan pertanian yang masih berjalan.

Sekolah Lapangan menunjukkan bahwa program pertanian yang menekankan dinamika kelompok, pengaturan dan pengorganisasian oleh petani dapat membantu memperkuat kelompok tani yang ada.

Pendidikan Pertanian untuk Petani perlu diperbaharui secara terus menerus dan secara konsisten berpijak pada cara penyelenggaraan dan metode pelaksanaan yang demokratis.

Petani sendiri mempunyai potensi dan dapat membuktikan kemampuannya sebagai mitra pendidik pertanian khususnya, maupun sebagai mitra kerja

dalam berbagai kegiatan pembangunan umumnya. Karena itu petani jangan hanya sekedar diikutsertakan, tetapi berperan dan bertanggungjawab sebagai mitra/partner.

Sikap negatif terhadap petani perlu segera dihapus dari segala lapisan masyarakat dan diganti dengan sikap

yang menghormati dan menghargai petani sebagai warga yang sama derajatnya di Masyarakat Pancasila.

Petani dan keluarganya di pedesaan yang mayoritas penduduk Indonesia adalah penyandang budaya asli kontemporer maupun penyerap teknologi mutakhir yang potensial.

Petani

*Kemarin, Hari Ini dan Esok *)*

	Kemarin	Hari Ini	Esok
1. Kegiatan Bertani	<i>Kalender Musiman</i>	<i>Program Pemerintah</i>	<i>Rencana Usaha</i>
2. Pola kerja	<i>Menurut Adat</i>	<i>Petunjuk Pembina</i>	<i>Ilmu Usahatani</i>
3. Sikap	<i>Konservatif</i>	<i>Maju</i>	<i>Rasional</i>
4. Kemampuan	<i>Warisan</i>	<i>Pelatihan</i>	<i>Pendidikan</i>
5. Teknologi	<i>Turun temurun</i> <i>Pengalaman</i> <i>Sumberdaya Alam</i>	<i>Paket Nasional</i> <i>Pengalaman</i> <i>Sumberdaya Alam</i> <i>IPTeK</i>	<i>Keputusan Sendiri</i> <i>Pengalaman</i> <i>Sumberdaya Alam</i> <i>IPTeK</i> <i>Ekosistem Lokal</i>
6. Menghadapi Persoalan	<i>Observasi</i> <i>Pengalaman</i> <i>Tidak Berdaya</i> <i>Berdoa</i>	<i>Observasi</i> <i>Pengalaman</i> <i>Melapor</i> <i>Menunggu Petunjuk</i>	<i>Observasi</i> <i>Pengalaman</i> <i>Analisa</i> <i>Alternatif Mengatasi</i> <i>Ambil Tindakan</i>
7. Ketergantungan	<i>Pada Nasib</i>	<i>Penggunaan Akal</i>	
8. Penampilan	<i>Sederhana</i>	<i>Terampil</i>	<i>Manajer</i>
9. Organisasi	<i>Gotong-royong</i>	<i>Kelompok Belajar</i>	<i>Organisasi Usahatani</i>
	<i>Tahu yang dikerjakan</i> <i>Percaya Leluhur</i>	<i>Tahu yang Dikerjakan</i> <i>Tahu Cara yang Benar</i> <i>Percaya Pembina</i>	<i>Tahu yang Dikerjakan</i> <i>Tahu Cara yang Benar</i> <i>Tahu Alasannya</i> <i>Percaya Diri</i>

(Salmon Padmanagara, November 1993)

*) Perlu diperhatikan bahwa kondisi para petani pada setiap saat/periode adalah beragam. Dalam suatu lokasi/wilayah tertentu kita dapat menjumpai ketiga kondisi itu. Artinya selalu ada petani sederhana, petani terampil, petani manajer, tetapi makin mutakhir zaman, kondisi mayoritas petani makin menggeser ke kanan.

Magang-Tani

Mendorong saling belajar antar petani

Oleh : *A. Soedradjat Martaamidjaja*

Pembangunan pertanian telah menghasilkan petani-nelayan yang bukan saja lebih cakap dan produktif, tetapi juga lebih berswadaya dan mandiri. Hal-hal yang tidak terbayangkan dilakukan petani-nelayan dua puluh lima tahun lalu, kini menjadi praktek sehari-hari. Diantara berbagai faktor pendorong, teknologi dan pendidikan merupakan dua pendorong utama kemajuan mereka.

Upaya pembinaan oleh pemerintah sudah barang tentu berperan besar bagi kemajuan petani-nelayan. Namun, yang perlu dicatat adalah kesadaran dan motivasi yang berkembang di kalangan petani-nelayan sendiri yang telah membuat mereka berswadaya dan menjadi pemeran aktif pembangunan.

PJP-I telah menyaksikan berkembang-suburnya kepemimpinan petani-nelayan di pedesaan. Kontaktni-nelayan dan kader-kader pembangunan pertanian lainnya telah memberikan andil besar dalam menggerakkan prakarsa dan partisipasi para petani-nelayan. Salah satu wujud partisipasi petani-nelayan yang menonjol adalah penyelenggaraan permagangan dan pelatihan petani-nelayan secara swadaya, dari oleh dan untuk mereka sendiri. Selama lima tahun terakhir, permagangan swadaya (magang-tani) baik secara perorangan maupun berkelompok berkembang dengan pesat.

Bersamaan dengan itu bertumbuhan pula Pusat-Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang diparakersai oleh para Kontak Tani-nelayan dan alumni magang Jepang, sebagai tempat pelatihan dan permagangan pemudatani-nelayan secara terstruktur.

Saling Belajar Antar Petani

Seorang petani (termasuk nelayan) akan lebih mudah belajar dari sesama petani dibandingkan dari orang di luar lingkungannya. Kaidah ini disepakati oleh umumnya pakar dan praktisi penyuluhan pertanian. Bukan saja hal ini didukung oleh sejumlah teori psikologi sosial dan ilmu pendidikan, tapi juga dibenarkan oleh pengalaman empiris di lapangan.

Atas dasar kaidah yang sama, kelompok tani-nelayan dan kontaktni-nelayan dikembangkan di Indonesia. Kelompok tani-nelayan sebagai wadah belajar dan kontaktni-nelayan sebagai pendidik anggota kelompoknya, sudah sejak awal dipegang sebagai dasar pembinaan oleh para penyuluh pertanian. Dari sini pula berkembang metode penyuluhan pertanian "*petani belajar dari petani*" atau "*saling belajar antar petani*".

Saling belajar antar petani sesungguhnya merupakan proses belajar yang



*A. Soedradjat
Martaamidjaja*

Kepala Pusat Diklat
Penyuluhan Pertanian

alamiah. Pewarisan budaya bertani di kalangan masyarakat pedesaan adalah hasil proses belajar antar petani, khususnya dari orang tua kepada anaknya. Ikut belajar kerja dengan petani yang lebih berpengalaman sering juga dilakukan oleh para pemudatani di pedesaan. Kegiatan ini biasanya disebut magang.

Magang dalam pengertian konvensional adalah proses "ikut kerja" yang dilakukan oleh seseorang (biasanya orang muda) kepada orang lain yang lebih berpengalaman dalam satu bidang pekerjaan/usaha tertentu. Contoh dalam dunia pertanian adalah ikut-kerjanya seorang pemudatani kepada seorang petani yang berpengalaman dengan maksud nantinya ia dapat meniru cara-cara kerja induk semangnya dalam kegiatan usahataniya sendiri. Magang konvensional ini bersifat kekeluargaan, sangat informal dan tanpa perencanaan proses belajar yang terstruktur.

Dalam dunia pendidikan modern, pengertian magang telah berkembang ke arah proses belajar yang lebih formal, sistematis dan terstruktur. Di beberapa

negara maju, misalnya Jerman, pendidikan magang merupakan pendidikan formal setingkat akademi yang dilaksanakan atas kerjasama perusahaan dengan lembaga pendidikan tinggi. Lulusannya mendapat predikat "Meister". Sistem ini diadaptasi di Indonesia dalam bentuk pendidikan "sistem-ganda" pada sekolah-sekolah menengah kejuruan dan sistem pemagangan tenaga kerja yang dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Definisi yang dipakai oleh Departemen Tenaga Kerja mengenai pemagangan adalah sebagai berikut :

"Pemagangan adalah suatu proses pendidikan dan latihan secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan secara terpadu dan berjenjang di lembaga pendidikan atau latihan dan dengan bekerja secara langsung dalam proses produksi atau jasa di perusahaan, agar peserta memiliki keterampilan dan kompetensi bagi suatu profesi tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dimana peserta pemagangan dan dunia usaha terkait dalam kontrak pemagangan"



Sdr. Winarno, Petani Muda dari Jatibarang menjelaskan penggunaan "traktor tangan" kepada Pemuda Tani peserta Magang.

Konsep pemagangan yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Tenaga Kerja tampaknya berfokus pada kegiatan pendidikan magang di industri (perusahaan berbadan hukum) serta dirancang sebagai pendidikan formal. Pemagangan petani pada petani lain selaku pengusaha pertanian tetapi tidak berbadan hukum serta yang dilaksanakan secara relatif tidak formal, belum tercakup dalam konsep pemagangan tersebut. Karena itu diperlukan konsep khusus untuk pengembangan pemagangan di sektor pertanian.

Pemagangan yang dapat dikembangkan di sektor pertanian selain yang terkait dengan perusahaan juga adalah yang terselenggara diantara sesama petani. Hal yang terakhir ini, yang disebut magang-tani, akhir-akhir ini menjadi semakin populer berkat prakarsa sejumlah kontaktani-nelayan dan bimbingan para penyuluh pertanian. Potensi para kontak tani-nelayan sebagai penyelenggara magang-tani cukup besar. Diantara mereka ada yang telah secara teratur melaksanakan magang-tani bagi para petani dari wilayahnya maupun dari luar propinsi.

Kelebihan Magang-Tani sebagai Kegiatan Belajar

Sebagai kegiatan belajar, magang-tani memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut :

1. Luwes, karena isi dan penyajian materi belajar mudah disesuaikan dengan kebutuhan pemegang.
2. Praktis, karena belajar secara nyata dengan cara mengerjakan sendiri di lapangan dan dibimbing oleh induk semang yang berpengalaman.
3. Komprehensif, karena dapat menghasilkan bukan saja pengetahuan dan keterampilan tetapi juga sikap positif dan rasa cinta kepada pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Produktif, karena proses magang dilakukan sambil membantu kegiatan usahatani induk-semang.
5. Efisien, karena menggunakan fasilitas yang dipakai sehari-hari oleh induk semang dan biaya dapat ditanggung bersama secara swadaya.

Kelebihan-kelebihan diatas apabila dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan alih kemampuan yang cepat dan efektif dari induk semang kepada anak didiknya (pemegang). Kelancaran alih kemampuan itu sangat ditentukan oleh kemampuan induk semang sebagai pengajar, kesiapan pemegang sebagai anak didik serta hubungan edukatif diantara keduanya.

Para petani sebagai pengajar umumnya menghadapi keterbatasan pengetahuan teori untuk melandasi hal-hal yang diajarkannya disamping kurang memiliki pengetahuan metoda mengajar. Kekurangan sarana belajar, khususnya sarana praktek, sering juga menjadi hambatan. Meskipun demikian tidak jarang ditemui petani induk semang yang secara alamiah memiliki bakat yang baik dalam cara-cara mengajar dan mampu menyediakan sarana belajar secara swadaya.

Karena selama belajar pemegang tinggal dan hidup bersama keluarga induk semangnya, maka proses belajar magang-tani pada dasarnya berlangsung sepanjang waktu, 24 jam sehari. Keluwesan waktu belajar ini yang disertai suasana keakraban serta kekeluargaan, merupakan iklim belajar yang kondusif bila dimanfaatkan dengan tepat. Waktu-waktu santai di luar kesibukan usahatani, dapat digunakan induk semang untuk memberikan pelajaran tentang hidup dan kehidupan sebagai pengusaha tani. Dengan demikian, magang-tani tidak hanya merupakan latihan keterampilan berusahatani, tetapi juga pendidikan tentang hidup dan kehidupan.



*Kegiatan pelatihan/
Magang di P4S
Cinagara Pimpinan
Haji Bachrum.*

Magang-Tani di P4S

P4S adalah lembaga pendidikan di bidang pertanian dan pedesaan yang dimiliki dan dikelola langsung oleh petani-nelayan baik secara perorangan maupun berkelompok. Disamping pelatihan yang sangat terstruktur di P4S, juga dilaksanakan pelatihan yang bersifat magang-tani yaitu yang pesertanya dibimbing langsung oleh petani pengajar dalam berbagai keterampilan usahatani.

Menurut catatan Badan Diklat Pertanian, dewasa ini terdapat 45 buah P4S yang tersebar di 22 propinsi. Sekitar 50 % dari padanya telah memiliki sarana belajar yang cukup lengkap dan telah secara teratur melaksanakan pelatihan. Pada P4S yang belum memiliki pemondokan, suasana pemagangan sangat terasa karena para pemagang tinggal bersama keluarga induk semang. Pada P4S yang memiliki pemondokan/asrama, suasana pemagangan meskipun tidak terlalu nyata, namun masih tampak dari keluwesan waktu dan isi pelajaran serta dari keakraban antara petani-pengajar dengan peserta-didiknya.

Karena dasar pendidikannya bersifat pemagangan, P4S sebagai sebuah lembaga pelatihan menempati kedudukan yang unik dan strategis dalam pembinaan sumberdaya petani-nelayan. Keunikan itu tampak dari berkelanjutannya hubungan antara alumni pelatihan dengan P4S, sehingga P4S benar-benar berfungsi sebagai sentra pemacu pembangunan bagi masyarakat tani/pedesaan. Beberapa P4S memberikan bimbingan usaha secara terus menerus terhadap alumninya, setelah mereka kembali ke desanya masing-masing. Karena hubungan fungsi seperti itu, maka P4S dapat menjadi katalisator untuk mempercepat proses kemandirian dan saling membantu di kalangan petani-nelayan. Para alumni-magang di P4S diharapkan dapat menjadi petani-nelayan yang lebih produktif dan mandiri. Di masa depan mereka diharapkan dapat membuka P4S sendiri atau paling sedikit menjadi penerima magang-tani.

Dengan semakin populernya P4S, perhatian dan bantuan dari berbagai instansi pun semakin meningkat, khususnya dari Pemerintah daerah, Dinas-dinas lingkup Deptan serta BUMN Pertanian. Hal ini menunjukkan

bahwa prakarsa petani-nelayan dapat menjadi pemicu gerakan pembangunan terpadu di pedesaan.

Magang-Tani di Luar Negeri

Selain dilaksanakan di dalam negeri, magang tani juga diselenggarakan di luar negeri. Sampai saat magang-tani luar negeri baru dilakukan di Jepang. Pada masa yang akan datang, tampaknya perlu dijajagi pula magang tani di negara lain.

Magang-tani di luar negeri memiliki beberapa kelebihan dibanding di dalam negeri, karena para pemegang diantaranya dapat :

- a. Menambah wawasan pengalaman hidup para pemegang dalam sistem budaya yang berbeda dari masyarakat di kampung halamannya.
- b. Menimba ilmu dan teknologi yang lebih tinggi serta mempelajari cara kerja serta pengelolaan usahatani yang lebih efisien.



Haidir, Pemuda Tani dari Sulawesi Tenggara bersama induk semangnya Mr. Kazuyoshi Okita, ketika Magang di Nara Perfecture, Jepang.

- c. Meniru hal-hal baru yang tidak ada di Tanah Air tetapi cocok untuk diterapkan.
- d. Belajar bahasa asing dan memperluas pergaulan di dunia internasional.

Pengalaman para petani muda yang magang di Jepang umumnya sangat positif. Meskipun ada hal-hal yang tidak cocok untuk dipakai di Tanah Air, secara umum mereka mendapat banyak pengetahuan dan keterampilan baru yang berguna untuk meningkatkan kegiatan usahatannya. Beberapa alumni magang Jepang telah menunjukkan keberhasilan yang menonjol setelah mereka kembali ke Tanah Air. Mereka juga diantaranya yang menjadi penggerak magang-tani dan P4S di Indonesia.

* Menurut catatan Departemen Pertanian, saat ini terdapat 253 orang, 42 orang diantaranya adalah wanita, alumni magang Jepang dari 12 angkatan, termasuk 32 orang yang saat ini masih berada di Jepang. Kerjasama Departemen Pertanian dengan Jepang (JAEC) dalam permagangan ini diharapkan masih akan terus berlanjut di masa yang akan datang.

Magang-tani merupakan kegiatan pembinaan sumberdaya manusia pertanian yang sangat strategis, terutama karena dikelola oleh para petani-nelayan sendiri. Dalam perspektif pembangunan nasional yang semakin berwawasan keswadayaan dan kemandirian, magang-tani dan P4S perlu didukung sepenuhnya oleh seluruh aparat pertanian. Para penyuluh pertanian serta widyaiswara pertanian perlu secara khusus memberikan bantuan dan pelayanan kepada pemrakarsa magang-tani dan P4S dan menjadi mitra mereka yang tulus dan akrab.

Lensa



Profesi Penyuluhan Pertanian dalam Kebangkitan Agribisnis

Oleh : *Dudung Abdul Adjid*

Sepanjang perjalanan sejarah modern bangsa kita, khususnya perjalanan sejarah pertanian kita, berbagai kondisi dan peristiwa strategik membentuk sistem pertanian kita menjadi keadaannya seperti sekarang ini. Proses itu terjadi dan berlangsung dengan dinamik, logika dan romantikanya yang unik "Pertanian Rakyat" dengan kedudukan yang unik "informal" dan "Perkebunan Besar" dengan predikatnya sebagai perusahaan (sektor formal adalah dua sistem secara dikotomik sering diberi konotasi predikat "tradisional" dan "modern". Pertanian rakyat dengan akar yang jauh menghujam kedalam sistem sosial budaya masyarakat nusantara dengan basis lingkungan yang terpola dalam ekologi sawah dan ekologi ladang, merupakan suatu sistem yang handal dalam menjamin ketahanan subsistensi bangsa, sebagaimana telah terbukti sepanjang sejarah eksistensi kehidupan masyarakat nusantara kita.



Dudung Abdul Adjid

Ketua Umum
Perhimpunan
Penyuluhan Pertanian
Indonesia (Perhiptani)

Kehadiran sektor pertanian (perkebunan) besar, sebagai lembaga usaha yang dibawa kolonial dalam membangun basis sistem ekonominya, telah memperkaya dan memperluas spektrum, konfigurasi serta cakrawala pertanian Indonesia. Inilah perkenalan kita

pertama kali dengan sistem agribisnis yang berorientasi pasar dunia (ekspor) serta dikelola dengan penerapan kaidah-kaidah industri. Dari sejarah kita juga belajar bahwa eksistensi dan interaksi antara dua sistem yang berlainan watak dan struktur itu telah menimbulkan himpitan kepada pertanian rakyat (pedesaan), yang pada gilirannya menampilkan respons bertahan (survival) yang berorientasi ke dalam (involusi, Geertz). Akibatnya dualisme ekonomi makin tajam, dan pertanian rakyat menjadi sektor tradisional yang statik, karena kemampuannya untuk bertransformasi terkendala isolasi dan involusi.

Meskipun masyarakat kolonial yang berlapis dan diskriminatif dengan lahirnya Republik Indonesia yang merdeka berakhir, tapi kemampuan pertanian untuk bertransformasi tidak serta merta bangkit secara mandiri. Peletakan dasar-dasar pengembangan kemampuan bertransformasi itu sebenarnya sudah dimulai sejak dilaksanakannya kebijakan politik etik dari pemerintah Hindia Belanda. Dengan trilogi "Edukasi, Irigasi dan Transmigrasi" tekanan struktural terhadap masyarakat pedesaan (pertanian rakyat) dicoba diatasi. Edukasi, yang berarti

pengembangan kemampuan dalam penguasaan dan penggunaan iptek, dalam pertanian terlihat dari rintisan pemerintah Hindia Belanda dalam membangun sistem pendidikan, penelitian dan penyuluhan pertanian. Dengan program berwatak evolusioner seperti itu, ternyata tidak berhasil membangun pertanian rakyat yang dapat berpacu dengan memberi unsur program prioritas dan komando. Transformasi pertanian rakyat tidak hanya dibangun melalui "ulur tangan" dan "komando". Sebagai percobaan modus operandi itu tidak berhasil sebagaimana yang direncanakan, karena kurang tersedianya atau belum cukupnya sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan operasional dari program itu. Dengan perkataan lain kondisi rakyat (petani/pedesaan) yang lemah wawasan, lemah iptek, lemah modal dan lemah organisasi merupakan kendala utama dari berkembangnya proses transformasi.

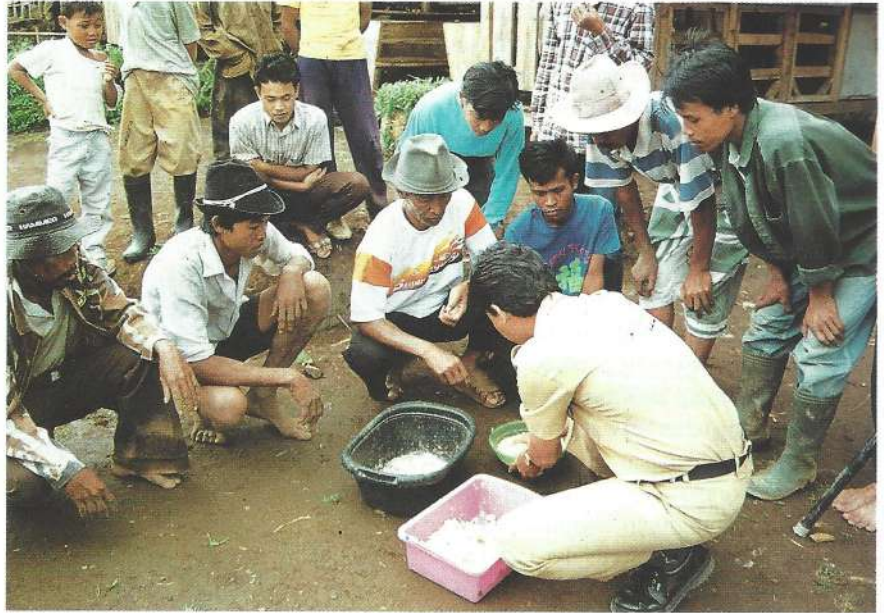
Maka adalah suatu keniscayaan yang alamiah dan mantik, apabila program pembangunan pertanian dikembangkan sejak awal berdirinya Republik Indonesia adalah program yang berdampak kepada proses edukasi rakyat pedesaan untuk mengenal, menguasai dan memanfaatkan iptek sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Isi dari Plan Kasimo dan Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) adalah suatu upaya implementasi dari proses pembangunan pertanian/pedesaan yang bertumpu kepada falsafah, sistem program dan met odik penyuluhan pertanian. Tetapi karena perubahan perilaku (yang diasumsikan sebagai kondisi esensial dari transformasi pertanian melalui proses edukasi dalam penyuluhan pertanian) merupakan proses yang kompleks, maka keberlangsungannya ditentukan juga oleh kondisi internal dan eksternal dari masyarakat yang menjadi wadah ekspresi perilaku tersebut. Alhasil

diperlukan suatu kiprah multi dimensional agar proses transformasi melalui karya edukasi itu berlangsung.

Dalam program Padi Sentra yang dimulai 1958 dan kemudian dipayungi dengan sistem Ekonomi Terpimpin serta Pembangunan Nasional Semesta Berencana, penyuluhan pertanian menjadi salah satu unsur pendukung program intensifikasi, seiring dengan pengembangan institusi penyediaan dan penyebaran sarana produksi, kredit dan pengolahan/pemasaran. Padi Sentra kemudian didukung lebih luas dengan unsur prasarana (irigasi) dan koordinasi (komando) melalui wadah Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM).

Setelah memasuki era pembangunan nasional dibawah kepemimpinan Orde Baru, wadah karya komprehensif program intensifikasi itu, berkembang menjadi Bimbingan Massal (Bimas). Bimas dengan jelas dan ekspresif menunjukkan bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya proses belajar (pengalaman edukatif) yang diertai dengan perubahan kondisi lingkungan (fisik dan ipoleksosbud) yang menyeluruh pada setiap mata kehidupan nasional sampai dengan dan terutama terarah pada perubahan struktural masyarakat pedesaan. Dengan Bimas program dan metodik penyuluhan pertanian membangun diri sebagai kegiatan dari institusi pedesaan yang membimbing petani dengan niat dan kesadaran sendiri berpartisipasi dalam program pembangunan yang berwawasan nasional. Oleh Bimas yang membangun sistem penghantaran masukan (*delivery system*), penyuluhan pertanian ditantang untuk secara profesional membangun kemampuan petani dalam mengembangkan sistem peraih (*acquiring system*). Perangkat penghantar dan perangkat peraih itulah yang menjadi sarana dinamika proses transformasi pedesaan yang mandiri dan dinamik.

Profesi penyuluh pertanian disamping harus berhasil keluar dari masa kritikal penyakit kanak-kanak, juga harus mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan wujud, kebutuhan dan kondisi masyarakat



Kini penyuluhan pertanian telah dengan resmi diakui sebagai profesi, yang bersama dengan profesi penelitian dan pendidikan/guru (*widyaiswara*) melayani masyarakat pertanian/pedesaan dalam kiprahnya bertransformasi menjadi masyarakat pertanian/pedesaan yang maju, efisien dan tangguh. Apabila sampai dengan akhir PJP I ini profesi penyuluhan pertanian masih bergulat dengan masalah-masalah dan penyakit-penyakit kanak-kanak, karena dia harus berjuang untuk eksis dan beradaptasi dengan lingkungan (yang tentu saja mengandung kondisi dan jasad pengganggu); maka menghadapi PJP II mendatang ini tentu saja profesi penyuluh pertanian disamping harus berhasil keluar dari masa kritikal penyakit kanak-kanak, juga harus mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan wujud, kebutuhan dan kondisi masyarakat setelah memasuki era kebangkitan transformasi dinamik yang diantisipasi itu. Proses transformasi masyarakat pedesaan sebagai habitat dari pertanian yang maju, efisien dan tangguh sebenarnya dapat kita baca sebagai proses bertemunya sistem peraih dan sistem penghantar dalam suatu kesatuan sistem

(perangkat) pembentuk nilai tambah yang memberi petani kedudukan adu tawar yang kuat dalam memasarkan produk atau jasa yang dihasilkannya. Satuan perangkat inilah yang kita sebut sistem agribisnis.

Dan sistem wilayah *Unit Desa* yang selama ini kita jadikan sebagai wahana transformasi pertanian padi/palawija sebenarnya merupakan suatu varian dari model agribisnis, yang simpul pertemuannya antara sistem peraih dan penghantarnya berimpit dengan sistem administrasi pemerintahan pada aspek pembinaannya dan KUD pada aspek komersial/finansialnya.

Apabila pada kutub pertanian rakyat telah terjadi proses pertumbuhan kemampuan dan tercipta kondisi dinamik untuk bangkit bertransformasi dengan wahana sistem agribisnis terpadu, maka pada kutub perusahaan pertanian perkebunan besar (yang pada masa kolonial menjadi jangkar sistem ekonominya) telah dan sedang berlangsung proses perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan strategik yang berubah bersama dengan arus perubahan zaman dalam alam kemerdekaan. Perusahaan

perkebunan besar (Onderneming) yang secara sosial ekonomi dan sosial budaya merupakan sistem baru bagi masyarakat pedesaan, pada awal kemerdekaan merupakan bagian dari sektor pertanian yang harus menata ulang landasan dan format eksistensinya, yaitu dari identitas sistem agribisnis yang eksklusif menjadi sistem agribisnis yang terpadu dengan petani. Sistem perkebunan besar, sebagai sistem agribisnis yang berwatak industrial dan berorientasi pasar global, diarahkan menjadi aset nasional sistem agribisnis yang tetap berwatak industrial dan berorientasi pasar global; tetapi yang dalam organisasi dan manajemen-nya tergelar hubungan kemitraan dan manajerial antara pengusaha (Badan Usaha) formal dengan petani yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan tersebut. Maka berkembanglah pola PIR dan pengelola sebagai satuan sistem agribisnis yang berwatak industrial dalam jalinan kemitraan usaha antara usahatani sebagai plasma dengan perkebunan besar dan/atau pabrik (agroindustri) sebagai inti.

Dalam kedua peristiwa itu, kita menyaksikan berkembangnya sistem agribisnis terpadu sebagai sintesa dari dua kutub sistem pertanian yang semula bersilangan itu bergerak menuju titik konvergensi, yang akan membangkitkan energi dan dinamika membangun secara mandiri dan dinamik. Apabila melalui pengalaman Bimas telah berkembang infrastruktur fisik dan sosial (kelembagaan) yang menjadi alat bagi petani untuk menyerap, membentuk dan mengamalkan program-program berwawasan luas (*Outward Looking*) dan berskala besar, maka melalui PIR para pengusaha pertanian telah mendapat instrumen untuk berkarya memimpin/mengelola perkebunan besar yang lahan dan usahatannya berada di tangan petani.

Bagi kita yang berprofesi penyuluhan pertanian melalui kedua peristiwa itu



Kehadiran kaum profesional di pedesaan yang akan melayani dan membantu para pelaku agribisnis dalam mengambil, melaksanakan serta mengawasi keputusan-keputusan dari para pelaku agribisnis.

dengan jelas tergelar palagan kancah interaksi proses belajar dari para pelaku pembangunan sistem agribisnis, yaitu proses mencari, meniru, membentuk, mencoba, mengulang, menyesuaikan, menilai ulang, memutuskan, memperbaiki dan menyempurnakan terus menerus taha lahan yang efektif atau ampuh untuk mengupayakan terwujudnya sesuatu rencana/gagasan/tekad. Jadi apabila pandangan kita arahkan ke masa depan, palagan kancah interaksi proses belajar membangun sistem agribisnis akan menempatkan para pelakunya selalu dalam tekanan kebutuhan untuk mengetahui, memiliki, menguasai dan mahir mempergunakan ilmu, informasi, teknologi, kiat serta alat-lat yang diperlukan untuk merealisasi rencananya. Dengan demikian proses belajar itu menimbulkan kebutuhan dari para pelaku agribisnis akan jasa pemikir, perancang, perekayasa, pelatih, penasehat, penghubung dan pembangkit energi, semangat dan tekad agar proses belajar itu menjadi suatu pengalaman yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dengan perkataan lain proses kelahiran, pertumbuhan, pendewasaan dan pengembangan sistem agribisnis itu membutuhkan kehadiran kaum profesional di pedesaan yang akan melayani dan membantu para pelaku agribisnis

dalam mengambil, melaksanakan serta mengawasi keputusan-keputusan dari para pelaku agribisnis.

Profesi penyuluhan pertanian lahir, berkarya dan berkembang sebagai profesi yang mendampingi petani/masyarakat pedesaan dalam mengarahi gejala gelombang arus perubahan perilaku dalam proses transformasi dari tradisional menjadi pertanian yang berwawasan pasar dan menjadi bagian dari jaringan sistem ekonomi nasional dengan segala kompleksitas nuansa ipoleksosbudnya. Petani dan pengusaha/badan usaha/formal berirekasi dalam proses pengambilan keputusan-keputusan untuk menemukan dan membentuk simpul-simpul pertemuan kepentingan bersama. Pada suatu sistem agribisnis terpadu dengan hubungan kemitraan yang saling tergantung agar saling menguntungkan melalui optimasi nilai tambah, tentu saja diperlukan satu kesatuan citra hubungan industrial dan manajerial yang berdaya guna dan harmonis. Kondisi demikian ini adalah hasil proses belajar yang secara empiris memerlukan pihak ketiga sebagai fasilitator dan pemberi masukan nilai, rekayasa, informasi dan legitimasi (verifikasi). Pelaku agribisnis terpadu yang merupakan subjek mandiri akan memerlukan bantuan pendamping profesional dari berbagai disiplin iptek dalam mengelola usahanya. Kebutuhan akan jasa pendamping pengelola agribisnis ini tidak bisa dipuaskan dengan kualitas para penyuluh pertanian dengan kemampuan profesional seperti

sekarang ini. Penyuluh pertanian tidak bisa tidak harus meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam menganalisa serta mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah agribisnis yang dihadapi oleh pelaku agribisnis yang dilayani. Perhaptani melalui seminar ini mengharapkan terhimpunnya masukan konseptual maupun operasional untuk mengembangkan program penyesuaian dan pelatihan ulang dari para penyuluh yang dapat memenuhi permintaan khalayaknya.

Selain itu Perhaptani juga melihat bahwa kebutuhan khalayak agribisnis yang bersaing dalam suatu pasar terbuka secara global tidak lagi bisa dipenuhi oleh penyuluh pertanian secara perorangan, tapi akan diperlukan tim penyuluh pertanian yang berlatar belakang berbagai disiplin iptek yang bekerja dalam satuan tim konsultan profesional. Karena itu Perhaptani mengharapkan adanya masukan dari seminar ke arah mengembangkan lembaga dan sistem konsultasi agribisnis yang dengan mudah dapat dijangkau oleh pelaku agribisnis kecil di pedesaan.

Kiat



Apabila anda memberikan jawaban yang kurang tepat - Para Peserta akan terus ingat dan mulai meragukan penjelasan, pendapat anda, selanjutnya mereka kurang mempercayai anda dengan akibat mereka tidak belajar



Tidak ada orang yg tahu segala-galanya - lebih baik anda terus terang saja. Dgn. terus terang, menunjukkan bahwa anda ingin mencari jawabannya dan membantu mereka. Atau lebih baik, ajaklah Para Peserta untuk membahas pertanyaan itu dan mencari jawabannya sendiri - Dgn. begitu mereka akan belajar lebih banyak.



Jika anda hanya menyuruh mereka memerhatikan saja, mereka tidak akan belajar bagaimana menganalisa, tetapi sebaliknya cuma akan menghafalkah apa yang anda katakan.



Berikan pertanyaan "Pancingan" yang akan mengarahkan perhatian atau membuat mereka membahas sesuatu lebih terperinci. Mereka akan menanyakannya lebih seksama dan sekaligus menumbuhkan kecakapannya.



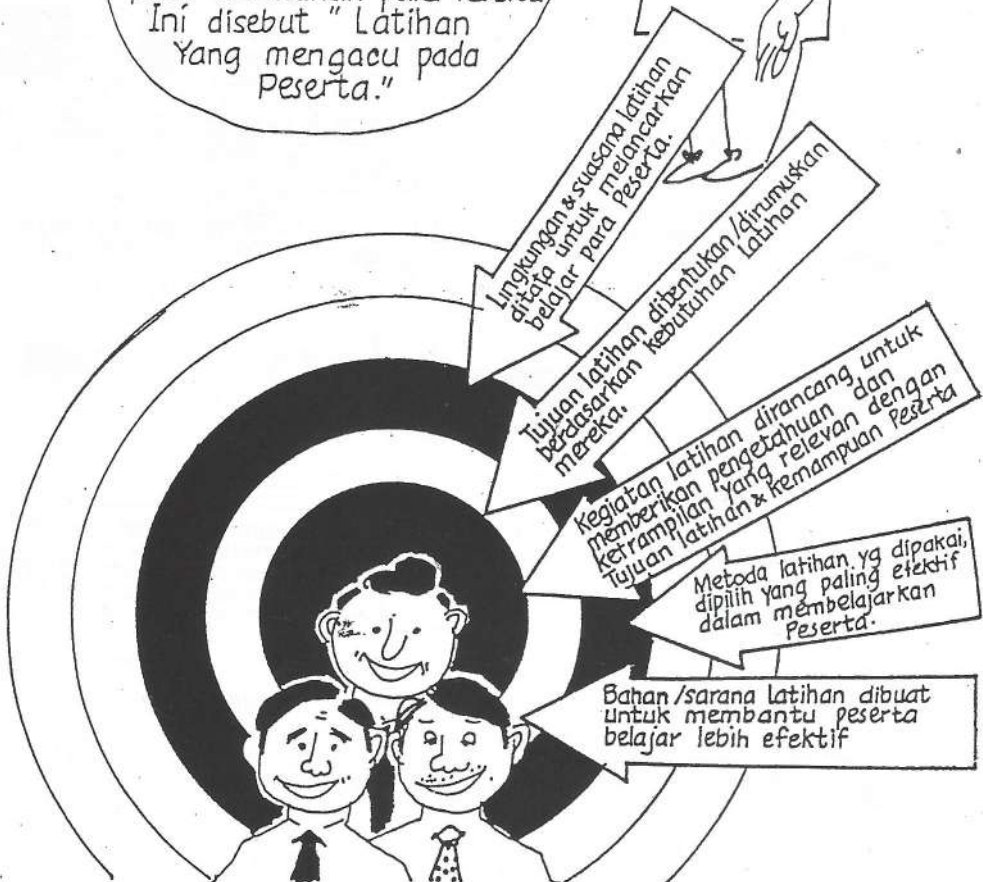
Jika Para Peserta hanya mendengarkan dengan pasif, mereka akan lupa lagi 1/2 dari apa yang anda ceramahkan, tetapi jika mereka melakukan sesuatu sendiri, bukan saja akan diingat terus, tetapi mereka juga memperoleh ketrampilan yang dapat diterapkan nantinya ditempat kerja mereka. Peranan Pelatih sebagai pembimbing dalam proses belajar/ latihan sangat penting, antara lain :

- Mengarahkan perhatian para Peserta.
- Memusatkan perhatian mereka.
- Merangsang / mendorong diskusi
- Mendorong evaluasi oleh para Peserta tentang hasil kerja mereka sendiri.

Kiat

11

Tujuan utama suatu latihan ialah agar para peserta belajar ketrampilan baru - Terutama ketrampilan yang mereka dapat gunakan di tempat tugas - Jadi latihannya didasarkan pada kebutuhan para Peserta. Ini disebut "Latihan Yang mengacu pada Peserta."

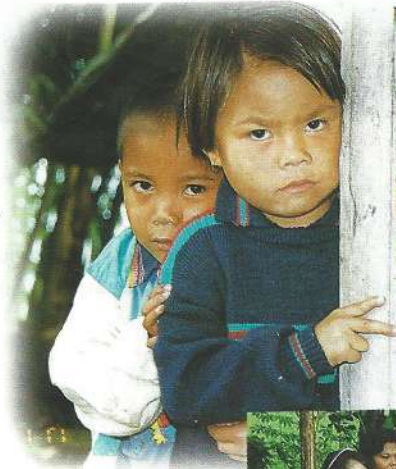


SEGALA SESUATU DALAM LATIHAN HARUS DIARAHKAN PADA PESERTA - APA-APA YANG MEREKA PERLUKAN UNTUK DIPELAJARI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.

JENDELA

Dibalik selentingan geowa revitalisasi BPP, mungkin diantara kita masih ada yang mengintip berbagai GELAR DINAMIKA masyarakat yang tak pernah berhenti, tak pernah tertabankan

Sejuwalah interaksi, dinamika proses diantara penyuluh dan petani nelayan terus berjalan, terus bergelinding, terus mengciprta
Tak terbelindung, mengejar tuntutan kebutuhan yang tak pernah habis.





Disini

dalam kemelekatan dan kedekatan diantara mereka, berbagai gelar dinamika itu dirancang berintikan filosofi pemanfaatan pengalaman sendiri dalam mengembangkan kemampuan manajerial kerjasama dan penerapan teknologi yang menjanjikan nilai tambah.







Sungguh

pada implementasi kegiatan metodologis proses alam belajar mengajar orang dewasa ... sejumlah interaksi dimamika proses itu tidak boleh dilewati, tidak boleh dilangkahi

Tapi proses penjelajahannya harus mampu menyelesaikan dan membangun alam perasaan bermanfaat tidak bermanfaat, berguna tidak berguna serta membangun kearifan dan kemandirian petani nelayan



Menyelami wawasan tanpa batas

Bercengerama dengan wawasan tanpa batas memang gampang-gampang susah, betapa tidak! karena ternyata sangatlah sulit mencari figur orang yang mempunyai semangat, daya hidup pada wawasan tanpa batas tersebut. Umumnya mereka terjebak dalam sikap terkotak-kotak, membatasi diri pada kungkungan selimut diri. Jarang sekali ada orang yang mampu menembus barier diri menerobos wawasan masa depan, dan merespon tuntutan kebutuhan yang seolah tak pernah habis.

Namun dibalik kerumitan wawasan tanpa batas tersebut, ketika sepercik api semangatnya mencerahi segelintir orang terpilih, maka sungguh kehangatan yang sangat nyaman membuat kita larut dan hanyut bercengerama menyelami dan menjelajahi pada kerumitan wawasan tanpa batas.

Pengalaman yang tak ternilai

Apa yang menjadi tujuan rubrik ini, bukanlah sekedar obrolan santai tanpa arah, bukan pula omong-omong kosong tanpa isi, namun disela-sela canda, tawa dalam keakraban bercengerama kadang terdengar lontaran ungkapan pengalaman yang layak untuk didengar.

Semata-mata, hanya karena pengalaman yang teramat berharga itulah rubrik ini diturunkan. Sehingga apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan dialami tersebut melalui perjalanan panjang, kerja keras dan perjuangan tanpa henti, sesungguhnya merupakan pancaran inovasi yang berharga, pengalaman yang memberikan nilai tambah pada lingkungan organiknya. Sehingga, pengalaman tersebut hendaknya juga dapat mengalir, berputar makin membesar saling berbagi dan memberi serta menjadi pengalaman milik kita bersama. Semoga.

Dari topik 'Wawasan Tanpa Batas' yang dilontarkan rubrik CENGERAMA pada ekstensia Volume II yang lalu, ternyata mendapat respon dari tiga orang pelaku yang memang kegiatannya bergerak pada dinamika rentang mata rantai agribisnis. Mereka adalah seorang penyuluh pertanian di kawasan lahan kering, kemudian seorang petani sayur di daerah dataran tinggi dan yang terakhir adalah ketua KUD yang juga berkiprah di daerah dataran tinggi. Penjelajahan pengalaman mereka ternyata sangat unik dan menarik, secara ringkas diungkap sebagai berikut :

Farhan Bulkiyah, Penyuluh Pertanian Kecamatan Utan/Rhee-Sumbawa. Pengalamannya berintikan pada teori pembelajaran masyarakat yang diwarnai filosofi pemanfaatan pengalaman sendiri untuk pembinaan kemampuan memandu dalam proses pembangunan pertanian. Realita yang dia alami, bahwa ternyata untuk menyelami wawasan tanpa batas diperlukan sejumlah penerapan kegiatan secara metodologis. Itu dia temukan setelah kemandegan selama kurang lebih sepuluh tahun, tiba tiba terkuak kesempatan untuk menumpahkan seluruh harapannya (agar petani melirik juga lahan kering, agar petani tidak lagi terpuruk di harga yang sangat rendah), maka dirancanglah sejumlah kegiatan metodologis membangun motivasi petani lahan basah untuk juga

membangun wilayah lahan kering yang sangat menjanjikan. Sedang untuk membangun sejumlah dinamika proses tersebut memang sangat diperlukan dana, baik secara swadaya maupun ada intervensi dari tangan tangan pemerintah, melalui program dan proyeknya. Akhirnya meski pun terasa sangat lamban, hasil kerja dan kenyataan faktual telah menggiring petani untuk juga melirik lahan kering!

H. Mastur Fuad, ketua kelompok tani Pacet Segar - Cianjur. Pengalamannya berintikan pada kepentingan penginderaan pasar sebelum menetapkan komoditas sesuai agroekosistem. Perburuan untuk mencium secara tepat fenomena pasar dilakukan seolah tanpa henti, pasar lokal, pasar induk dan supermarket menjadi sasaran penjelajahan dan perburuannya. Itu saja menurutnya tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan membangun kemampuan organisasi dan manajemen kelompok yang yang tahu peran fungsinya. Hasilnya dinamika kelompok Pacet segar ternyata mampu menjawab dinamika tuntutan permintaan pasar.

H. Kalam Tirtorahardjo, Ketua Koperasi Susu Pujon - Malang. Sebuah kelembagaan ekonomi pedesaan yang dibangun dan menjadi milik anggota, menguak dan merebut peluang ekonomi yang melintas dihadapannya. Dan dengan kreativitas dan motivasinya menerobos wawasan masa depan untuk meraih peluang ekonomi yang lebih menguntungkan. Hasilnya maka KUD milik seluruh anggota itu dari sejak memiliki hutang pada anggota sebesar Rp. 800.095, pada tahun 1970, maka pada saat ini berbalik pada perkembangan yang sangat pesat dengan memiliki aset tidak kurang dari 8 milyar rupiah!

Demikian buah karya mereka dalam menyelami sepeinggal wawasan tanpa batas, pancaran inovasinya minimal telah juga mencerahi kita semua dalam

menjawab tantangan perubahan yang cepat dari lingkungan pertanian dan sifat mudah rusak dari komoditas pertanian, serta kompleksitas dinamika rentang rantai agribisnis.

Betapa pun perilaku utama pembangunan ini memiliki peluang dan kebebasan menciptakan pilihan mereka sendiri dipandu kondisi agroekologi komoditas, yang kelayakannya secara teknis dan sosek terpenuhi. Fenomena dan peluang yang melintas dalam dinamika proses mata rantai agribisnis harus dibaca dalam konteks kebebasan menciptakan pilihan komoditas pada agroekologi tertentu. Sementara teori belajar masyarakat, pada proses pemanduan wawasan tanpa batas terpusat pada faktor dinamika mutu sumber daya manusia, terutama kreativitas dan motivasinya.

Kesemuanya itu, secara strategik mengandung berbagai kerawanan yang bersifat menentukan, yang memerlukan semangat wawasan tanpa batas untuk memberi tanggapan dengan penuh kesiagaan dan secara sinergetik serta berkelanjutan mengembangkan keterpaduan sistem pertanian maju, efisien dan tangguh.

Sepuluh tahun MENGUBAH WAWASAN DARI LAHAN BASAH MENUJU LAHAN KERING

(SEBUAH REALITA PENERAPAN METODOLOGIS)

Oleh : *Farhan Bulkiyah*

Jika yang terjadi ini adalah sebuah kemandegan, maka anggapan kemandegan selama sepuluh tahun itu adalah tidur panjang pada proses penjelajahan untuk memahami misteri wawasan tanpa batas. Seumpama seekor ulat yang kemudian mengalami masa kepompong dalam tidur panjang dan kungkungan selimut diri yang menjadi pembatas dengan dunia luarnya, maka kelak pada suatu hari nanti setelah diam tak bergerak dalam tidur panjang, akhirnya dia pun mampu menguak selimut kepompong dirinya dan dapat terbang bebas lepas seperti burung di keluasan cakrawala yang seolah membentang tanpa batas!



enyelami semangat wawasan tanpa batas yang dilontarkan *ekstensia*, pada kapasitas seorang penyuluh memang merupakan pemburuan yang seharusnya tak pernah henti. Karena tepat seperti diungkapkan *ekstensia*, manakala proses pemburuan itu terhenti para petani kita pun akan terpuruk pada keberlimpahan produksi yang tidak mencerminkan keberlimpahan pendapatannya. Begitu pun di wilayah kecamatan Utan/Rhee kasus seperti itu pun pernah teralami. Kira kira tahun 1975, saat itu pohon kelapa banyak ditanam penduduk, terutama di sepanjang pesisir pantai dan tegalan produksi berlimpah tak beraturan, dibiarkan saja berbuah secara alami dan menghasilkan dengan keberlimpahan produksi yang bukan main. Maka hukum ekonomi pun berlakulah, produksi kelapa yang melimpah ruah dan ada dimana mana, menyebabkan harga komoditi itu pun menjadi sangat murah, ketika itu

harganya hanya Rp. 75,- per butir, padahal biasanya harga kelapa rata-rata Rp. 500,- per butir. Jadi bisa dibayangkan kekecewaan para petani kelapa ini, mengalami hal yang demikian. Sungguh kekecewaan traumatis yang susah dilupakan.

Ketika tersandung pada pengalaman demikian itu lah, maka beramai ramai petani kelapa pun merubah pola usaha taninya. Kebanyakan dari mereka melakukan pengolahan kelapa, menjadi nira/gula merah. Di lain pihak bagi mereka yang masih belum mau melakukan pengolahan hasil, ramai-ramai dalam suatu kawasan tertentu membuat kontrak kerja sama dengan pengusaha di luar Sumbawa dan menyepakati harga tiap butir kelapa seharga Rp. 500,-

Kejadian yang begitu mendadak dan mengejutkan bagi petani kelapa itu ternyata membawa hikmah terselubung, karena dibalik kerugian yang mereka



Farhan Bulkiyah

Sumbawa, 5 Oktober 1952
mulai bertugas sejak 1973
Desa/WKPP Sabedo,
Kecamatan Utan /Rhee
Kabupaten Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat

derita ternyata sekaligus mampu merubah pola pikir mereka untuk mengolah kelapa menjadi nira dan membangun sistem kontrak kerja yang menjamin pemasaran produksi usahatani. Dan perubahan itu terasa begitu cepat walau pun secara tidak sadar harus dibayar dengan sangat mahal (anjloknya harga dari rata-rata Rp.500,- per butir menjadi Rp. 75,- perbutir).

Lain halnya yang terjadi pada komoditas pangan khususnya di antara strata lahan basah dan kering. Sungguh waktu terasa melata lamban bergerak, selama hampir 10 tahun bergulat mencoba merubah wawasan dari lahan basah ke lahan kering, sedang hasilnya hanya "*baru mau akan*", paling hanya segelintir orang yang bergerak dan menyadari wawasan di lahan kering. Belum menjadi gerakan masyarakat yang membangun lahan kering yang menjanjikan! Bagaimana itu terjadi dan mengapa bisa terjadi demikian? Rekan penyuluh dimana pun anda berada inilah petikan pengalaman yang saya alami;

WKPP/Desa Sabedo adalah tempat dimana saya bekerja, termasuk wilayah kecamatan Utan/Rhee Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tinggi tempat berkisar antara 0 sampai dengan 350 meter dari atas permukaan laut, keadaan tofografi sebagian besar berbukit-bukit bergelombang dan hanya 17% daerah datar. Daerah ini mewakili agroekosistem lahan kering dengan curah hujan rata-rata lima tahun terakhir yaitu 146 mm, 47 hari hujan dan 3-4 bulan basah dan 6-7 bulan kering. Secara umum kecamatan Utan/Rhee tempat kedudukannya sangat strategis karena dibelah oleh jalan propinsi yang menghubungkan Kabupaten Mataram di pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa di pulau Sumbawa, kedua kabupaten tersebut adalah kabupaten yang cukup besar dimana berbagai aktivitas hidup manusia tumbuh dan berkembang disana.



Kendala khusus yang dihadapi untuk program pembangunan pangan, adalah kendala keterbatasan lahan sawah produktivitasnya dirasakan sudah maksimal, kemudian di sisi lain adalah kendala perilaku petani yang sulit beranjak untuk mencoba hal-hal yang baru, disertai dengan kemampuan modal yang terbatas yang mengakibatkan ketergantungan yang tinggi untuk meraih KUT. Kesemuanya mengakibatkan kemandegan usahatani yang sulit berkembang di areal lahan sawah ini didukung dengan sikap petani asli yang begitu fanatik dalam menggarap lahan sawah. Dari tahun ke tahun mereka melakukan pola tanam yang itu itu saja. Dari padi ke palawija dan palawija, sementara pendapatan kotor dari padi selama satu musim rata-rata hanya sekitar Rp. 6.00.000,- tiap Ha. Memang demikianlah kapasitas lahan sawah, jika arealnya sempit tentunya tidak akan memberikan tingkat pendapatn yang cukup, sedang peluang untuk percetakan sawah baru terbentur pada biaya yang cukup tinggi.

Sedang di lahan kering yang masih belum banyak dilirik para petani, sebenarnya lebih terbuka peluang untuk

peningkatan pendapatan petani di masa datang komoditas mangga, kacang tanah, dan ternak adalah komoditas unggulan yang dapat diusahakan disana. Sementara para pengusaha dari Jawa memberikan jaminan pasar yang bukan main. Hampir di setiap musim banyak truk yang datang dari Jawa kesini membeli hasil usaha tani para petani disini. Memang hasil usahatani di Kecamatan Utan/Rhee ini pasarnya lebih banyak terbuka di luar NTB ini. Pasar lokal cenderung cepat jenuh.

Selain petani asli masih fanatik dengan lahan sawah, di sepanjang jalan di wilayah lahan kering banyak pendatang spontan dari Bali, yang membuka atau membeli lahan dan dengan ketekunannya menggarap lahan kering yang ditanami berbagai komoditas yang menguntungkan, diantaranya buah anggur yang memerlukan biaya perawatan yang tinggi.

Dibandingkan dengan usahatani dilahan kering, usahatani di lahan sawah pendapatan lebih rendah. Buah mangga arumanis yang di tanam di lahan kering, harga buah satu pohonnya bila ditaksir bisa mencapai harga Rp. 75.000 -

Rp.150.000 . Dalam satu tahun buah tersebut di panen 3x satu tahun ; untuk kacang tanah pendapatan bersih dalam satu musim berkisar antara Rp. 1.300.000 - Rp. 1.500.00 tiap ha. Sedangkan untuk lahan basah yang ditanami padi pendapatan satu musimnya hanya sekitar Rp. 600.000 - Rp. 700.000 tiap ha.

Di sisi lain luas lahan kering ini yang meliputi ladang, tegal dan kebun tercatat seluas 647 ha, sedang lahan sawah yang tofografinya datar dengan irigasi setengah teknis hanya seluas 240 ha. Melihat kondisi alam ini yang didukung dengan data agroklimat yang hanya memiliki 3-4 bulan basah, maka sesungguhnya, potensi lahan kering sangat besar untuk mendampingi lahan basah/sawah dalam peningkatan pendapatan bagi petani di Desa Sabedo, kecamatan Utan/Rhee ini.

Gambaran kondisi di atas, pada hakekatnya telah memacu saya untuk membawa para petani di lahan sawah ke dalam wawasan lahan kering yang menurut anggapan saya lebih menjanjikan keuntungan secara ekonomi. Ditambah dengan peindraan pasar yang



lebih terbuka dan meminta pasokan lebih banyak lagi, serta untuk pemenuhan kebutuhan orang di luar wilayah kecamatan Utan/Rhee sekaligus pemenuhan orang di luar wilayah NTB. Jadi orientasinya pada segmentasi pasar yang lebih luas.

Dari sisi pengalaman berusahatani sebenarnya masyarakat Desa Sabedo ini telah memiliki pengalaman yang cukup luas. Hampir setiap tahapan usahatani telah mereka selami. Dimulai dari membangun kerjasama kelompok baik antar sesama anggota dalam berkelompok, dengan kelompok lain, dengan pihak KUD dan pengusaha swasta. Dimana akan terbukti nanti bahwa dengan berbekal kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam kerjasama ini, akan menjadi senjata pamungkas untuk menyelesaikan segala tantangan yang dihadapi. Pengaturan pola tanam, pengadaan sarana (benih, pupuk, pestisida), kredit usahatani semua dibangun dan diwujudkan dalam gerakan kerjasama tersebut.

Demikian halnya dalam mengatasi kemacetan kredit, tunggakan yang ada di Kecamatan Utan/Rhee ini biasanya tidak lebih dari 10%-30%, bahkan dari sisi mengatasi pengembalian kredit, Kecamatan ini dapat penghargaan dari tingkat kabupaten. Ini semua sebenarnya dibangun melalui kerjasama dengan kepemimpinan wilayah baik tingkat kecamatan mau pun desa. Sejak dari awal memang pola pengelolaan lahan sawah diperkenalkan dengan pola sistem kredit usahatani (KUT).

Di sini petani memang diperkenalkan dengan benih varietas unggul, pemupukan berimbang, dan unsur lain agar dapat meningkatkan produktivitas usahatannya. Pengenalan dengan pola sistem kredit ini memang harus dilakukan dengan hati-hati, sebab salah salah tindakan ini bisa menyebabkan ketergantungan yang tinggi dari petani terhadap unsur-unsur tersebut di atas.

Karena itulah proses pembelajaran petani, harus melalui kaidah-kaidah penyuluhan agar petani siap dan mampu mengembangkan dirinya sendiri.

Dengan bimbingan yang tepat, sebetulnya mereka mampu mengelola modal (KUT), bahkan ada yang bunganya cukup tinggi juga mereka mau dan mampu meraih dan mengelola modal usaha yang ditawarkan dengan bentuk pola kerjasama. Hal seperti ini memang didahului dengan memperkenalkan dan menunjukkan sejumlah manfaat yang ditawarkan pola kerjasama itu. Ini terjadi pada petani yang belum mampu membeli sendiri sejumlah sarana produksi— ketika sudah tiga tahun tidak ada KUT, sedang bagaimana pun kegiatan usaha harus berjalan. Maka dibangunlah kerjasama dengan pengusaha, disini kembali peran penyuluh untuk *me-lobby* para pengusaha agar mau bekerjasama dengan petani. Jadilah kerjasama bibit, dimana keterkaitannya pengusaha pengadaan pangan membeli bibit berlabel dari petani, sedang petani diberi bibit oleh pengusaha berikut sarana lainnya. Pola pengembaliannya dilakukan dengan sistem Barter, dimana





petani yang telah mendapat benih 50 Kg kelak bila panen tiba harus bayar 100Kg benih turunannya. Demikian pula terjadi pada pupuk 1 zak 50 kg pupuk kelak dibayar dengan 150 gabah. Dibanding dengan pola KUT jelas ini lebih mahal, tetapi petani masih mau untuk menerima tawaran tersebut karena kalau dihitung jasa 50 kg pupuk akan dapat menaikkan produksi dengan nilai tambah lebih besar dari nilai 150 kg gabah.

Disini tantangannya, bagaimana kita membangun dinamika proses sistem kerja penyuluhan agar dapat membangun motivasi dan menghantarkan petani pada kesiapan mengikuti program-program. Dulu pada sistem laku, pada pengalaman saya sistem laku ini semua unsur horizontal bergerak vertikal bergerak, maka dinamika kelompok bangkit kembali karena ikatan itu ada tali pengikat antara penyuluh sebagai patner petani dengan petani. Tapi sekarang ini tidak lagi bergerak maka ada hambatan membangun dinamika seperti dulu. Apalagi sekarang tantangannya sudah lain. Memang rasanya masih sangat diperlukan model-model seperti sistem LAKU yang mampu membangun saling keterkaitan keterkaitan.

Pada saat kita memulai program, para penyuluh bersama kepemimpinan formal baik di tingkat kecamatan maupun desa berupaya memahami program apa yang akan dihantarkan pada masyarakat. Disini terjadi proses pemahaman terhadap tujuan program, manfaat program, mekanisme dlsb. Kemudian kepala desa menunjuk orang yang perlu didekati, yaitu tokoh tokoh non formal dan juga para petani untuk memahami aspirasi kelompok tersebut. Kita coba bicarakan, kita membuat pertemuan dimana bisa berembug/bermusyawarah. Baru setelah semuanya jelas, maka kita angkat ke forum desa. Biasanya hadir lebih dari 70%, pada forum tersebut kita sepakati beberapa kegiatan strategis yang menyangkut kepentingan orang banyak (kelompok tani), yaitu antara lain: pengaturan pola tanam, luas tanam, pembagian air, jenis/varietas yang dipakai. Pokoknya kelompok tani menyepakati semua yang telah diputuskan oleh forum. Setelah itu semua terjadi, maka penyuluh menindak lanjutinya dalam rencana kerja pertemuan di tingkat kelompok tani.

Dari sisi penerapan teknologi, penggunaan varietas unggul sangat dominan sekali, sekarang sudah jarang

secara penuh. Sumber air dari mata air yang terdapat di lahan kering dibangun oleh masyarakat bersama pemerintah di lokasi strategis untuk pengairan pertanian di lahan kering. Tindakan itu saja dirasa belum cukup, yang kemudian dibarengi pelatihan/kursus bagi petani, temu usaha, temu wicara dan forum-forum lainnya, agar dinamika kelompok di lahan kering dapat menggetarkan masyarakat pribumi untuk melirik lahan kering sebagai lapangan usahatani mendampingi usahatani di lahan sawah.

Secara metodologis upaya menggetarkan masyarakat, untuk menambah wawasannya ke dalam orientasi yang lebih luas. Pada kenyataan yang saya alami ternyata memerlukan sejumlah dinamika proses pembelajaran bagi petani yang berkelanjutan. Tidak bisa secara parsial kita melakukan sebagian kegiatan yang hanya kegiatan tanpa tindak lanjut. Sebab pada kenyataannya dinamika proses petani bukan satu kali kegiatan lantas selesai. Tetapi sejumlah kegiatan-kegiatan yang terencana yang seolah tak pernah habis (karena menyangkut pembelajaran yang tak pernah habis sepanjang hayat).

Penjelajahan pada sejumlah dinamika proses itulah, kaitannya memerlukan dukungan baik materiil maupun non materiil. Baik piranti lunak maupun piranti kerasnya, dan sejumlah instrumentasi yang menunjukkan indikator keberhasilan dari dinamika proses yang dilakukan. Dari Gambaran ini jelas peran penyuluh mempunyai kedudukan strategis namun sekaligus memiliki kerawanan yang harus diwaspadai. Karena dalam kompleksitas pendekatan agribisnis, maka proses pengambilan keputusan petani untuk memilih komoditas unggulan wilayah, memerlukan kecermatan analisa untuk memahami potensi wilayah dan sekaligus melakukan penginderaan pasar yang berkelanjutan.

Pada kapasitas sebagai penyuluh itulah, maka sejumlah kegiatan seperti demonstrasi, pelatihan bagi petani, temu usaha, temu wicara adalah serangkaian kegiatan yang harus direncanakan untuk memandu petani memahami potensi wilayahnya serta sekaligus petani itu sendiri mampu melakukan penginderaan pasar secara tepat.

Memang sangat terasa, manakala segala keterbatasan baik materiil maupun non materiil menjadi faktor pembatas, maka dinamika proses itu pun bergerak sangat lambat. Apalagi usaha untuk membangun swadaya mereka pun tersandung fanatisme pengelolaan usahatani di lahan basah. Dan yang terjadi adalah selama sepuluh tahun kurang lebih kami mandeg dalam fanatisme di lahan basah.

Sekarang, berbagai kegiatan telah banyak dilakukan. Di desa kami pun ada kebun kelompok, yang juga mempunyai fungsi sebagai percontohan, sebagian besar dari petani telah mengikuti program pelatihan. Sementara di sisi lain masyarakat pada umumnya telah melihat sendiri kesejahteraan para pendatang dari Bali yang mengelola lahan kering, makin lama makin meningkat. Maka ketika pembinaan di desa desa, pada kelompok tertentu keluasan wawasan untuk melirik lahan kering telah menyalakan api semangat pada keinginan bergerak bersama menggarap lahan kering yang masih banyak terlantar.

Demikianlah sepuluh tahun berlutut dalam kemandegan dengan keterbatasan yang ada pada kapasitas penyuluh, sungguh merupakan pengalaman yang teramat mahal. Seolah-olah waktu sepuluh tahun diisi dengan kesia-siaan dan alangkah lambatnya kesadaran datang kemudian. Namun semoga api semangat yang telah menyala itu, mampu menerangi dan mendobrak kungkungan kepompong diri setelah 10 tahun bertapa dalam tidur panjang.

Lensa



Menjawab Dinamika Tuntutan Permintaan Pasar

Oleh : *H. Mastur Fuad*

Pacet Segar, dari dulu hingga sekarang

Kelompok tani Pacet Segar adalah kelompok tani yang memproduksi sayur sayuran dan pemasarannya, pertama kali dirintis oleh H. Mastur Fu'ad pada tahun 1975. Pada awalnya dikelola oleh keluarga sehingga organisasi ini menganut faham famili sistem.

Berlokasi di dataran tinggi di kabupaten Cianjur propinsi Jawa Barat yang berjarak kurang lebih 110 km dari Jakarta. Potensi wilayahnya baik untuk bercocok tanam sayur sayuran khususnya sayur sayuran dataran tinggi.

Setelah beberapa tahun usaha ini berjalan, kelompok ini mendapat pengarahan dan bimbingan dari instansi terkait dan dari perusahaan perusahaan yang telah maju dibidang perdagangan hortikultura khususnya sayur sayuran dataran tinggi. Dengan adanya bimbingan tersebut Pacet Segar dapat meningkatkan produksi sendiri dan dapat pula memberikan bimbingan pola tanam maupun teknik budi daya kepada petani petani lain yang berada disekitar-nya, sedangkan hasil produksinya dipasarkan melalui Pacet Segar untuk memenuhi permintaan konsumen di luar kota.

Upaya yang dilakukan kelompok tani Pacet Segar untuk memotivasi petani petani yang bukan anggota kelompoknya agar mau menanam komoditas yang sesuai dengan potensi wilayahnya serta

berorientasi pasar ialah dengan membuat proyek percontohan yang disertai analisa usaha. Sehingga pada tahun 1980 Pacet Segar mampu memasarkan produksi sendiri dan produksi dari petani lain yang berada disekitarnya ke - 4 lokasi pasar di Jakarta.

Dari tahun ke tahun pengelolaan dan cara pemasaran semakin meningkat sehingga pada tahun 1983 Pacet Segar diangkat sebagai suplier tetap oleh sebuah supermarket yang cukup terkenal di Jakarta. Setelah beberapa tahun menjadi suplier tetapnya maka pada tanggal 5 September 1991 ditandatangani kontrak kerja sama antara keduanya yang diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan dan APPPI (Asosiasi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Indonesia) Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disetujui oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selain itu Pacet Segar bekerja sama dengan HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), kerja sama ini ditujukan membantu pemerintah dalam bidang peningkatan sumberdaya manusia, khususnya bidang Studi Praktek Lapangan tanaman hortikultura.

Atas keberhasilan usahanya Pacet Segar pada tahun 1990/1991 mendapat piagam penghargaan sebagai pengusaha kecil yang berhasil dalam bidang pemasok komoditas sayur sayuran ke supermarket tingkat Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat.



H. Mastur Fuad,
Ketua Kelompok tani
Pacet Segar - Cianjur.

Untuk meningkatkan kerjasama bidang pemasaran sayur sayuran di kecamatan Pacet kabupaten Cianjur dan umumnya di wilayah Jawa Barat, pada tahun 1992 Pacet Segar mendapat pinjaman untuk tambahan modal kerja dari BNI 1946 cabang Cianjur atas referensi dari sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan Pacet Segar.

Organisasi, fungsi manajemen yang terus disempurnakan

Berkembangnya kegiatan usaha kelompok tani Pacet Segar disebabkan upaya perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan organisasi yang terus menerus dilakukan, serta kerja sama dengan para penyuluh pertanian dan instansi terkait maupun pihak swasta yang selalu dilakukan, sehingga setiap tahapan usaha dapat ditangani semaksimal mungkin.

Kelompok tani Pacet Segar yang pada awalnya dikelola oleh keluarga dari tahun ke tahun semakin memerlukan tenaga kerja yang bertambah sehingga sampai saat sekarang sudah mempunyai 20 orang karyawan tetap dan 10 orang karyawan harian.

Untuk mengelola usahanya Pacet Segar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Pemasaran, Seksi Produksi dan Sarana Produksi, Seksi Hama dan Penyakit, Seksi Penanganan Pasca Panen, Seksi Transportasi. Skema struktur organisasinya dapat dilihat seperti dibawah ini :



Kegiatan dari masing masing seksi adalah :

Berawal dari pasar

Ketua Kelompok Tani Pacet Segar selain mengelola pemasaran hasil kebun milik sendiri juga mengelola pemasaran produksi lahan petani anggota, dengan catatan pola tanam petani tersebut ditentukan oleh ketua kelompok.

Untuk memenuhi permintaan konsumen, selain hasil produksi yang diambil dari kebun milik sendiri, maka ketua kelompok mengambil dari anggota. Dan jika hasil dari anggota tidak memenuhi baik mutu maupun kuantitas maka ketua kelompok mengambil dari kelompok lain dan pasar.

Sebagian besar produk dari gudang pengepakan milik Pacet Segar dipasarkan ke supermarket di Jakarta, Bandung, Bogor dan Sukabumi. Sayur sayuran yang dibeli oleh supermarket ada yang dijual sendiri oleh supermarket tersebut, tetapi ada juga yang dipasok lagi ke supermarket lain. Selain memasok sayuran ke supermarket, Pacet Segar juga memasok restaurant khas Jepang dan eksportir di Jakarta dan Bandung.

Jadwal pengiriman untuk masing masing pemesan berbeda, untuk pengiriman ke Jakarta dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Pengiriman ke Sukabumi tiap hari Senin dan Selasa, untuk ke Bogor hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Pengiriman ke Jakarta dilakukan jam 4.00 dini hari, untuk ke Sukabumi jam 7.00 pagi hari, ke Bandung jam 17.00 sore hari bersamaan dengan pengambilan sayuran dari relasi sebagai mitra yang ada di daerah Lembang dan Bandung untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kelompok yang ada di Kecamatan Pacet.

Memproduksi permintaan pasar

Kegiatan produksi dilakukan melalui pola tanam, penyediaan sarana produksi dan pemeliharaan tanaman sampai siap panen.

Jenis komoditas yang ditanam disesuaikan dengan permintaan pasar / konsumen. Lokasi dan musim tanam dari setiap komoditas disesuaikan dengan sifat masing masing komoditas.

Jenis sayuran yang diproduksi dan dipasarkan oleh kelompok tani Pacet Segar berjumlah 55 jenis, antara lain : buncis, brocolli, cabe hijau, cabe merah, kembang kol, jagung manis, kol putih, kol merah, kapri, kacang panjang, paprika, lobak, tomat, wortel, labu siam, kyuri (mentimun Jepang) dan lain lain. Khusus untuk kyuri, Pacet Segar selain memproduksi berupa buah segar juga memproduksi bahan setengah jadi pembuat asinan (*pickle kyuri*).

Pemeliharaan tanaman, terutama dilakukan melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit yaitu menentukan waktu penyemprotan /pengendalian hama. Apabila ada masalah yang tak dapat ditanggulangi maka melapor kepada penyuluh pertanian untuk kemudian ditangani bersama dengan instansi terkait. Ini sepenuhnya ditangani oleh seksi hama dan penyakit.



Penanganan pasca panen, memperoleh nilai tambah

Kegiatan Pasca Panen ini meliputi cara pengumpulan dan pengangkutan, cara penyimpanan, cara pengepakan (*packing*).

Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan merupakan tahap awal dari kegiatan pasca panen yang menentukan kualitas sayuran yang akan dipasarkan. Sehingga dalam tahap kegiatan ini perlu diterapkan teknik yang tepat. Teknik pengumpulan dan pengangkutan yang baik untuk komoditas sayuran adalah :

- Waktu panen dilaksanakan pagi atau sore hari dilakukan dengan teliti.
- Tempat pengumpulan hasil panen terlindung dari sengatan matahari.
- Hasil panen harus bebas dari kotoran, dicuci apabila perlu.
- Hasil panen disimpan ditempat yang teduh dan ditiriskan apabila komoditi tersebut memerlukan.
- Transportasi sebaiknya dilakukan secara tepat dan cepat untuk diproses lebih lanjut.

Semua jenis sayur sayuran yang baru saja dipanen tidak langsung dipasarkan, maka teknik penyimpanannya harus diperhatikan.

Teknik penyimpanan sayuran sederhana dengan benar adalah :

- Komoditas harus bersih dari kotoran
- Penyimpanan tidak bertumpuk - tumpuk dan harus ditunjang dengan alat alat yang sesuai dengan jenis atau kebutuhan masing-masing komoditas
- Sirkulasi udara harus baik.
- Suhu udara disekitarnya harus dingin disesuaikan dengan kebutuhan.
- Bebas dari hama.

Cara pemilihan kualitas (*grading*) adalah proses pemilihan kualitas suatu komoditas berdasarkan ukuran, kematangan maupun bentuknya, pada

dasarnya disesuaikan dengan permintaan pasar/konsumen. Grading kualitas sayuran dilakukan secara manual atau belum memakai alat, biasanya hanya menggunakan tangan atau dengan alat yang mudah pemakaiannya. Cara pemilihan kualitas sayuran yang dilakukan oleh kelompok tani Pacet Segar dengan cara sederhana.

Cara pengepakan (*packing*) merupakan kegiatan pasca panen tahap akhir sebelum pemasaran dan pengawetan. Kegiatan ini juga merupakan aspek kunci dalam usaha komoditas sayur-sayuran sebab akan mempengaruhi selera konsumen dari komoditas sayuran yang disajikan. Tujuan dari pengepakan selain untuk melindungi dari kerusakan juga untuk menambah daya tarik penampilan komoditas tersebut.

Komoditas yang akan dipak harus dibersihkan, disortir, *triming* (pem-





buangan bagian yang kurang menarik) dan *grading* (pemilihan berdasarkan kualitas). Cara pengepakan dari masing-masing komoditas tidak sama, tergantung dari jenis komoditas dan sasaran pemasaran. Untuk pasar tradisional pengepakan dapat dilakukan secara sederhana, tetapi untuk pasar swalayan dilakukan sesuai dengan permintaan masing-masing, biasanya berdasarkan ukuran yang seragam, kebersihan, kesegaran, kematangan dan tingkat kerusakan yang rendah.

Penanganan pasca panen ini, memberikan nilai tambah yang bukan main. Banyak petani yang tidak melakukan kegiatan ini. Akibatnya nilai tambah hasil produksinya diambil bukan oleh petani itu sendiri.

Memperpendek margin pasar

Banyak petani yang tidak menyadari atau berkemampuan untuk memperpendek margin pasar ini, kadang sebagian dari mereka langsung saja menjual hasil usahatannya di kebun mereka itu sendiri dengan harga kebun. Padahal, jika saja ada upaya mereka untuk menjual pada margin yang lebih dekat dengan konsumen, maka tentunya harga hasil usahatani akan lebih baik lagi.

Dengan adanya Seksi transportasi, maka penanganan pengangkutan produksi dari kebun ke tempat pengepakan dapat ditanggulangi dengan baik.

Antara hambatan, upaya penanggulangan dan harapan

Hambatan yang dihadapi oleh kelompok tani Pacet Segar dalam melaksanakan usahanya antara lain :

- a. Tidak tersedianya pelayanan dan penyuluhan dari instansi terkait dalam penanganan pasca panen, misalnya cara pengepakan pasca panen skala besar.
- b. Masih ada komoditas yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijual karena serangan hama yang tidak dapat ditangani oleh petani, bencana alam.
- c. Belum adanya keseragaman sistim penjualan antar supplier yang menimbulkan persaingan tidak sehat.

Jawaban penanggulangan yang dilakukan adalah :

- a. Melaporkan kepada instansi terkait kebutuhan pelayanan pasca panen tersebut.
- b. Melaporkan pada instansi terkait untuk menemukan jenis pestisida yang tepat untuk mengatasi hama tersebut.
- c. Berusaha membuat asosiasi supplier guna mengatasi ketidakseragaman sistem penjualan.

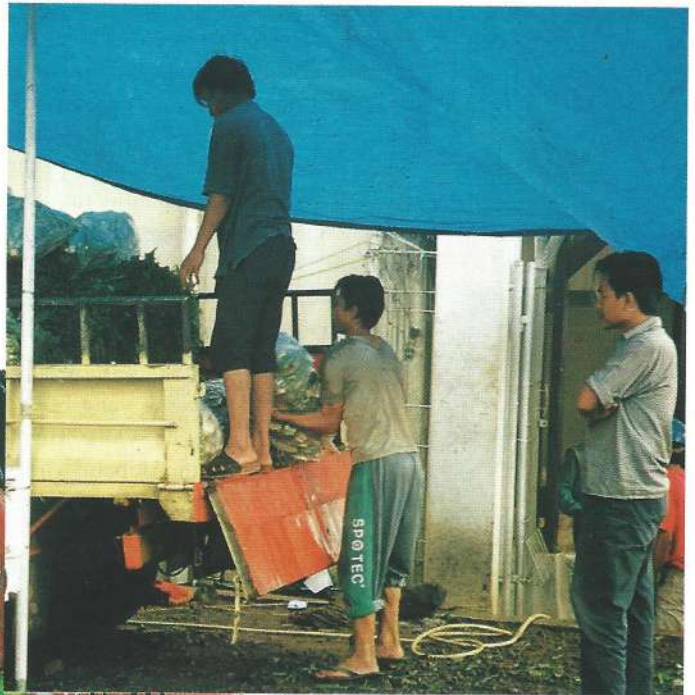
Dengan strategi kemandirian yang dilakukan kelompok tani Pacet Segar dalam mengelola usahanya adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui musim tanam serta lokasi yang tepat untuk membudi dayakan setiap komoditas agar diperoleh hasil yang maksimal.
- b. Membuat rotasi tanaman untuk mengantisipasi berkembangnya hama penyakit.
- c. Selalu mengadakan percobaan untuk melakukan diversifikasi tanaman.
- d. Melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan jenis kebutuhan yang dipasarkan dan mengetahui jenis komoditas yang

- jarang terdapat dipasar tersebut.
- e. Melakukan diversifikasi cara panen misalnya, dulu kapri yang dipanen berupa buah tua kemudian buah muda dan sekarang baby kapri yaitu kapri yang dipanen adalah tanaman beserta akarnya. Contoh lain Labu siam, dulu yang dijual berupa buah yang sudah besar, sekarang yang kecil-kecil dan masih muda.
 - f. Memodifikasi pengepakan dan materialnya, misalnya, dulu hanya dibungkus plastik, sekarang memakai rol film dan foam try, poly-net bag dan sebagainya. Tujuannya

- untuk meningkatkan daya tarik dan harga jual dari komoditas tersebut.
- g. Mengikuti keinginan dan selera konsumen.

Untuk masa yang akan datang kelompok tani Pacet Segar mempunyai cita-cita mengembangkan toko yang menjual hasil hortikultura. Karena daerah sekitar lokasi Pacet Segar merupakan kawasan wisata yang pada akhir-akhir ini banyak dibangun hotel, vila, rumah peristirahatan. Selain itu Pacet Segar selalu berupaya meningkatkan usahanya untuk memenuhi permintaan ekspor.



WAWASAN TANPA BATAS ITU ADALAH KOPERASI

Oleh : *H. Kalam Tirtorahardjo*

Setelah lebih dari 25 tahun menjadi Ketua Koperasi Susu SAE Pujon, Malang, H. Kalam Tirtorahardjo berkesimpulan bahwa wawasan tanpa batas sebagaimana diungkap dalam rubrik CENGERAMA (*ekstensi* volume 2, 1995), tidak lain adalah koperasi. Ia yang telah malang melintang mengalami pasang-surut koperasi yang dikemudikannya sampai kemudian mencapai predikat **sangat mantap** berkeyakinan bahwa koperasi mampu menghantarkan petani mencapai kesejahteraannya. Berikut ini pendapatnya berkenaan dengan topik CENGERAMA edisi lalu: **Wawasan Tanpa Batas.**



enanggapi kasus 'kubis direcah petani yang menanamnya', secara pribadi

di saya telah mengalami dua kali kejadian seperti itu, kendati tidak sama persis. Kejadian pertama dialami tahun 1974, saat mana Koperasi Susu SAE Pujon 'dengan terpaksa' membuang 600 liter susu setiap hari. Kejadian ini bermula dari bangkitnya kembali gairah peternak untuk memelihara sapi perah. Belitan utang koperasi kepada anggota telah terlunasi, sehingga peternak mampu memelihara sapi kembali. Akibatnya produksi naik, sementara pasar yang mampu menampung terbatas. Belum dimilikinya pengetahuan akan pengolahan atau pemanfaatan susu (misalnya diberikan buat pedet atau diolah menjadi tahu), mengakibatkan koperasi 'hanya mampu' membuang kelebihan produksi susu tersebut ke sungai.



*H. Kalam
Tirtorahardjo*

Ketua Koperasi Susu
SAE Pujon, Malang

Jalan keluar dari situasi yang secara finansial merugikan tadi diperoleh

ketika koperasi berusaha mencari informasi guna mengatasi masalah yang dihadapi. Secara kebetulan akhir tahun 1974 diperoleh informasi dari Departemen Luar Negeri bahwa di Waru, Jawa Timur akan berdiri sebuah pabrik susu olahan dan makanan bayi (di kemudian hari pabrik itu bernama PT. Nestle Indonesia) yang sanggup menampung produksi susu dari dalam negeri. Pucuk dicinta ulam tiba! Penjajagan pun dimulai. Dan setelah melalui serangkaian survai dari pihak pabrik dengan ahli-ahli dari Swiss, sejak 1 Mei 1975 Koperasi Susu SAE Pujon diberi kesempatan memasarkan susu segar ke Nestle sebanyak 160 liter per hari dengan harga Rp 90 per liter. Pada saat itu anggota Koperasi Susu SAE memproduksi susu lebih dari seribu liter sehari.

Kejadian kedua dialami pada tahun 1982. Saat itu Koperasi Susu SAE Pujon memasok susu ke Nestle sebanyak 22 ton per hari. Namun karena bertambah-



nya jumlah anggota koperasi, perbaikan genetik dan pengelolaan, produksi susu jadi meningkat. Ada kelebihan produksi susu sebanyak 3 ton, sementara Nestle tidak sanggup menampung karena keterbatasan peralatan yang dimiliki. Kemudian gencarlah pemberitaan di media massa cetak saat itu bahwa Koperasi Susu SAE membuang susu ke sungai. Pemberitaan itu di kemudian hari membawa dampak yang positif. Pada saat itu yang dibuang sebenarnya bukanlah susu sapi, melainkan kandungan air yang terdapat dalam air susu sapi. Pemisahan kandungan air dalam susu ditempuh dengan cara sederhana, tetapi membutuhkan tenaga dan waktu ekstra. Kesemuanya ini dilakukan guna menghindari kerugian yang akan diderita baik oleh koperasi maupun peternak. Dengan usaha pemisahan itu, jumlah susu yang diproduksi tetap mencapai 22 ton sebagaimana kuota yang ditetapkan Nestle, tetapi dengan harga yang lebih tinggi karena mutu susu meningkat. Dengan cara seperti itu harga yang diperoleh peternak dari 22 ton susu sama dengan 25 ton susu sebelum dilakukan pemisahan kadar air.

Dari dua kejadian tadi dapat disimpulkan bahwa pasar bagi produksi susu (juga produksi pertanian lainnya) adalah satu hal yang penting. Tapi itu saja ternyata tidak cukup. Kejadian lain yang dialami Koperasi Susu SAE Pujon pada tahun 1977 menunjukkan hal itu. Pada tahun itu produksi susu anggota Koperasi Susu SAE Pujon telah mencapai 3 ribu liter setiap harinya. Pasokan ke Nestle pun meningkat dari seribu, dua ribu dan bahkan tiga ribu liter. Namun ironisnya, harga susu yang diterima peternak justru menurun dari Rp 90 per liter menjadi Rp 65 per liter. Ketika koperasi mencoba mempertanyakan kondisi tersebut, dijawab dengan enteng: silakan jual ke yang lain kalau tidak mau. Dengan jawaban seperti itu, koperasi memang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima saja, kendati pun dengan mengelus dada. Kalau tidak, kemana lagi harus dijual? Haruskah kembali terulang: Koperasi Susu SAE Pujon membuang susu lagi? Tentu tidak!

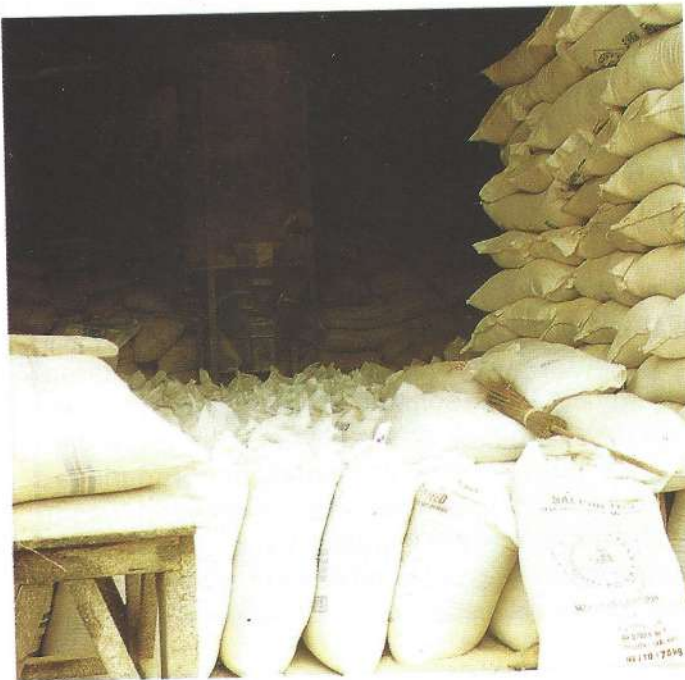
Kesimpulan saya menyatakan bahwa ketersediaan pasar adalah penting. Tetapi kemampuan tawar (*bargaining position*) penting juga dimiliki oleh

petani. Untuk itu ternyata tidak gampang. Mengapa? Karena petani kita sebagian besar tergolong petani gurem dengan pemilikan lahan yang kecil. Peternak pun demikian, pemilikan sapinya sedikit. Bagaimana mereka yang kecil-kecil ini memiliki posisi tawar yang seimbang dengan konsumen, sementara koperasi saja dapat dipandang dengan sebelah mata? Pertama dan hal dasar yang harus dilakukan sebagian besar petani dan peternak di Indonesia adalah bergabung dalam kelompok dan kemudian membangun koperasi. Betul-betul aktif sebagai anggota koperasi yang menggerakkan koperasi dengan selalu berorientasi pada pencapaian kesejahteraan anggota secara keseluruhan. Manifestasi dari keterlibatan anggota seperti itu adalah dengan secara sadar memilih pengurus koperasi yang tepat dan memahami aspirasi anggota, serta mengerti bagaimana menjalankan kelembagaan ekonomi yang berwatak sosial ini. Sebab dalam prakteknya, penguruslah yang menjadi tumpuan anggota untuk secara berkelanjutan menggali peluang dan mengasah wawasan sehingga seakan-akan

menjadi tanpa batas. Hal kedua ialah perlunya campur tangan pemerintah melalui kebijakan dan instrumen ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Penetapan harga dasar komoditas pangan selama ini merupakan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Dengan pendekatan seperti itu, petani memiliki posisi tawar yang seimbang.

Wawasan tanpa batas itu koperasi, adalah juga dengan satu catatan bahwa pengurus mampu mengemudikan koperasi di atas rel menuju kesejahteraan anggota. Ini tidak gampang. Pengalaman selama 25 tahun menjadi ketua memberikan pemahaman pada saya bahwa agar koperasi tidak **oleng** ialah dengan selalu mengembalikan atau memperhadapkan setiap tindakan serta usaha kepada kesejahteraan anggota. Hanya kesejahteraan anggota. Tidak ada yang lain. Dengan prinsip seperti itu, Koperasi Susu SAE Pujon mampu berkembang dari sejak memiliki utang pada anggota sebesar Rp 800.095 pada tahun 1970 sampai dengan saat ini memiliki aset tidak kurang dari 8 milyar rupiah!

Dengan orientasi kepada kesejahteraan anggota itulah maka Koperasi Susu SAE Pujon kini memiliki delapan unit usaha yang melayani anggota, baik dari sisi teknis, ekonomi maupun sosial. Dari sisi teknis ditempuh dengan unit-unit usaha seperti susu, peternakan, sapronak, dan sebagainya. Dari sisi ekonomi, koperasi selain memberikan bantuan kredit dan SHU, juga mendirikan unit simpan pinjam dan warung serba ada. Sementara dari sisi sosial, koperasi memperlengkapi diri dengan unit sosial berupa BKIA dan Kamar Obat yang melulu untuk tujuan sosial. Selain dari itu, koperasi pun sedang merancang program pemberian tunjangan hari tua, sehingga bila seorang anggota karena sudah uzur tidak sanggup beternak lagi, kelak memperoleh tunjangan hari tua. Hampir sama dengan yang dialami oleh pegawai



negeri. Usaha yang direncanakan bakal dimulai tahun 1997 ini juga merupakan perwujudan nyata dari prinsip kesejahteraan bagi anggota.

Setiap koperasi, bergerak dalam bidang apa pun, idealnya seperti itu. Karena dengan demikian anggota akan merasa tenang dan tentram menjalani proses produksinya. Dengan perkataan lain, bergabungnya anggota pada koperasi secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka sebenarnya memiliki wawasan tanpa batas. Persoalannya adalah bagaimana membangun kesadaran petani agar mau berkoperasi secara aktif? Ini bukan melulu tantangan para penyuluh pertanian di lapangan, melainkan juga tantangan bagi para pengurus koperasi untuk menjadikan koperasi memiliki daya pikat bagi petani.



Topik Cengkerama di Volume selanjutnya

PUTING BELIUNG DALAM PENYULUHAN dan INFORMASI "UREA TABLET"

Bak puting beliung, berputar melingkar-lingkar, berpusing berkeliling hingga para petani pusing tujuh keliling. Pusat pusaranya sendiri sebenarnya sebuah titik kecil diujung atas, namun dengan kecepatan putar yang tinggi melahirkan putaran melingkar dan menimbulkan gaya sentrifugal dan sentripetal dalam arus informasi yang kadang tak terkendali. Demikian yang terjadi dalam proses komunikasi dan informasi teknologi *urea tablet* pada upaya pemasyarakatan penerapannya. Beragamnya informasi dan kepentingan dalam upaya pemasyarakatan penerapan *urea tablet* yang disertai dengan intensitas percepatan yang tinggi, telah menimbulkan *gaya sentrifugal dan sentripetal*, gaya yang saling berlawanan dan bertolak belakang dalam membawa muatan isi pesan komunikasinya.

Dilihat dari aspek penyuluhan pertanian, masalah sebenarnya adalah terletak pada proses komunikasi informasi kepada para petani. Ditinjau dari prosesnya, informasi ini seolah bersumber dari hulu dan akan dialirkan ke hilir, yakni dari penemu teknologi kepada pemakai teknologi yang terdiri dari dua pihak yang berbeda. Sebuah proses komunikasi linier, yang justru dalam era tinggal landas sekarang ini proses komunikasi linier ini perlu kita kurangi dan digantikan dengan pendekatan partisipatif yang lebih persuasif edukatif.

Dalam masyarakat kita adopsi inovasi yang berjalan melalui proses linier umumnya akan memerlukan waktu yang cukup lama, terutama bila menyangkut perubahan kebiasaan dan perilaku petani apalagi bila tingkat kesukaran teknologi baru itu cukup tinggi. Penerapan teknologi *tandur jajar* misalnya, untuk memasyarakatkannya diperlukan waktu berpuluh tahun. Dalam konteks *urea tablet* ini kita dihadapkan pada tuntutan percepatan penerapannya, karena teknologi ini merupakan salah satu unsur dalam upaya pelestarian swa-sembada beras.

Di sisi lain kondisi proses komunikasi pemasyarakatan penerapan *urea tablet* sekarang ini tengah dihadapkan pada tumbuhnya **RUMOR** atau sejenis issue atau gosip atau kontra-informasi yang berlawanan dengan muatan isi pesan yang harus disampaikan kepada para petani. Sebagai contoh, tumbuhnya issue atau kontra informasi yang menyatakan bahwa penggunaan urea tablet tidak nyata meningkatkan produksi. Issue ini sudah barang tentu akan menimbulkan keraguan





kepada para petani untuk menerapkan teknologi ini, belum lagi ditambah dengan tingkat kesulitan penggunaan aplikatornya. Terlebih sulit lagi, karena **rumor** ini justru terasa semakin gencar dimuat secara meluas oleh media massa kita baik media cetak maupun elektronik.

Hal serupa telah dialami pula oleh BKKBN dalam pelaksanaan program penggunaan pil KB, dengan mencuatnya issue timbulnya efek sampingan negatif penggunaan pil tersebut. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana upaya kita untuk mampu memproses alih teknologi ini dengan cepat, aman dan lancar sesuai dengan tuntutan kebutuhan upaya pelestarian swa sembada pangan kita.

Tiga puluh ribuan lebih rekan penyuluh pertanian kita tersebar diseluruh pelosok tanah air, dari anda semua tentu telah terkumpul berbagai pengalaman serupa dalam proses melakukan penyuluhan yang dihadapkan pada masalah seperti diuraikan di atas.

ekstensia menghimbau seluruh rekan-rekan penyuluh pertanian, dimanapun anda berada untuk berbagi pengalaman melalui *Rubrik : CENGERAMA*, tempat mangkalnya para penyuluh dan bertemu karya dalam tulisan pengalamannya. Tuliskanlah pengalaman anda, berarti anda telah memberikan sesuatu yang terbaik kepada rekan kita korps penyuluh pertanian yang tengah berkiprah mengatasi dilema ini.

Selamat menulis, *ekstensia* senantiasa bersama anda.



Haji Otong Sutarya

PENGGAGAS TARBU BERCITA-CITA LUGU

Sementara di banyak wilayah mengalir gelombang keprihatinan mengenai kondisi fisik bangunan balai penyuluhan pertanian, justru dari kecamatan Binong di kabupaten Subang, Jawa Barat berhembus angin segar. Angin segar itu berwujud "tarbu" yang mampu dalam "sekejap" menyulap gedung bepepe yang nyaris ambruk menjadi baru kembali bahkan dengan penampilan yang "wow kereen". Tapi ini bukan sulap. Ini kenyataan. Sebab angin yang bernama 'tarbu' ini bisa ditiru dan bisa ditiupkan dimana saja.

Adalah Haji Otong Sutarya yang mula-mula tergelitik pikirannya. Segalanya berawal dari rasa keprihatin-

an terhadap kondisi gedung BPP Binong. Kendati sudah mengalami beberapa kali perbaikan, pada akhir tahun 1994 kerusakan gedung BPP tersebut justru semakin parah. Keprihatinan itu ternyata dirasakan juga oleh Kepala BPP, para penyuluh dan petugas pertanian lainnya yang kerap menggunakan BPP untuk berbagai kepentingan. Kesamaan rasa itulah yang menuntun mereka dan pihak-pihak terkait untuk berkumpul, berurun-rembug, mencari cara pemecahannya.

Saat itulah Haji Otong melontarkan gagasan membangun BPP dengan swadaya petani. Alasannya? "Manfaat BPP begitu besar, ya sebagai tempat bermusyawarah, menyebarkan informasi, memberi rekomendasi usahatani, menyelenggarakan percontohan dan penelitian, juga tempat latihan bagi petani-nelayan, baik petani dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, adalah sesuatu yang wajar bila petani membangun kantor BPP, sebab kita telah banyak merasakan manfaatnya", ujar Haji Otong ketika ditemui Ekstensia di BPP Binong belum lama ini. Gayung gagasan Haji Otong ternyata bersambut. Teman-teman petani mendukung sepenuhnya gagasan itu. Maka mulailah mereka mencanangkan gerakan penggerakan dana petani melalui apa yang disebut 'tarbu' (sehektar seribu). Setiap petani diwajibkan menyisihkan dana





seribu rupiah dari setiap hektar sawah yang dimilikinya setiap musim tanam. Hanya selama dua musim tanam terkumpul dana sebesar 20 juta rupiah !.

Ternyata dukungan mengalir dari berbagai pihak. Bupati, muspika kecamatan, KTNA tingkat desa dan kecamatan, para PPL, partisipasi petani di luar 'tarbu', pengusaha kios saprotan, hasil sawah BPP dan hasil penjualan sisa bangunan lama, menjadikan dana yang terkumpul sebesar Rp. 30.271.000,-. Dengan dana sebesar itu, berdirilah bangunan BPP yang tergolong megah seluas 216m² (24x9) terdiri atas ruangan kantor BPP, aula dan kantor KTNA kecamatan Binong. Sementara aliran listrik di gedung tersebut dibiayai oleh KUD Sumber Makmur. Betul-betul suatu kebersamaan, saling berbagi dan peduli yang demikian padunya !.

Petani bercita-cita petani

Haji Otong dilahirkan 65 tahun silam, tepatnya tanggal 1 Maret 1930. Dia termasuk sosok petani.murni, dalam arti dilahirkan dari keluarga petani dan tumbuh serta besar dalam lingkungan agraris. Karenanya tidaklah mengherankan bila dia mengaku, "*cita-cita saya saat itu hanya akan mengikuti jejak orang tua menjadi petani*". Suatu sikap yang lugu, tetapi justru dihayati dan dijalani secara total.

Otong muda mulai menekuni profesinya sebagai petani secara mandiri

pada usia 20 tahun. Modalnya ? "Ketekunan dan kemauan yang tinggi. Itu saja" akunya mengenang masa 45 tahun silam. Masa itu, yang namanya BPP sekarang dulu adalah Balai Pendidikan masyarakat Desa (BPMD).

Ketekunan dan kemauannya berbuah hasil. Usahatannya makin maju, sehingga tidak mengherankan bila pada tahun 1962 Presiden Soeharto beserta Solichin GP sempat singgah di tempat kediaman Haji Otong. Dalam kancah kepetanian, kiprahnya dimulai dengan menjadi anggota Badan Musyawarah Tani tingkat kecamatan (sekarang KTNA) sejak tahun 1967. Empat tahun kemudian menjadi KTNA tingkat kabupaten dan sejak tahun 1982 menjadi KTNA tingkat Nasional. Andilnya cukup besar sehingga daerahnya mampu

meraih predikat juara lomba Supra Insus Tingkat Nasional pada tahun 1987 dan 1992. Tahun 1987 itu pula Haji Otong memimpin KUD Sumber Makmur. Pada saat ini anggotanya baru 300 orang yang tersebar di 4 desa. Lima tahun kemudian (1992) jumlah anggotanya berkembang menjadi 4.630 orang di 10 desa dengan luas areal 5600 hektar ketika daerahnya dijadikan tempat magang petani dari negara-negara anggota Gerakan Non Blok, Haji Otong ditunjuk sebagai koordinator Induk Semang. Sementara di desanya sendiri. Haji Otong adalah ketua LMD.

Pria yang mempersunting Siti Kulsum dan dikaruniai 8 orang anak (5 putri 3 putra) ini justru tidak pernah melupakan panggilan jiwanya, mesti kesibukannya cukup menyita waktu. Ia tetap bertani, karena ia merasa itu adalah dunianya. Meskipun satu kesibukan lain sudah menunggu bakal menyita waktunya. Sebab ia berniat, akan tetap melanjutkan gerakan 'tarbunya untuk mendirikan suatu yayasan. Wah ! Selamat, Pak Haji ! Semoga berhasil !.

Basuki setiabudi

Bahan. Yulia Tri Sedyawati



J Made Narabuana

MEMBINA 48 KELOMPOK DENGAN KREDIT 78 JUTA TANPA TUNGGAKAN

Sebagai seorang penyuluh, pemikiran - pemikiran liar (wild thought) memang kadang-kadang diperlukan. Tak jarang dari alur pikir seperti ini bisa tersandung pada ide cemerlang atau hal yang mengagumkan.

Penulis, semasih sebagai Pimbagpro P4K di Propinsi Bali tanpa sengaja pernah mencermati laporan bulanan P4K April 1995 yang lalu. Pada laporan tertera kredit yang terserap oleh Kelompok Petani Kecil (KPK) di Bali tercatat Rp. 3,1 milyar lebih. Dengan kalkulasi saku angka di atas penulis bagi dengan 156 yaitu jumlah PPL yang membina P4K di Bali. Sekejap keluar angka Rp. 19,8 Juta. Waw !.....hampir sama dengan satu IDT (Nilai kredit satu Desa IDT Rp. 20 Juta).

Alur pikir liar diatas ternyata menemukan kesimpulan ringan, yaitu seorang PPL pembina P4K sebenarnya cukup mampu membina satu Desa yang terkena IDT. Kalau saja permasalahan di Desa IDT adalah bagaimana mengalokasikan dana kredit Rp.20 Juta bagi masyarakat miskin di Desa tersebut untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, maka melihat perbandingan angka di atas sebenarnya sudah terjawab. Karena setiap PPL rata - rata sudah mengalokasikan kredit Rp. 19,8 juta. Pengembaliannya ? wah sangat lancar, karena tunggakan yang tercatat

saat ini hanya 0,49 %. Untuk di Bali, tunggakan kredit di bawah 1 % sudah dapat dipertahankan lebih dari 5 tahun.

Ketercengangan kita tentu akan bertambah lagi kalau melihat profil I Made Narabuana, PPL pembina P4K WKPP Peninjoan Bangli (Bali) ini. Dengan bekal Latihan Dasar Pembina P4K lebih kurang 4 tahun yang lalu, kini dia sudah menumbuhkan 48 KPK dengan kredit Rp.78 juta tanpa tunggakan. Tak pelak atas prestasi ini dia terpilih sebagai PPL pembina P4K berprestasi T.A 1994/1995 tingkat Propinsi Bali. Bahkan atas prestasi tersebut pula dia sudah sempat melawat ke Malaysia dan Thailand bersama rekannya yang lain dari Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan NTB.

Lelaki serius dengan bahasa Indonesia logat Bali yang medok ini menceritakan kiat suksesnya membina KPK yaitu; tepati janji, jangan kecewakan mereka dan jalin kerjasama dengan semua pihak. Semakin banyak "bekas telapak kaki" PPL di KPK dia yakin akan berhasil ujanya mantap. Disamping itu, materi pembinaan harus mampu menyentuh perasaan dan emosi sasaran secara dalam. Taruhlah contoh masalah kredit.

Saat realisasi kredit di suatu KPK, kita berusaha mengungkap keragaan

kredit di WKPP Peninjoan yang tidak ada tunggakan sampai saat ini. Inilah dipakai momen yang baik untuk menyatakan bahwa "apabila nanti kredit yang dicairkan ini macet, maka sejarah tunggakan akan dimulai dari KPK disini", apakah saudara akan membuat sejarah itu ?. Mendengar pertanyaan demikian dapat dipastikan anggota KPK akan menjawab tidak secara serentak, apalagi yang hadir disana ada tokoh masyarakat, aparat desa dan sebagainya.

Itulah contoh kiat pembinaan yang menyentuh perasaan sasaran yang diceritakan secara gamblang.

Ditanya soal beban tugas dan pengaturan waktu untuk 48 KPK binaannya, dengan tenang dia menjawab justru waktu itulah yang paling kita kuasai dan perlu diatur, asal ada kemauan untuk bekerja saya kira tidak ada masalah. Mungkin karena sikap hidupnya yang demikian disamping ulet, maka dia juga ditetapkan sebagai PPL koordinator untuk wilayah kecamatan Tembuku.

PPL kelahiran desa Blahkiuh tahun 1960 ini beristrikan wanita setempat disamping ulet juga cermat menyimpan data/arsip tentang Kelompok binaannya.

Ini terbukti dari kemampuan dia menyampaikan evaluasi terhadap KPK binaannya. Misalnya data awal pendapatan anggota KPK rata-rata 250,08 Kg beras/org/tin. Setelah dibina 2 sampai 3 tahun pendapatannya menjadi 420,79 kg beras/org/thn. Jadi terlihat kenaikan 68,26% pendapatan anggota KPK sebagai cermin hasil pembinaan. Kalau diperhatikan memang jarang PPL yang sempat mengadakan evaluasi seperti ini.

Kembali ke pikiran liar seperti diatas, sosok I Made Narabuana ini sebenarnya mampu menangani paket kredit hampir 4 kali lipat paket IDT (atau dapat menangani hampir 4 desa IDT). Disinilah terlihat betapa penting metodologi yang harus dipersiapkan untuk menunjang suatu program. P4K dengan 3 strategi, 7 prinsip, 15 langkah dan 11 kunci sukses memang menggalinya dari perjalanan panjang di lapangan selama hampir 15 tahun. Tulisan ini sama sekali bukan untuk membandingkan P4K dengan IDT. Wong namanya juga pemikiran liar !!

Ir. Sudaratmaja, MS
(IP2TP) Denpasar.

Lensa



SUTPA :

Padi Berwawasan Agribisnis

Mereka berenam sedang berembuk serius. Seorang peneliti, seorang Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), tiga orang Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) dan seorang Pengamat Hama dan Penyakit (PHT). Mereka tergabung dengan apa yang dinamakan Tim Pelaksana Pengkajian di Lapangan. Tim ini merupakan pengawal dari suatu Unit Hampan Pengkajian (UHP) dari SUTPA. Sebelum mereka mendapatkan "brevet" pengawat SUTPA, harus terlebih dahulu mengalami penggodokan yang intensif dalam bentuk latihan dan apresiasi oleh suatu tim multi disiplin.

Tim Pelaksana Pengkajian Lapangan ini diberi materi pelatihan yang meliputi berbagai aspek. Antara lain

- a. Paket Teknologi Tanam Benih Langsung (Tabela),
- b. Paket Teknologi Sistem Legowo dan Mina Padi,
- c. Pengenalan Varietas Unggul Baru dalam SUTPA (penggunaan alat mesin pertanian, traktor untuk pengolahan tanah, alat tanam benih langsung, alat pembenam urea tablet, alat pemanen dan alat pengering,
- d. Metoda Pemupukan Spesifik Lokasi,
- e. Pengendalian Hama Terpadu,
- f. Keterkaitan Penelitian dan Penyuluhan,
- g. Pedoman Penyusunan RDK dan RDKK,
- h. Metoda Pencatatan Harian Usahatani,
- I. Sistem Monitoring dan Evaluasi.

Apakah SUTPA itu ?

SUTPA adalah singkatan dari Sistem Usaha Tani berbasis Padi dengan wawasan Agribisnis. SUTPA ini merupakan terobosan Departemen Pertanian/ Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian dalam mengoperasionalkan pembanguan pertanian yang berwawasan agribisnis.

Dalam SUTPA ini diharapkan dapat ditemukan pola pengembangan usahatani berbasis padi untuk mengatasi kejenuhan peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi sistem produksi melalui rasionalisasi penggunaan sarana produksi, penggunaan varietas unggul baru dan benih bermutu tinggi serta pemanfaatan alat mesin pertanian, meningkatkan daya saing komoditas dan pendapatan petani dalam sistem usahatani setahun berbasis padi, merubah sikap petani dari subsistem menjadi progresif dan berorientasi agribisnis.

SUTPA menggunakan pendekatan partisipatif dan multi disiplin, yang dilaksanakan menjadi program nasional dalam bentuk bimbingan massal. dari pengkajian ini diharapkan dapat ditemukan dan disempurnakan sistem Bimas Baru yang mampu menghadapi perubahan lingkungan antara lain penerapan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya tanaman, desentralisasi pembangunan pertanian dan globalisasi ekonomi dunia.

Pelaksanaan Teknis

SUTPA dilaksanakan di 14 Propinsi dengan luas 14 ribu Hektar. Terdiri dari 92 Unit Hamparan Pengkajian (UPH). Setiap UPH terdiri dari 500 Ha. Propinsi yang melaksanakan SUTPA adalah DI Aceh (2.000 Ha), Sumut (3.000 Ha), Sumbar (4.000 Ha), Lampung (4.000 Ha), Jabar (6.500 Ha), Bali (1.000 Ha), NTB (2.000 Ha), Sulut (2.000 Ha), Sulteng (2.000 Ha), Sulsel (4.000Ha) dan Sultra (3.000 Ha).

SUTPA dilakukan pada lahan sawah irigasi teknis yang memungkinkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) minimal menjadi 300 %.

Pada setiap UPH, pengkajian dilakukan pada pola usahatani dengan introduksi teknologi tanam benih langsung (Tabela), Pemupukan spesifik lokasi, penggunaan varietas unggul baru (Memberamo dan Cibodas). Perencanaan kegiatan usahatani disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi melalui pendekatan partisipatif dan kemitraan yang dilakukan oleh tim yang multi disiplin. Sedangkan peta sebaran varietas terutama Memberamo dan Cibodas dilakukan berdasarkan lokasi sebaran hama, penyakit dan pilihan petani.

Didukung dengan Alsintan (Seeder, Urea Aplikator, Mini Combine Harvester) dan memobilisasi Alsintan yang telah ada seperti traktor, alat perontok gabah dll.

Teknologi Tabela memungkinkan mencapai IP lebih tinggi, karena umur padi menjadi lebih pendek. Petani tidak perlu lagi menyemai padi lalu menanamnya kembali di sawah, sehingga jumlah tenaga kerja dan biaya produksi dapat ditekan. Disamping itu, jumlah bulir per-malai lebih tinggi, karena pada sistem Tabela malai yang ada berasal dari tumbuhan induk, bukan dari tumbuhan anak seperti pada sistem tanam pindah.

Dalam program ini diperkenalkan antara lain prototype Alat Tanam Benih Langsung (ATABELA) tipe tarik enam alur dan Alat Pembenam (Aplikator) Urea Tablet tipe tarik 2 alur AMINI III untuk komoditas padi.

Teknologi Alsintan lainnya yang diintroduksi adalah alat panen (Stripper dan Mini Combine Harvester) serta alat pengering (Dryer).

Jadi program SUTPA ini didukung oleh input produksi yang padat teknologi termasuk di dalamnya upaya peningkatan dayaguna teknologi alsintan yang telah ada dan dikenal baik oleh petani (traktor tangan, sprayer, penyiang, pompa air, sabit gerigi, perontok padi).

Dengan demikian, biaya produksi usahatani berbasis padi diperkirakan dapat ditekan sampai 40-50 % perhektar. Maka diharapkan daya saing komoditas dan pendapatan usahatani dapat ditingkatkan. Pada akhirnya akan mampu mewujudkan petani progresif dan komersial dengan wawasan agribisnis dan meningkatkan keterkaitan vertikal antar subsistem agribisnis dalam pertanian modern.



Tiga musim tanam

Untuk keperluan pengkajian, maka dalam luasan 50 ha/UPH, dirancang pola usahatani satu tahun terdiri dari padi sistem tanam benih langsung (tabela), padi dengan sistem legowo dan minapadi legowo. Pengaturannya dilakukan demikian :

Musim Tanam I	Musim Tanam II	Musim Tanam III
Padi Tabela	Padi tabela	Padi tabela
Padi Tabela	Padi Tabela	Sayuran
Minapadi Legowo	Minapadi Legowo	Palawija
Padi Legowo	Padi Legowo	Palawija
Padi Legowo	Padi Legowo	Sayuran

Komoditas palawija (kedelai atau jagung), sayuran (bawang merah, cabai atau kacang panjang) dan ikan (minapadi atau ikan penyelang) merupakan komoditi komplemen yang ditata dalam usahatani setahun dan diusahakan setelah dua kali musim tanam padi.

Catatan Harian

Sebagai upaya pengkajian, maka pengumpulan data yang akurat dan dapat dipercaya merupakan luaran yang utama. Oleh karena itu diperlukan adanya catatan harian (farm recording keeping) yang harus diisi oleh petani.

Kegiatan ini juga merupakan media bagi petani peserta agar membiasakan diri dengan mencatat segala aktivitas mereka yang menyangkut masalah pengeluaran dan penerimaan.

Farm recording juga dapat digunakan untuk melihat apakah kegiatan SUTPA ini dapat meningkatkan pendapatan petani atau tidak. Monitoring catatan harian petani perlu dilaksanakan secara seksama.

SUTPA Sumut, Suatu hasil perdana

Propinsi Sumatera Utara mencoba SUTPA pada areal 3.000 Ha. Dilaksanakan pada 6 Kabupaten, yakni Langkat, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan.

Panen perdana telah dilakukan oleh Menteri Pertanian Dr. Sjarifudin Baharsjah pada pertengahan bulan Januari 1996 yang lalu. Lokasinya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang.

Hasil ubinan menunjukkan produktivitas 8,85 ton/ha. "*Keunggulan sistem SUTPA ini telah dibuktikan oleh hasil ubinan. Produksi ini cukup membanggakan, karena biasanya produksinya hanya 6,5 ton*", demikian ungkapan Menteri Pertanian sesuai pemotongan malai padi menandai panen perdana.

Padi varietas Memberano, yang di lepas Mentan tanggal 4 September 1995 yang lalu memang mempunyai banyak keunggulan. Daya hasilnya sekitar 6,5 ton perhektar gabah kering giling, lebih tinggi 15-20 % dari varietas sebelumnya.

Gabah isi permalai sekitar 200 bulir, dibandingkan varietas lainnya yang hanya 130-150 bulir. Kelebihan lainnya tahan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3. Tahan hawar daun bakteri strain III dan agak tahan virus tungro.

Jangan dilupakan mereka-mereka yang telah berprestasi menghasilkan varietas baru ini. Para pemulia itu adalah T. Soewito, B. Kustianto, Allidawati, Adijono, Susanto TW dan Dr. Z. Harahap.

Godlim Panggabean

Lensa



Strategi Penyuluhan Peternakan di Perkotaan

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Nasional. Di dalam pembangunan pertanian, penyuluhan mempunyai peranan yang sangat penting, dimana penyuluhan harus ditempatkan dalam konteks yang lebih pokok yaitu penyuluhan untuk pembangunan. Sehingga pada akhirnya tercapai kesejahteraan bagi petani peternak.

Sasaran utama penyuluhan peternakan adalah petani peternak yang tergabung dalam wadah kelompok tani ternak. Wadah ini mengalami pengembangan karena selain pria sebagai petani peternak, wanitapun juga terlibat secara langsung dalam kelompok wanita ternak. Kelompok-kelompok ini merupakan kumpulan petani peternak yang memelihara ternak dan terikat secara non formal dalam suatu wilayah kelompok yang bekerja atas dasar saling asih, saling asah dan saling asuh sehingga tercapai keberhasilan usaha taninya. Kelompok ini dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus.

Penyuluhan peternakan sebagai jalur pendidikan non formal selalu menempatkan petani peternak sebagai sumberdaya manusia yang secara aktif dan dinamis selalu berusaha dan mencoba teknologi baru sehingga tercapai suatu manfaat dan tujuan yang dapat dirasakan

oleh seluruh anggota keluarga. Petani peternak yang bertempat tinggal di perkotaan diperlukan penyuluhan yang terarah dan lebih meningkatkan motivasi untuk berusaha secara optimal. Karena lahan di perkotaan yang setiap tahun mengalami penyusutan yang disebabkan alih fungsi untuk pembangunan gedung atau sarana jalan.

Oleh karena itu upaya pembinaan terhadap petani peternak lebih ditekankan pada kelompok dengan satu bahasa, satu gerak dan satu pengertian tanpa dipaksa oleh tenaga penyuluh. Hal ini karena motivasi dan pembinaan petani peternak selalu ditingkatkan dengan adanya sumber-sumber informasi baik melalui media cetak maupun media televisi yang dapat memacu tingkat perkembangan dan keingin-tahuan petani peternak.

Dengan dasar itulah kiranya tenaga penyuluh ataupun tenaga struktural yang ikut terlibat dalam pembinaan dan penyuluhan terhadap petani peternak ditekankan kepada peningkatan kualitas baik secara agro-industri maupun agribisnis yang lebih dari petani peternak. Sehingga setiap muncul permasalahan, tenaga penyuluh mampu mengatasi.

Selain dari pada itu untuk meningkatkan penyuluhan peternakan diperlukan adanya kreatifitas dan masukan dari setiap anggota, karena keberadaan anggota di suatu kelompok dapat

Kita berceloteh tentang opini, harapan, kondisi faktual, komentar terhadap kiprah penyuluhan pertanian baik itu yang terjadi di lapangan maupun hal-hal lain yang kiranya perlu untuk diketahui oleh pembaca *ekstensia*, *ekstensia* menerima celoteh para pembaca untuk dapat dimuat dalam rubrik CELOTEH.

Tulisan bersifat ringkas dan dikirimkan ke *ekstensia* dengan dilengkapi identitas penulis (foto copy KTP/SIM/Karpeg dll). *ekstensia* akan memuat tulisan yang lengkap dan berwenang untuk memutuskan tulisan yang akan dimuat.

memotivasi perkembangan tanpa mengesampingkan keberadaan anggota. Setiap anggota perlu diikutsertakan dalam kursus tani ataupun widyawisata ke petani peternak yang lebih maju. Disini diperlukan kebesaran jiwa ketua kelompok untuk merelakan anggotanya untuk maju dan terlibat langsung dalam keikutsertaan kegiatan tersebut di atas. Tidak hanya ketua atau pengurus saja yang selalu mengikuti kegiatan tersebut tetapi anggotapun dapat memperoleh kesempatan tersebut. Disinilah peranan tenaga penyuluh untuk menginformasikan dan menseleksi anggota yang dapat secara aktif mengikuti kegiatan tersebut.

Kemampuan petani peternak di perkotaan cukup tinggi dan kritis dalam menyerap dan menerima informasi yang diperoleh, Sehingga dituntut kemampuan para penyuluh untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah tanpa

ditunda-tunda dan diselesaikan secara tuntas. Hal tersebut apabila tidak mampu dikuasai oleh penyuluh, maka petani peternak akan mencari sumber informasi lain untuk mengatasi masalahnya.

Selain itu juga perlu adanya kebersamaan diantara pengurus dan anggota dalam perencanaan ataupun pelaksanaan. Sehingga anggota dapat mengetahui secara dini kegiatan tersebut dan merasa terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan upaya-upaya tersebut di atas, diharapkan adanya motivasi dari tenaga penyuluh untuk meningkatkan diri yang lebih karena menghadapi petani peternak di perkotaan yang sarat dengan informasi dan sarana peternakan.

Ir. Agus Hidayat

Ka. Sie Peternakan Kecamatan
Duren Sawit – Jakarta Timur

Suatu Senja Di Sebuah BPP Pada Awal Abad XXI

Seorang Ajun Penyuluh Pertanian bersama-sama pemuda tani terlihat cermat menatap sejumlah data yang diakses melalui Jaringan Informasi Penyuluhan Pertanian (JIPP) yang ditayangkan layar pantau sebuah PC yang terletak di atas meja komputer di samping kiri meja kerjanya di sebuah ruang kerja di sebuah BPP. Sementara itu, di atas meja kerjanya terlihat beberapa brosur informasi pertanian dan jurnal penyuluhan pertanian berbahasa Inggris.

Di sebuah balairung yang cukup luas, seorang Ahli Penyuluh Pertanian Madya tampak sedang menjelaskan suatu teknologi baru dengan menggunakan OHP di hadapan sekelompok

Penyuluh Pertanian yang terlihat menyimak penuh gairah.

Di sebuah ruang rapat pada bagian lain BPP itu dua orang Penyuluh Pertanian, masing-masing seorang Penyuluh Pertanian Pratama dan seorang Penyuluh Pertanian Muda, sedang membahas konsep program penyuluhan bersama-sama seorang Peneliti dan beberapa Kontak Tani.

Pada sebidang lahan di bagian belakang BPP, terlihat seorang Asisten Penyuluh Pertanian Madya asyik berdiskusi dengan seorang petani yang duduk mencangkung di atas sebuah traktor mini. Sementara itu, nun jauh di ufuk barat sana, sang mentari tampak perlahan-lahan menggeliat menuju ke

peraduannya. Dan siluet dua insan kamil yang penuh dedikasi itupun lambat laun sirna ditelan senja yang kian menua

Tulisan tersebut di atas merupakan, katakanlah secercah harapan penulis tentang BPP dan sosok Penyuluh Pertanian di masa depan. Tulisan itu pernah disodorkan dihadapan 29 orang PPS dari tujuh propinsi yang sedang mengikuti Pelatihan Dasar PPS di balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pertanian, Ciawi, serta sekitar 80 orang Penyuluh Pertanian dari DKI Jakarta. Sebagian menyatakan bahwa itu pun

merupakan harapan mereka; sedangkan seorang PPS dari DKI Jakarta mengatakan bahwa tulisan itu "menggelikan", karena faktanya keadaan BPP dan Penyuluh Pertanian (?) dewasa ini sangat menyedihkan. Bertolak dari keadaan itu, seolah-olah ia ingin menegaskan bahwa "mana mungkin kita memiliki BPP dan Penyuluh Pertanian yang begitu wah!" Nah, para pembaca **ekstensia** yang budiman, apakah Anda akan berpendapat demikian juga? Ataukah, Anda punya pendapat lain?

Hardono Tedjokoesoemo
Pusat Penyuluhan Pertanian

Bercengkerama dengan ekstensia

Apa yang disajikan **ekstensia** kadang membuat hati yang dekat dengan dunia penyuluhan ini trenyuh. Betapa tidak, sebab segala apa yang disajikan **ekstensia** seolah membawa saya pada nostalgia ketika BPP masih menjadi milik kami para penyuluh, yang tidak dibatasi hegemoni sektoral.

Pada ketika itu, semua penyuluh selalu berkumpul dan berkumpul. Ada atau tidak ada kegiatan kami berkumpul! Pada saat berkumpul kita bisa bicara apa saja, latihan, kunjungan ke patani, target-target yang harus dicapai, kursus-kursus, dan seabreg laporan yang diselesaikan pada tiap bulannya, sampai kepada berbagai persoalan yang di luar batas jangkauan dinas kami.

Rasanya seberat apa pun tugas yang menjadi tanggung jawab kami, pada akhir dapat selesai, dan seolah tanpa beban karena ada kebersamaan sesama rekan penyuluh. Yang secara spontanitas selalu saling bantu.

Ketika itu, rasanya kami punya tempat yang dituju, setidaknya-tidaknya di

tiap minggu kami punya target-target yang harus di capai, punya tujuan-tujuan yang menjadi kesepakatan untuk diwujudkan. Sungguh kejelasan tempat target dan tujuan itu kadang menghangatkan badan kami dan membuat jiwa ini lebih bersemangat.

Kehangatan dan semangat semacam itu kini dihidup hidupkan lagi oleh **ekstensia**. Kehadirannya seolah cengkerama jarak jauh dari berbagai rekan penyuluh, yang terpisah oleh dimensi ruang dan waktu namun menjadi dialogis karena kehadiran **ekstensia**.

Bravo **ekstensia**! semoga gaung mu mampu menghidup-hidupkan kembali atmosfer penyuluhan dalam gairah menjawab tantangan masa depan, membangun kemandirian petani nelayan kita pada proses belajar mengajar orang dewasa!

L. Karman Yamin

Penyuluh Pertanian BPP Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat

Balada Penyuluh Tua

Desember 1970 kuinjakkan kakiku dibumi Wonosobo mengawali tugasku sebagai seorang penyuluh pertanian di kecamatan Kalikajar. Rasa senang menyertaiku mendapat tugas di daerah pegunungan yang sejuk dan subur dileheng gunung Sumbing yang selalu diselimuti sayuran hijau. Hari-hari berikutnya kujalani dengan mengadakan penyuluhan keluar masuk desa dengan berjalan kaki, maklum saat itu transportasi di daerah pegunungan masih sulit.

Setelah berjalan 3 tahun aku pindah ke kecamatan kertek, di daerah baru ini selain sebagai penyuluh (PPL) aku disertai tugas pula sebagai pemimpin BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa) Kertek, yang akhirnya kuketahui bahwa aku adalah pemimpin BPMD termuda di Jawa Tengah pada waktu itu. Ada rasa bangga padaku karena pada tahun 1976/1977 BPMD ku menjadi juara I lomba BPMD se Ex Karesidenan Kedu.

Seiring dengan kebijaksanaan penyuluhan pertanian maka pada tahun 1977 BPMD tersebut ditingkatkan fungsinya menjadi Balai Penyuluhan Pertanian. Akupun dipercaya sebagai PPM Programmer/ Pimpinan BPP Kertek, bersama teman-teman penyuluh aku berkiprah sehingga pada tahun 1984/1985 BPP ku menjadi juara I lomba juara I BPP se Ex Karesidenan Kedu.

Pada tahun 1987 aku dipindah tugaskan lagi di BPP Wonosobo dan dipercaya sebagai PPUP sumber daya/pimpinan BPP. Setelah kujalani selama 3 tahun aku dipindah tugaskan di Sekertariat Pelaksana Harian Bimas Kabupaten pada staf perencanaan disekretariat Bimas kujalani selama 4 tahun sampai turunnya SKB Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 539/KPTS/LP.120/7/1991 dimana semua penyuluh harus ditugaskan di lapangan (WKPP). Maka kini di hari-hari tuaku aku kembali bertugas keluar masuk desa setelah 20 tahun lebih kutinggalkan. Ternyata kini saudara-saudaraku para petani telah jauh berubah jauh lebih maju segalanya. Para pemuda tani yang dulu saya bina sekarang telah menjadi petani yang berhasil, mereka telah berusahatani modern, mereka telah mengenal agribisnis, rumah mereka megah apabila pergi ke kota tidak lagi memakai kuda angkut lagi seperti dulu tetapi mobil Jepang telah menjadi titihan mereka. Rasa bangga kembali timbul dalam hatiku, inilah buah karyamu wahai para penyuluh pertanian yang telah dinikmati oleh para petani. Dan dihari-hari tua ini akupun berjanji akan terus berjuang sampai nanti .

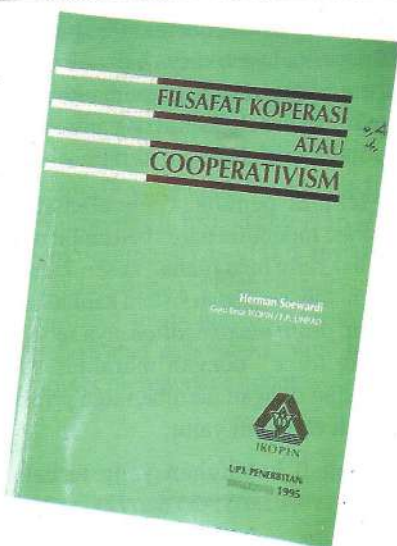
Endrogini HS

PPL WKPP Wonosobo I Kec. Wonosobo
Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah

Herman Soewardi

FILSAFAT KOPERASI atau COOPERATIVISM

UPT PENERBITAN IKOPIN, 1995
(161 halaman)



Fenomena perkembangan koperasi merupakan suatu aspek yang menarik untuk disimak karena bukan saja menyangkut perkembangan secara fisik organisasi ekonomi tetapi juga mengandung aspek filosofi yang mendasari tumbuhnya suatu kelembagaan yang bernama koperasi

Buku "Filsafat Koperasi atau *Cooperativism*", membahas koperasi dari sisi yang langka dijamah yaitu bagaimana penulis meletakkan kerangka konsep dasar koperasi dalam tatanan aspek normatif dengan nafas keislaman.

Berangkat dari konsep dasar sosiologi, penulis mencoba untuk menarik benang merah filosofi yang mendasari perkembangan koperasi di Indonesia dengan menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan koperasi akan sangat tergantung pada kualitas insan koperasi yang mempunyai keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya, etos kerja serta nilai-nilai instrumental normatif yang menyangkut moralitas dan spiritual.

Bagian pertama dari buku ini terdiri dari tujuh bab yang membahas mengenai Dasar-Dasar Sosiologi Koperasi mulai dari pemulaan pemikiran sosiologi koperasi hingga kegunaan

sosiologi koperasi. Pada bagian ini penulis memaparkan pertumbuhan koperasi Indonesia ditinjau dari teori dan proposisi sosiologi koperasi dimana koperasi di Indonesia melewati suatu alur : "Static Expansion" - "Fase Pematangan" - "Tinggal Landas" - "Steady Growth" yang diselingi dengan beberapa kali "Levelling Off".

Dalam bagian ini pula dijelaskan bagaimana Gerakan Koperasi pada dasarnya merupakan sesuatu yang khas milik bangsa Indonesia. Struktur koperasi memang diadopsi dari luar tetapi batin koperasi seperti musyawarah dan mufakat adalah khas Indonesia, sedangkan mengenai gerakan koperasi itu sendiri penulis menyatakan gerakan koperasi memang dengan sengaja diwujudkan dan keanggotaannya dikembangkan sehingga akan muncul insan-insan koperasi yaitu orang-orang yang memilih kehidupannya berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Koperasi Indonesia bukanlah koperasi dengan falsafah Barat. Koperasi Indonesia mempunyai landasan moral yang disebut kooperativisme dengan cinta sebagai landasannya. Inilah inti yang dibahas pada bagian kedua dari buku ini. Diawali dengan resensi terhadap buku Sven Ake Book, "Nilai-nilai Koperasi

Dalam Era Globalisasi”, penulis memaparkan analisisnya bahwa kondisi koperasi seperti yang digambarkan Ake Book bukanlah kondisi yang ingin diwujudkan oleh koperasi Indonesia.

Menurut penulis, “penyelamatan” koperasi Indonesia harus bertumpu pada satu hal yaitu mengganti “keselekahan” yang notabene adalah sistem kapitalisme dengan *profit maximization*-nya sebagai *driving force*” dengan moralitas atau kehanifan dengan merubah tiga prinsip falsafah ekonomi yaitu;

1. menjadi kebutuhan yang terbatas (QS. Al-A'raf 31-33 dan Hadits Nabi saw)
2. mensyukuri *resources* yang telah diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia
3. bukan happiness yang dikejar manusia, akan tetapi HASANAH (kebaikan).

Dalam bagian ini pula penulis memperkenalkan istilah “rasional hanif” yang merupakan lawan dari rasional serakah dengan melaksanakan “tiga mekanisme ekonomi” sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits :

1. bukan *maximization* tapi *increasing*.
2. tanpa interest atau riba, akan tetapi qiradl atau *profit loss sharing*.
3. Ulur tangan sesama pelaku ekonomi maka:
 - bukan instrumental kalkulatif akan tetapi instrumental cinta.
 - bukan bersaing akan tetapi “berlomba dalam kebajikan”(QS. Al Baqarah 148).

Perbandingan antara Kooperativisme dengan Kapitalisme juga dibuat penulis dalam suatu ikhtisar.yang diakhiri dengan rangkuman makna dari kooperativisme yaitu:

1. Kooperativisme merupakan jalan yang diridhoi Allah, jalan yang benar berlandaskan pada kehanifan menuju kemakmuran bersama, bukan kemak-

muran orang perorang, menyembuhkan kemiskinan dan tak ada lagi kemiskinan.

2. Kooperativisme merupakan amanah yang tak henti-hentinya dari dunia ini.
3. Sebagai klimaks dari perjuangan kooperativisme ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Suatu paparan yang mungkin terasa idealis namun demikian dalam bagian lain penulis juga mencoba untuk memberikan suatu potret terhadap kondisi koperasi di Indonesia pada sekarang ini. Dalam analisisnya penulis mengungkapkan dua masalah yang dihadapi oleh koperasi Indonesia yaitu masalah pokok dan masalah teknis.

Untuk menanggulangi masalah pokok , rakyat harus dibangkitkan dari kekurangan tenaga menjadi kuat karsa dan berdisiplin terhadap kaidah-kaidah usaha dalam ekonomi pasar dan untuk itu menurut penulis hanyalah motivasi keagamaan atau *religious motivation*, sedangkan untuk menanggulangi masalah teknis dilakukan melalui 4 pendekatan :

1. koperasi multi purpose dijadikan koperasi dengan sub-sub koperasi yang single purpose.
2. pertumbuhan koperasi sangat tergantung kepada kepemimpinan yang hanif dan berkeunggulan dalam *profit motive* dan *achievement motive* yang dapat meningkatkan budaya kerja.
3. pelayanan kepada anggota harus unggul.
4. perlu peningkatan kewirakoperasian.

Bagian penutup dengan tajuk “Kini Giliran Indonesia, Melalui Islam”, penulis memasukkan pengertian nilai-nilai instrumental tentang kerja berdasarkan norma keislaman serta optimisme penulis terhadap perkembangan koperasi Indonesia berlandaskan

Islam, menurutnya Indonesia memiliki kekhususan dalam kemuslimannya sehingga mempunyai peluang untuk maju bahkan menjadi "leader" di dunia Islam.

Buku setebal 161 halaman ini memang sangat menarik untuk disimak karena memuat banyak hal yang mungkin belum banyak dirambah orang, bagaimana penulis meramu suatu sajian interaktif antara konsepsi dan teori sosiologi dengan falsafah agama Islam pada suatu obyek telaahan yang nyata yaitu koperasi.

Berdasarkan aspek-aspek normatif yang diyakini oleh penulis maka kita bisa menjelajahi keluasan ilmu yang kelihatan hanya bersifat fisik dengan sistematika pembahasan filosofi keagamaan yang kental, sehingga tidak mengherankan bila Rektor IKOPIN merekomendasikan buku ini untuk dibaca bukan hanya oleh para dosen dan mahasiswa tetapi juga oleh insan-insan koperasi atau masyarakat umum yang berminat menghayati koperasi.

ranny mutiara

ekstensia menerima resensi buku yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian, pengembangan masyarakat dan dinamika sosial yang ditulis pembaca untuk dimuat dalam rubrik WACANA.

Tulisan ditik dalam 2 spasi maksimal 3 halaman kwarto atau ditik menggunakan program WS4 (Disket dikirim ke *ekstensia*). *ekstensia* akan menentukan tulisan yang akan dimuat bagi yang tidak dimuat akan dikembalikan.

BENARKAH ?!



**KEMELUT DI PENYULUHAN,
PETANI BLINGSATAN.....**

Revitalisasi Semangat, Semangat Revitalisasi

Semenjak pelimpahan bepepe alias balai penyuluhan pertanian beberapa tahun silam, Majudi jadi sering tergelitik perhatiannya setiap kali ada pembicaraan tentang bepepe. Entah mengapa. Mungkin karena ia memiliki kedekatan emosi dan spirit dengan lembaga itu. Atau mungkin juga karena ia merasakan adanya kekeliruan memandang bepepe dalam konstalasi pembangunan pertanian selama ini.

Majudi tidak menyoal ihwal pelimpahan itu. Sebab dalam benaknya, pelimpahan itu merupakan suatu konsekuensi logis. Sebuah keniscayaan. Tapi yang selalu ia *gegetuni* ialah karena kekeliruan pandang itu telah mengakibatkan kekeliruan dalam menangani bepepe. Sesuatu yang harus dibayar mahal. Karena energi dan semangat yang telah begitu besar dan mengkristal, pelan-pelan kian memudar. Ini murni letikan pemahaman dalam palung kalbu Majudi. Entah benar, entah tidak.

Maka ketika ada tim dari pusat lengkap dengan wakil dari bank dunia melakukan kunjungan dalam misi revitalisasi bepepe, Majudi jadi amat berminat. Ia tergolong paling serius dan paling aktif merespon dalam acara temu dialog yang digelar dengan format sarasehan itu. Pulang pertemuan, hati Majudi tak kepalang girangnya. Andai ia masih *abege* (anak baru gede),

mungkin ia akan melakukan gerakan seperti ini: tangan kanan terkepal, sikunya sigap ditarik ke bawah, sambil mulutnya meneriakkan kata *yes!* Saking senangnya. Bagaimana tidak? Do'a dan harapan terpendam yang menggumpal, yang pasti Yang Maha Agung mendengarnya, kini bagai menemukan tanda-tanda jawabannya. Itu terdapat dalam selubung istilah revitalisasi bepepe!

Majudi mengakui pemahamannya, tentang revitalisasi bepepe tidak persis seluruhnya tertangkap. Tapi paling tidak getetar esensinya bisa ia rasakan. Menghangati rongga dada dan aortanya. Majudi menemukan padanan bahwa revitalisasi bepepe pada hakekatnya adalah upaya memfungsikan kembali bepepe sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian.

Bagi seorang Majudi, satu kesimpulan seperti itu sudah cukup untuk merangsang dan menggerakkan alam pikirnya berkelana mengembara ke belantara perenungan tanpa batas, tanpa tepi. Mencari kemungkinan, menemukan alternatif. Dan itulah yang tengah dijalani Majudi. Ia masuk dalam sebuah proses: berkontemplasi, perenungan. Ketika pencerahan merasuki batin dan nalarnya, orang pertama yang diajak bicara adalah Jumadi.

Minggu pagi gerakan Majudi sebat menuju rumah Jumadi. Ketika dipersilakan duduk di teras sambil minum kopi

dan menyantap pisang goreng, Majudi malah mengajak Jumadi jalan-jalan. Jumadi cukup kenal tabiat sobatnya yang satu ini. Menangkap gelagatnya, pasti ada sesuatu dengan Majudi, bisik hati Jumadi. Makanya sonder ba-bu lagi, Jumadi pun menuruti ajakan Majudi.

Keduanya berjalan beriringan. Dingin pagi menambah suasana tambah beku. Lewat sepuluh tindak, barulah Jumadi bersuara.

“Kita jalan kemana, Jud?”

“Kita ke bepepe.”

Pendek jawaban Majudi, tapi membuat Jumadi agak terlengkap. Ke bepepe? Minggu pagi? Ada apa? Lagi pula sudah lama mereka tidak berjalan kaki bila ke bepepe. Dulu memang iya. Tapi itu dulu sekali.

Menangkap isyarat tanya tanpa gema di wajah Jumadi, maka Majudi pun meneruskan ucapannya.

“Kita mengurai kenangan lama, saat dulu segala sesuatunya kita lakukan dengan berjalan kaki.”

Jumadi mulai sedikit mengerti arah pembicaraan Majudi. Tapi

“Untuk apa?”

“Bukankah tidak ada kelirunya kita mengurai kenangan lama. Terlebih bila kenangan itu mampu membangkitkan semangat pengabdian yang tulus.”

Otak Jumadi bekerja keras, mencoba merangkai kata-kata kunci dalam kalimat-kalimat yang diucapkan Majudi. Bepepe, kenangan, semangat, apa kaitannya? Jumadi bagai tengah mengikuti Kuis Kata Berkait yang sering ditontonnya di televisi. Tapi belum menemukan jawabannya, sehingga ia bilang pas alias lewat.

Majudi meneruskan.

“Masih ingat soal revitalisasi bepepe tempo hari?”

Jumadi mengangguk, hatinya yang menjawab iya.

“Upaya revitalisasi bepepe dalam pandanganku, Jum, adalah sebuah keberanian untuk menyatakan kejujuran. Kalau revitalisasi diartikan sebagai memfungsikan kembali, menghidupkan kembali, atau membangunkan kembali, bukankah itu berarti kejujuran bahwa selama ini memang ada yang kurang berfungsi, ada yang tidak hidup, ada yang tertidur.”

Jumadi manggut-manggut. Batinnya sepakat dengan argumen Majudi. Keduanya tanpa terasa sudah memasuki pelataran bepepe. Sepintas mereka mengamati kondisi bangunan bepepe dari luar. Tampak beberapa bagian mulai rapuh dan memberi kesan kurang terawat. Keduanya memasuki ruangan yang beberapa tahun silam selalu menjadi tempat pertemuan dwimingguan, di mana beragam masalah di lapangan coba diikhtikarkan cara pemecahannya. Majudi mencolekkan ujung telunjuk tangannya ke atas meja. Tampak colekannya membekas karena debu menebali seluruh permukaan meja.

“Secara pribadi aku menghargai dan mendukung niatan revitalisasi bepepe, menghidupkan kembali bepepe, memfungsikan kembali bepepe sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian.” Majudi bergerak mendekati papan tulis, sementara Jumadi menarik sebuah kursi dan mendudukinya. “Kamu masih ingat, Jum, apa yang pernah dipaparkan bapak pepees insinyur Abditani di sini sepuluh tahun silam, mengenai tiga hal yang dapat membuat fungsi dan mandat bepepe berjalan?”

Jumadi menerawang. Ingatannya merambah wilayah kenangan saat insinyur Abditani dengan gamblang menjelaskan tiga hal yang diungkap Majudi tadi. Pertama adalah *hardware* alias perangkat keras. Kata lainnya adalah sarana dan fasilitas fisik. Kedua

adalah *software* atau perangkat lunak, bisa berarti kebijaksanaan, pengaturan atau program. Dan ketiga adalah *brainware*, unsur manusianya, ya penyuluh-penyuluh pertanian seperti kita ini, yang merencanakan, yang mengelola, yang menjalankan. Kilas balik Jumadi terpotong ketika Majudi meneruskan bicara.

“Pasti, pasti kamu ingat. Iya ‘kan, Jum?” Majudi berhenti sejenak. “Sekarang ini revitalisasi bepepe mulai memperlengkapi bepepe dengan beragam sarana yang diperlukan. Itulah *hardware*-nya. Aku juga mendengar kabar bahwa di pusat tengah digodok eskabe Mentan dan Mendagri yang berkaitan dengan soal bepepe. Itu berarti salah satu *software*-nya guna pengelolaan bepepe di masa mendatang. Tinggal lagi,” Majudi tidak melanjutkan kalimatnya.

“Aku mengerti,” sela Jumadi bersemangat.

“Kamu pasti mengerti, Jum, pasti. Sebab kita satu guru, satu ilmu, satu pengabdian,” Majudi berhenti lagi. Pandangannya menatap langit-langit ruangan. “Ya, tinggal kita-kita inilah sebagai unsur *brainware*-nya yang mesti tanggap dan kreatif menjawab perkembangan, sehingga kita bisa merakit *software*-*software* lainnya sampai berwujud kegiatan.”

“Aku merasakan getar keprihatinan dalam nada bicaramu, Jud. Betulkah itu?”

Majudi menarik nafas. Panjang. Dihembuskan menghangati rongga-rongga hidungnya. Plong.

“Jum, bukankah sesuatu yang indah bila kejujuran ditanggapi dengan kejujuran pula? Bila revitalisasi bepepe merupakan refleksi dari kejujuran menanggapi kekurangan selama ini, bukankah kita juga bisa bersikap jujur mengakui bahwa memang ada kemunduran dalam semangat pengabdian kita. Karena kita lebih sibuk memopertanyakan *status quo*, keadaan, dan kemudian tenggelam dalam kegamangan. Kita lupa berkreasi bagaimana mengantisipasi keadaan. Sebab bagaimanapun, kelembagaan tidak lebih dari sekadar kelengkapan, bukan tujuan akhir. Sebagai fungsionalis, tujuan pengabdian kita tetaplah sama, di manapun kita berpijak, yaitu menuju kesejahteraan petani-nelayan dan keluarganya.”

“Aku paham sekarang, Jud,” Jumadi bangkit dan bergerak mendekati Majudi. “Menurutmu kita perlu melakukan revitalisasi semangat sebagai bagian dari respon kita menanggapi revitalisasi bepepe. Betul begitu?”

“Persis, Jum. Bahkan menurutku revitalisasi semangat itu perlu terus kita lakukan, sehingga kita memiliki semangat revitalisasi itu sendiri. Semangat memperbaiki diri, semangat menyempurnakan.”

Mendengar penuturan itu benak Jumadi bagai tergelitik sebuah pemikiran.

“Jud, masih dalam semangat revitalisasi. Ngomong-ngomong kapan kamu meminang Inten?”

Ha?

Basuki Setiabudi

Lensa







Perpustakaan Badan P
Pengembangan Sumber
Pertanian

Ekstensia / BPPSDMP



M0072026